

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013. Dengan Visi "Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera" dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

#### A. Tiga Agenda Utama Pembangunan

1. Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan amanat dan batasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sehingga dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. Berikut pembagian urusan desentralisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi terdiri atas :

1. Urusan Wajib meliputi :

- 1) Pendidikan  
Dinas Pendidikan
- 2) Kesehatan
  - a. Dinas Kesehatan.
  - b. RSUD A.Wahab Syahrane.
  - c. RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
  - d. RSK Atma Husada.
  - e. RSUD Tarakan.
  - f. Badan Narkotika Provinsi.
- 3) Lingkungan Hidup.  
Badan Lingkungan Hidup
- 4) Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan.  
Dinas Pekerjaan Umum
- 5) Perencanaan Pembangunan dan Statistik :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan,  
Pedalaman dan Daerah Tertinggal
- 6) Kepemudaan dan Olah Raga.  
Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 7) Penanaman Modal.  
Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
- 8) Koperasi dan UMKM serta Urusan Pilihan Industri,  
Perdagangan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil dan Menengah
- 9) Kependudukan & Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan  
Pertanahan.  
Biro Pemerintahan Umum.
- 10) Ketenagakerjaan serta Urusan Pilihan Transmigrasi.  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 11) Ketahanan Pangan.  
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
- 12) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB dan Keluarga Sejahtera.  
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- 13) Perhubungan.  
Dinas Perhubungan
- 14) Komunikasi dan Informatika :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- 15) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 16) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  - a. Biro Humas dan Protokol.
  - b. Biro Biro Sosial.
  - c. Biro Umum.
  - d. Biro Organisasi.
  - e. Biro Pemerintahan
  - f. Biro Pembangunan Daerah.
  - g. Biro Ekonomi.
  - h. Biro Hukum.
  - i. Biro Perlengkapan.
  - j. Biro Keuangan.
  - k. Biro Kerjasama.
  - l. Sekretariat DPRD Provinsi.
  - m. Sekretariat KORPRI.
  - n. Dinas Pendapatan Daerah.
  - o. Inspektorat Provinsi.
  - p. Badan Penelitian Pembangunan Daerah.

- q. Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah.
  - r. Badan Kepegawaian Daerah.
  - s. Kantor Penghubung Provinsi di Jakarta.
- 17) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  - 18) Sosial.  
Dinas Sosial
  - 19) Budaya serta Pilihan Pariwisata.  
Dinas Budaya dan Pariwisata
  - 20) Kearsipan.  
Badan Arsip Daerah
  - 21) Perpustakaan  
Badan Perpustakaan
2. Urusan Pilihan meliputi:
    - 1) Kelautan dan Perikanan.  
Dinas Kelautan dan Perikanan
    - 2) Urusan Pertanian :
      - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Penyuluhan.
      - b. Dinas Perkebunan.
      - c. Dinas Peternakan.
    - 3) Urusan Kehutanan.  
Dinas Kehutanan
    - 4) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.  
Dinas Pertambangan dan Energi.

Dalam menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjabarkannya dalam Tiga Agenda Utama Pembangunan yang dituangkan ke dalam 12 Prioritas Pembangunan 2012 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012	URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN SEBAGAI PELAKSANA
Agenda 1 : Menciptakan Kaltim Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Prioritas 8 : Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal  Prioritas 12 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	a. Pemerintahan Umum. b. Kepegawaian. c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. d. Perencanaan Pembangunan. e. Perbatasan. f. Kearsipan. g. Komunikasi dan Informasi. h. Pertanahan. i. Statistik. j. Perpustakaan.
Agenda 2 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat	Prioritas 1 Legalisasi RTRWP Kaltim dan Peraturan Zonasi  Prioritas 2 : Peningkatan Upaya Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim  Prioritas 3 : Pembangunan Infrastruktur  Prioritas 4 : Revitalisasi/Peningkatan Daya Listrik/ Pengembangan Energi  Prioritas 5 : Ketahanan dan Kemandirian Pangan  Prioritas 6 : Peningkatan Daya Saing, Investasi, dan Kepariwisata	a. Pertanian : b. Pertanian Tanaman Pangan. c. Perkebunan. d. Peternakan. e. Ketahanan Pangan. f. Kelautan dan Perikanan. g. Kehutanan. h. Perindustrian. i. Koperasi dan UMKM. j. Penanaman Modal Daerah. k. Perdagangan. l. Pekerjaan Umum. m. Tata Ruang. n. Energi dan Sumberdaya Mineral. o. Perhubungan. p. Lingkungan Hidup. q. Pariwisata. r. Perumahan. s. Kebudayaan.
Agenda 3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Prioritas 7 Percepatan Pengentasan Kemiskinan  Prioritas 8 Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.  Prioritas 9 Peningkatan Kualitas/Mutu Pendidikan  Prioritas 10 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	a. Pendidikan. b. Kesehatan. c. Pemuda dan Olah Raga. d. Pemberdayaan Perempuan & KB. e. Sosial. f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. g. Tenaga Kerja. h. Transmigrasi.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Pembangunan Kalimantan Timur dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tiga Agenda Utama Pembangunan yaitu :

AGENDA PERTAMA, Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Agenda pertama visi Kalimantan Timur Bangkit 2013 adalah menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pembangunan di bidang hukum dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

Dibidang reformasi birokrasi, Kalimantan Timur 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak tahun 2009 hingga 2012 mencatat prestasi dengan predikat Pemerintah Provinsi terbaik hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) serta Piagam Penghargaan dari Deputy Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 1999.

Untuk selengkapnya, disampaikan beberapa capaian hasil pembangunan bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi selama empat tahun pelaksanaan RPJMD, antara lain :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada bulan Maret tahun 2011 telah dilaunching PTSP Provinsi dan diikuti oleh tujuh PTSP Kabupaten/Kota yang telah mendapat Prasasti dan pengakuan dari BKPM Pusat, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan dan Tarakan. Pada tahun 2011 telah dilaunching

PTSP di Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, Kutai Barat dan Paser sedangkan yang terakhir melakukan launching pada tahun 2012 adalah Penajam Paser Utara. Dengan adanya PTSP waktu yang diperlukan dalam proses perijinan hanya rata-rata 15-24 hari, lebih pendek dibanding sebelumnya yang memerlukan waktu 2 - 3 bulan dengan dampak terjadinya peningkatan 25% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain waktu pengurusan yang lebih pendek dengan adanya PTSP ini juga lebih menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya.

2. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, telah melaksanakan perekaman e-KTP pada 14 Kabupaten/Kota melalui 2 (dua) tahap pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan persentase sebesar 88,42 %, adapun yang belum sebesar 11,58 % sedang dilakukan penyisiran perekaman di seluruh Kab/Kota se-Kaltim dikurangi dengan wajib KTP yang telah meninggal, pindah dan data ganda. Atas capaian tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Gubernur, Ketua DPRD Prov. Kaltim, Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Kab/Kota se-Kaltim pada Tahun 2011 dan 2012. Secara nasional Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan terbaik pertama untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan memperoleh hadiah mobil operasional berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis Inova.

Pada Tahun 2012 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengintegrasian data antara data SIAK dan data e-KTP untuk pengolahan Data Agregat Kependudukan (DAK), sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan data penduduk dalam bentuk DAK sebagai bahan KPU untuk menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri No. 470/3264/SJ tanggal 29 Agustus 2012 yang diserahkan serentak pada tanggal 6 Desember 2012 di seluruh

Indonesia. Adapun DAK Provinsi Kaltim berjumlah 4.270.577 jiwa, selain itu Pemerintah Pusat juga menyiapkan Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sesuai dengan Perpem RI No. 6 Tahun 2005, Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 serta Keputusan KPU Prov. Kaltim No. 01/Reg-KWKIKip/KPU-Prov/II/2013 untuk kemudian diserahkan kepada KPU Prov. Kaltim pada tanggal 7 Februari 2013 dengan jumlah DP4 Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2.941.786 jiwa.

3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2009 dibentuk pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement) Kalimantan Timur, yang diikuti oleh kota Bontang dan kota Balikpapan. Paket lelang yang dilaksanakan LPSE provinsi pada Tahun 2009 sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai pagu pengadaan Rp.252 juta dilakukan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kominfo. Pada tahun 2010 sebanyak 22 SKPD Provinsi telah melakukan lelang elektronik dengan jumlah paket sebanyak 105 dengan nilai Rp.237,65 Milyar. Pada tahun 2011 SKPD yang telah melakukan lelang elektronik sebanyak 36 SKPD Provinsi dengan jumlah paket lelang sebanyak 777 dengan nilai Rp.4,3 Trilyun. Pada Tahun 2012 jumlah paket yang dilelang secara elektronik sebanyak 1.509 Paket dengan nilai pagu lelang sebesar Rp.4.270 Trilyun, dengan efisiensi 15,34%. Tahun 2012 penerapan LPSE di Kalimantan Timur telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 13 Kabupaten/Kota dan yang belum operasional Kabupaten Tana Tidung.
4. Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik (Samsat online), telah dilaunching pada tahun 2009 dan sampai tahun 2012 telah berjalan dengan baik di 14 Kabupaten/Kota. Dengan Samsat online, pembayaran dapat dilakukan di Kabupaten/Kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka terdaftar di Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur serta sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dari pajak kendaraan (PKB-BBNKB dan PBB-KB) dari



Rp.688,52 Milyar pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.1,06 Trilyun atau meningkat 64,77% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1,43 Trilyun atau meningkat 74,38%. Posisi hingga bulan Desember 2012, PAD dari Pajak Kendaraan telah mencapai 4,941 Trilyun.

5. Reformasi Birokrasi Bidang Kepegawaian dititik beratkan pada upaya mereformasi sistem administrasi dan pelayanan kepegawaian agar lebih efisien, efektif dan produktif. Penerapan Kartu PNS Elektronik diresmikan Menpan Tanggal 22 Januari 2009 dan Kalimantan Timur merupakan Provinsi percontohan bersama 4 Provinsi lainnya yaitu DKI, Jatim, NAD dan Kepri. Kalimantan Timur dinilai oleh KEMENPAN-RB menjadi Provinsi terbaik dan telah menerapkan Sistem KPE secara online.
6. Reformasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD yang telah dibangun mulai Tahun 2010 mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2011 secara online kepada seluruh SKPD dan 14 Kabupaten/Kota. Dalam Tahun 2011, telah dilakukan tahapan pengintegrasian SIPPD dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV) serta Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS). Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diaudit dan mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012 bersamaan dengan pembukaan Musrenbang penyusunan RKPD 2013. Bulan Juni 2012 telah dibentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur.
7. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Menteri Negara PAN-RB dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-

Kalimantan Timur dan pembentukan Tim Kormonev sebagai pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. Hingga tahun 2012 telah terbentuk tim Kormonev Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota.

Penetapan Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan hasil survei Integritas Sektor Publik tahun 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kalimantan Timur memperoleh Peringkat ke 4 dari 5 Pemerintah Provinsi dengan Skor Integritas Tertinggi. Selain itu dalam rangka untuk pemberantasan korupsi pada tanggal 22 Oktober 2012 telah dicanangkan dan ditandatangani pernyataan/deklarasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI Menuju WBK) oleh Gubernur, Kejati, Kapolda, Bupati/Walikota se Kaltim, Ketua DPRD dan Instansi Vertikal dihadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ketua Ombudsmen RI. Sesuai dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (STRANAS PPK) dan sebagai implentasinya Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahunnya sesuai dengan SE. Mendagri No. 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 dan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, sebagai Pilot Project Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Kepada Badan Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur yang berhasil meraih piala dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CCP) 2012 kategori Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP) dengan nilai kriteria B. Ada beberapa inovasi pelayanan yang dikembangkan sejak Tahun 2009, yaitu :

- 1) Peningkatan layanan perpustakaan secara online dan terintegrasi dengan 12 perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan SKPD maupun Perpustakaan Kabupaten/Kota.
  - 2) Peningkatan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan (mobil perpustakaan keliling) dengan 13 lokasi pelayanan di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
  - 3) Pemberian bantuan buku kepada 343 perpustakaan desa dan rak buku kepada 10 Perpustakaan Puskesmas. Peningkatan Layanan perpustakaan secara online maupun perpustakaan keliling secara nyata dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari 126.342 orang pada tahun 2008, 171.144 orang pengunjung pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 35,46% menjadi 186.231 orang pengunjung tahun 2010 atau meningkat sebesar 8,81% pada tahun 2011 jumlah pengunjung meningkat sebesar 78,42% atau 237.473 orang dan tahun 2012 jumlah pengunjung meningkat sebesar 7,5% atau 242.626 orang Untuk meningkatkan minat baca maka dilakukan terobosan dengan menambah jam pelayanan, semula sampai dengan jam 17.00 diperpanjang sampai dengan jam 21.00 setiap hari. Selain itu perpustakaan Kaltim menjadi "Centre of Excellence" untuk wilayah Kalimantan dari enam wilayah di Indonesia, karena telah memenuhi kriteria standar kinerja yang tinggi.
9. Dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta daerah yang tidak memiliki akses informasi, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa M-PLIK yaitu mobil pelayanan internet kecamatan sebanyak 72 unit yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Mobil ini juga dapat digunakan sebagai perpustakaan elektronik bergerak, dengan jaringan internet yang ada referensi buku-buku akan mudah

didapat masyarakat di pedesaan, pedalaman dan perbatasan dengan mudah dan murah.

10. Dalam Bidang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2009, berdasarkan laporan POLDA Kalimantan Timur jumlah kriminalitas 9.115 perkara pada tahun 2010 naik menjadi 9.955 perkara dan pada tahun 2011 turun menjadi 9.238 perkara. Tahun 2012 kriminalitas berjumlah 11.234 perkara. Kasus pencurian ikan menurun, pada tahun 2009 sebanyak 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita 5 buah dan tahun 2010 menjadi 1 kasus dengan jumlah kapal yang disita 1 buah. Pada tahun 2011 meningkat 10 kasus dengan jumlah kapal yang disita 11 unit. Tahun 2012 menurun 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita sebanyak 6 unit. Sementara pencurian dan penyelundupan kayu, tahun 2009 sebanyak 328 kasus, menurun menjadi 296 kasus pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 turun menjadi 251 kasus. Pada tahun 2012 kembali menurun sebanyak 81 kasus. Kegiatan unjuk rasa masyarakat di Bidang Politik pada tahun 2009 sebanyak 65 kasus, 2010 meningkat 258 kasus, 2011 turun tajam menjadi 17 kasus dan tahun 2012 menurun menjadi 4 kasus. Di Bidang Ekonomi tahun 2009 sebanyak 99 kasus, 2010 turun menjadi 60 kasus, 2011 naik menjadi 134 kasus, tahun 2012 menurun tajam 4 kasus. Pemogokan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 253 kasus, 2010 turun menjadi 14 kasus, 2011 kembali menurun menjadi 12 kasus. Untuk tahun 2012 naik sebanyak 16 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa peningkatan stabilitas ketertiban umum di daerah cukup kondusif dan terkendali.
11. Dalam Bidang Hukum dan Demokrasi, terjadi kemajuan yang cukup signifikan dari masyarakat Kalimantan Timur, dimana nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur tahun 2009 nilainya 72,31 peringkat ke-8 nasional. Kemudian tahun 2010 nilainya 73,04 peringkat ke-4 nasional. Kesadaran berdemokrasi masyarakat juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten, bulan Mei 2008 di Kabupaten Penajam Paser Utara tingkat partisipasi memilih

mencapai 72.607 atau 77,25 %, bulan Oktober 2008 di Kota Tarakan mencapai 79.532 pemilih atau 64,23% dan Tana Tidung bulan November 2009 tingkat partisipasi 8.299 pemilih atau (82,42%). Bulan Mei 2010 di Kabupaten Kutai Kartanegara tingkat partisipasi pemilih 283.234 atau 65,61%, Kabupaten Paser bulan Juni 2010 sebanyak 103.419 pemilih atau 66,75%, Kabupaten Bulungan bulan Juni 2010 sebanyak 54.296 pemilih atau 73,15%, Kabupaten Berau bulan Juli 2010 sebanyak 82.021 pemilih atau 66,33%, Kota Samarinda bulan Oktober 2010 sebanyak 313.539 pemilih atau 61,59%, Kabupaten Kutai Timur bulan November 2010 sebanyak 118.272 pemilih atau 56,39%, dan Kota Bontang bulan Desember 2010 sebanyak 73.302 pemilih atau 65,55%. Pada tahun 2011 partisipasi masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Malinau bulan Januari 2011 sebanyak 34.551 pemilih atau 70,11%, Kabupaten Kutai Barat bulan Januari 2011 sebanyak 90.143 pemilih atau 73,61%, Kota Balikpapan bulan Pebruari 2011 sebanyak 226.801 pemilih atau 56,31%, Kabupaten Nunukan bulan Pebruari 2011 sebanyak 74.023 pemilih atau 75,22%. Partisipasi pemilih dalam Pemilukada di Kalimantan Timur pada tahun 2010 dan tahun 2011 rangking tertinggi adalah Kabupaten Nunukan dengan tingkat partisipasi masyarakat 74.023 pemilih atau 75,22%.

12. Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi peluang kerja dilaksanakan melalui bursa kerja secara online dan Job Market Fair (JMF). Upaya ini dilakukan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Pada Tahun 2009 difasilitasi 67 perusahaan dengan 1.100 pencari kerja untuk 576 lowongan kerja dan diterima sebanyak 402 pekerja. JMF pada tahun 2010 dengan 68 perusahaan 1.744 pencari kerja dengan jumlah lowongan 548 yang diterima sebanyak 261 pekerja. JMF pada tahun 2011 dengan 114 perusahaan, 3.226 pencari kerja dengan jumlah lowongan 1.655, diterima sebanyak 663 pekerja. JMF pada tahun 2012 dengan

108 perusahaan, 4.365 pencari kerja dengan jumlah lowongan 3.543, diterima sebanyak 850 pekerja.

13. Untuk mempercepat Pembangunan Wilayah Perbatasan telah dilakukan yaitu :

- 1) Pembangunan Jalan mulai dari Tanjung Selor – Sekatak Buji – Malinau – Mensalong – Simanggaris –Sei Ular sepanjang 437,83 Km dilakukan peningkatan struktur. Capaian sampai dengan akhir tahun 2012 yaitu aspal 329,23 Km, agregat 108,60 Km. Sedangkan Simanggaris – Batas Negara sepanjang 20,69 Km sudah beraspal mencapai 15 km dan Agregat mencapai 5,69 Km.
- 2) Pembangunan Jalan lingkar Pulau Sebatik sepanjang 97 Km dilaksanakan peningkatan struktur jalan aspal sepanjang 18,33 Km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 3,0 Km. Dan capaian akhir tahun 2012 yaitu permukaan aspal sepanjang 59,90 Km, agregat sepanjang 32,1 Km dan tanah sepanjang 5 Km.
- 3) Pembangunan Jalan Malinau – Mentarang – Paking – Long Semamu – Long Bawan – Long Midang – Batas Negara sepanjang 180 Km, dilakukan peningkatan struktur. Capaian Akhir tahun 2012 yaitu telah terbangun 135,60 Km dengan kondisi aspal sepanjang 14,10 Km, agregat 121,5 Km dan belum terbangun 44,4 Km.
- 4) Pembangunan Jalan Malinau – Long Alango sepanjang 147,20 Km dilakukan pembukaan badan jalan. Dan capaian akhir tahun 2012 yaitu telah terbangun 108,14 Km dengan kondisi agregat 22 Km, tanah 71,42 Km dan belum terbangun 39,06 Km.
- 5) Pembangunan Jalan Batas Negara – Sei. Pengian – Long Nawang – Long Apung – Sungai Barang – Mahak Baru sepanjang 131,65 Km, dilakukan peningkatan struktur dari tanah menjadi Agregat C/Sirtu. Capaian akhir tahun 2012 yaitu agregat 93,48 Km dan tanah sepanjang 38,17 Km. Sedangkan dari mahak baru – Long Bagun Seberang masih

menggunakan jalan PT. Sumalindo sepanjang 147 Km dengan kondisi agregat.

- 6) Pembangunan Jalan Tering - Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari – Batas Kalbar sepanjang 398 Km, dengan pembukaan badan jalan. Capaian akhir tahun 2012 yaitu telah terbangun sepanjang 96,5 Km (Long Bagun – Long Pahangai) dan belum terbangun sepanjang 301,5 km.
- 7) Ruas Jalan Long Midang - Batas Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk Jalan Pararel perbatasan Long Nawang -Long Pujungan - Long Kemuat - Langap telah terbangun sepanjang 26,8 Km (kondisi tanah), Mensalong - Tau Lumbis telah terbuka sepanjang 7 Km (kondisi tanah). Dibangun melalui dana SAL APBN tahun 2012.
- 8) Pengembangan Bandara di Kawasan Perbatasan yaitu Long Bawan dengan progres mencapai 55%, Long Ampung dengan progres mencapai 35% dan Data Dawai progres mencapai 31%, akan dikembangkan landasan pacu menjadi 1.600 meter. Ketiga bandara tersebut telah dianggarkan dengan total dana Rp. 400 Milyar dengan Multi Years Contract. Tahun 2013 ditargetkan selesai dan dapat didarati Hercules. Selain itu telah diselesaikan terminal penumpang bandara Malinau dan Nunukan yang representatif.
- 9) Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan kegiatan percepatan penataan batas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi pelacakan batas daerah serta melakukan Pilar Batas Utama (PBU) guna menghindari konflik di lapangan. Pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pelacakan tapal batas antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi sepanjang 1.309 Km dan pemasangan PBU sebanyak 156 buah yang terdiri antar provinsi 26 buah dan Kabupaten/Kota 130 buah. Pada tahun 2011 telah terpasang PBU sebanyak 48 pilar yang terdiri 10 buah antar provinsi dan 38 antar Kabupaten/Kota, dan pada tahun 2012 telah terpasang PBU sebanyak 8 pilar antar Kabupaten/Kota.

- 10) Untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah perbatasan, Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 telah memberikan beasiswa khusus untuk 3 Kabupaten di kawasan perbatasan, masing-masing sebesar Rp. 1 Milyar melalui bantuan keuangan. Sedangkan pada tahun 2012 diberikan Beasiswa kepada kabupaten Malinau sebesar Rp. 2 Miliar, Nunukan dan Kutai Barat masing masing Rp. 1 Miliar.
- 11) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jauh dari akses pelayanan rumah sakit terutama masyarakat di daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membantu upaya peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam. Pengobatan masal secara gratis di 2 (dua) lokasi Kabupaten Perbatasan Malinau (Long Ampung) dan Kutai Barat (Long Pahangai). Sampai dengan Bulan Agustus 2012 terdapat sebanyak 131 Puskesmas 24 jam tersebar di 14 Kabupaten/Kota, dimana 16 Puskesmas berada di Kawasan Perbatasan. (Pengobatan Gratis di Malinau, Long Ampung dan Long Pahangai).
- 12) Dalam rangka pengembangan dan pelayanan jaringan Tahun 2012 telah dibangun 1 (satu) buah Tower di Long Nawang setinggi 72 Meter serta telah diberikan bantuan untuk pendirian 3 buah Tower kepada Kabupaten Malinau.
- 13) Pembangunan stasiun Produksi RRI di Kabupaten Perbatasan yaitu Malinau, Nunukan dan Kutai Barat, sudah On Air dengan kekuatan 5 MGHZ.
- 14) Sebagai upaya untuk pengamanan pulau – pulau terluar dan perbatasan, telah dibangun sarana Pengaman Pantai Pulau Sambit Kabupaten Berau dimana merupakan salah satu pulau terluar di perbatasan. Total biaya mencapai Rp. 23 Milyar dengan konstruksi pengaman pantai sepanjang 440 Meter dan pemecah gelombang sebanyak 12 ribu buah serta saat ini telah berfungsi.



## AGENDA KEDUA, Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang berdaya Saing dan Pro Rakyat.

Perekonomian Kalimantan Timur tahun 2009 yang tergambar melalui besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku dengan migas mencapai Rp. 285,59 triliun, sedangkan pada tahun 2010 PDRB Kalimantan Timur mencapai Rp. 321,90 triliun. Tahun 2011 mencapai Rp.390,64 triliun. Pada tahun 2012 angka PDRB telah mencapai Rp.419,10 triliun.

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2012 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**) )</sup>	2012 <sup>**) )</sup>
1. Pertanian	15.523,1 (4,93)	16.956,0 (5,94)	19.279,8 (5,99)	22.866,4 (5,84)	25.796,1 (6,16)
2. Pertambangan	145.012,9 (46,06)	130.834,7 (45,81)	152.597,4 (47,43)	196.161,9 (50,12)	198.835,3 (47,44)
3. Industri Pengolahan	103.969,2 (33,03)	78.131,9 (27,36)	80.672,73 (25,07)	91.461,4 (23,37)	98.494,4 (23,50)
4. Listrik, & Air Bersih	748,0 (0,24)	812,3 (0,28)	895,0 (0,28)	1.023,3 (0,26)	1.120,3 (0,27)
5. Bangunan	6.766,2 (2,15)	7.761,1 (2,72)	8.859,16 (2,75)	10.323,5 (2,64)	12.487,2 (2,98)
6. Perdag, Hotel & Rest.	18.219,9 (5,79)	22.218,4 (7,78)	26.371,94 (8,20)	30.907,5 (7,90)	36.129,5 (8,62)
7. Pengangkutan & Komk.	9.354,3 (2,97)	10.530,2 (3,69)	12.034,97 (3,74)	14.044,9 (3,59)	16.652,2 (3,97)
8. Keu, Persw. & Jasa Persh	5.673,4 (1,80)	6.424,1 (2,25)	7.459,7 (2,32)	9.293,0 (2,37)	12.122,9 (2,89)
9. Jasa-jasa	9.546,4 (3,03)	11.921,9 (4,17)	13.593,9 (4,22)	15.326,7 (3,92)	17.463,8 (4,17)
<b>PDRB</b>	<b>314.813,5</b> <b>(100,00)</b>	<b>285.590,8</b> <b>(100,00)</b>	<b>321.764,4</b> <b>(100,00)</b>	<b>391.408,5</b> <b>(100,00)</b>	<b>419.101,6</b> <b>(100,00)</b>

Sumber : BPS Prov. Kaltim

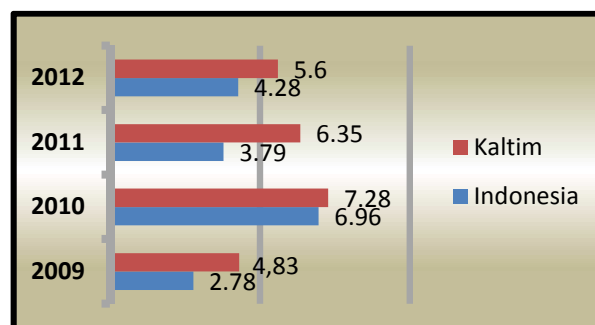
Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDRB (%)

Grafik 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur (%)



Indikator makro lainnya seperti inflasi tahun 2011 sebesar 6,35% lebih rendah dari akhir tahun 2010 sebesar 7,28%. Tahun 2012 sebesar 5,60%. Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 0,1622.

Grafik 4.2 Perkembangan Inflasi Kalimantan Timur dan Indonesia (%)



Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi berupaya untuk merubah struktur ekonomi yang bersumber dari Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui ke yang dapat diperbaharui dengan mengembangkan beberapa kawasan andalan/industri untuk dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Upaya tersebut telah menampakkan hasilnya, dengan ditetapkannya Kalimantan Timur bersama Provinsi Riau dan Sumatera Utara berdasarkan Inpres Nomor I tahun 2010 sebagai Cluster Industri berbasis Pertanian, Oleochemical di Kawasan Maloy Kutai Timur dan bersama Provinsi Jawa Timur sebagai Cluster Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang.

Disamping itu, di Kota Balikpapan telah dikembangkan Kawasan Industri Kariangau. Ketiga kawasan industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Kondisi di atas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan memberikan harapan dan peluang kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan.

Pengembangan cluster industri tersebut mutlak perlu didukung dengan infrastruktur yang handal. Penetapan jalan lintas Kalimantan sebagai salah satu Koridor Ekonomi Nasional. Ditetapkannya rencana pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 567/KPTS/M/2010 menjadi bukti dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan cluster tersebut.

Pengembangan cluster industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, walaupun RTRWP Kalimantan Timur belum ditetapkan, namun kini menunggu Persetujuan Pembahasan DPR RI sebelum mendapatkan persetujuan atau penetapan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan oleh Menteri Kehutanan.

Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 yakni 4,941 Trilyun meningkat 13% dari tahun 2011 yang hanya sebesar 4,366 Trilyun. Untuk dana perimbangan pada tahun 2012 yakni 5,396 Trilyun naik 2% dari tahun 2011 sebesar Rp.5,293 Trilyun.

Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan

MP3EI di Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Infrastruktur, antara lain:

1. Kondisi mantap jalan nasional sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 86,78% naik bila dibandingkan tahun 2011 sebesar 72,84%. Perkembangan jenis permukaan aspal dari tahun 2009 sepanjang 1.289,08 Km atau 83,72% dan tahun 2010 sepanjang 1.743,59 Km atau 82,31%, tahun 2011 sepanjang 1.773,82 Km atau 83,74 % sedangkan tahun 2012 sepanjang 1.797,69 atau 86,78 %.
2. Adapun beberapa ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan yaitu Batu Aji-Kuaro-Penajam, Kerang pada batas Prov. Kalsel-batas Kota Tanah Grogot, Sangatta - Sp. Perdau - Muara Lebak-Pelabuhan Sangkulirang, Simpang Perdau – Batu Ampar – Muara Wahau – Kelay – Labanan, Tj. Selor - Tj. Palas – Sekatak Buji - Malinau, Mensalong – Simanggaris – Batas Negara, Simpang 3 Apas - Simanggaris - Serudong,serta Simpang Blusuh – Batas Kalteng. Sedangkan ruas strategis nasional yang mengalami kerusakan yaitu Petung - Semoi - Sepaku - Km. 38 Samboja. Untuk menangani kerusakan ruas jalan tersebut, tahun 2012 dialokasikan dana melalui APBN sebesar Rp.1,133 Trilyun untuk Poros Selatan, Rp.96,328 Milyar untuk Poros Tengah dan Rp.613,061 Milyar untuk jalan perbatasan, namun demikian kerusakan tingginya tingkat kerusakan tersebut tidak dapat ditangani secara keseluruhan. Sedangkan tahun 2013 pemerintah provinsi menangani kerusakan jalan nasional melalui peningkatan kualitas dan struktur jalan di lintas Selatan, Tengah, Utara, serta ruas Non Lintas dengan alokasi dana Rp.2.163,369 Milyar, dengan panjang jalan nasional mencapai 2.118,17 Km alokasi dana tersebut belum mampu meningkatkan kondisi jalan secara keseluruhan, sehingga dilakukan penanganan sesuai skala prioritas.
3. Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 75,86% meningkat bila dibandingkan tahun 2011 sebesar 65,69% dan tahun 2010 sebesar 63,57%.

Perkembangan jenis permukaan aspal dari tahun 2009 dengan panjang 1.097,37 Km atau 62,28%, tahun 2010 dengan panjang 1.118,47 Km atau 63,47%, tahun 2011 dengan panjang 1.148,09 Km atau 65,16%. Sedangkan Pada tahun 2012 jenis permukaan aspal sepanjang 1.205,71 Km atau 68%.

4. Adapun beberapa ruas jalan Provinsi yang mengalami kerusakan yaitu, Samarinda – Sanga Sanga - Dondang, Simpang Patung Lembuswana - Sebulu - Muara Bengkal, Simpang Bentuas - Muara Jawa, Kerang - Segendang - Tj. Aru, Simpang blusuh – Damai – Melak, Sangkulirang - Talisayan, Tanjung Redeb – Talisayan. Upaya pemerintah provinsi dalam menangani kerusakan jalan provinsi dimana pada tahun 2013 dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dengan alokasi dana Rp.1,448 Trilyun, melalui peningkatan kondisi menjadi permukaan aspal/rigid pavement, pemeliharaan dan penanganan longsor. Dengan panjang jalan provinsi mencapai 1.762,07 Km alokasi dana tersebut belum mampu meningkatkan kualitas jalan secara keseluruhan sehingga dilakukan penanganan dengan skala prioritas.
5. Pembangunan Jembatan Pulau Balang merupakan bagian jalan lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, hingga bulan Desember 2012 untuk bentang pendek sepanjang 470 m, progress telah mencapai 65,18% sementara untuk bentang panjang sepanjang  $\pm$  800 meter dengan nilai investasi  $\pm$  Rp.1,6 Trilyun telah dimulai pembangunannya. Pada tahun 2013 dialokasikan dana APBN sebesar Rp.99 Milyar untuk pembangunan bentang panjang dan saat ini pembangunan jembatan bentang panjang sedang dalam proses pemenuhan persyaratan untuk dibiayai melalui pola Multiyears Contract APBN Tahun 2014 - 2018.
6. Pembangunan Jembatan Mahkota II sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 87 % yaitu pekerjaan Pylon 7 dan 8. Namun

masih diperlukan pembangunan jembatan bentang panjang yang diharapkan dibiayai melalui APBN.

7. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda panjang 99,20 Km telah dilaksanakan pembangunannya yang dibagi 5 segmen yaitu : segmen I Km.13 Balikpapan - Samboja, segmen II Samboja - Palaran I, segmen III Samboja Palaran II, segmen IV Palaran - Jembatan Mahkota II, segmen V Km 13 - Sepinggian Balikpapan dengan progres 31,94 %. Sedangkan pembangunan jalan akses dari Km 13 Balikpapan-jalan tol sepanjang 400 meter telah selesai dibangun.
8. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau dengan alokasi dana sebesar Rp.713 Milyar bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan PT. Pelindo IV. Saat ini pembangunannya telah selesai dilaksanakan, telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI, dan sudah beroperasi. Untuk dukungan infrastruktur telah dibangun jalan akses dari Km 13 - TPK Kariangau sepanjang 13,5 Km dengan capaian konstruksi rigid pavement 12,85 Km dengan 1 jalur (sisi kanan) dan 1 buah jembatan. Untuk 1 (satu) sisi dilanjutkan tahun 2013 dan direncanakan tuntas tahun 2014.
9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan dan pengadaan pagar pengaman pada ruas jalan provinsi. Sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan pemasangan marka jalan sepanjang 218.978 meter, pemasangan pagar pengaman sepanjang 6.093 meter, pemasangan rambu jalan 10.815 buah, pemasangan paku jalan 1.789 buah. Tahun 2012 terpasang marka jalan sepanjang 193.599 meter, rambu sebanyak 2.434 buah.
10. Pembangunan Pelabuhan Maloy pada tahun 2011 telah dimulai dan tahun 2012 dibangun sisi darat yaitu fasilitas perkantoran secara bertahap (Pembangunan gedung workshop selesai 100%). Sedangkan untuk perencanaan kawasan industri telah

disusun studi kelayakan, Master Plan, business plan serta AMDAL dan DED Kawasan Industri Maloy. Dan pada tahun 2013 dilaksanakan penyusunan FS dan Masterplan Tahap II untuk luasan 4.305 Ha. Untuk mendukung pengembangan kawasan, tahun 2012 dilakukan pembangunan jalan akses 17,3 Km melalui alokasi dan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp. 258 Milyar dengan konstruksi Rigid Pavement pada sisi kanan badan jalan 1 x 7,5 meter sepanjang 17,3 Km, untuk sisi kiri 1 x 7,5 Meter dan jalan dalam kawasan sebesar Rp. 100 Milyar. Pada Tahun 2013 dilakukan pembangunan Pelabuhan Maloy Sisi Perairan yang saat masih dalam proses lelang.

11. Pengembangan Bandara Sepinggian Balikpapan oleh PT. Angkasa Pura sampai akhir tahun 2012 mencapai 40%, sedangkan pada triwulan pertama tahun 2013 telah mencapai 65% meliputi pembangunan gedung terminal penumpang menjadi 110.000 m<sup>2</sup> dengan Garbarata 10 Unit, pembangunan gedung parkir dan apron serta infrastruktur lainnya. Sedangkan perpanjangan landasan pacu dari 2.500 meter menjadi 3.250 m akan diupayakan melalui sumber dana APBN.
12. Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda dibangun melalui program Multiyears Contract 2011-2013 sebesar Rp.696 Milyar untuk fasilitas sisi darat dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dan sampai saat ini progress capaian saat ini 45%. Fasilitas sisi udara pada tahun 2012 telah dimulai pembangunannya yaitu apron (pekerjaan tanah dasar).
13. Pengembangan Bandara Kalimarau Berau telah dilaksanakan melalui perpanjangan landasan pacu dari 1.850 meter menjadi 2.250 meter sehingga dapat didarati oleh pesawat Boeing 737-300 dan Airbus A-319 dan juga telah dibangun Terminal Penumpang Baru seluas 9.000 m<sup>2</sup> dilengkapi Garbarata 2 unit. Saat ini baik sisi udara dan sisi darat telah selesai pembangunannya yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada Tanggal 24 Oktober 2012.

14. Pengembangan Bandara Udara Juwata Tarakan dilakukan pembangunan apron dengan konstruksi sarang laba-laba, Terminal Penumpang dilengkapi Garbarata 4 unit secara bertahap dan pembangunan landasan pacu baru (paralel runway) tahap I berupa pematangan lahan. Saat ini telah dapat didarati pesawat Boeing 737-900ER dan Airbus 320. Tahun 2008 luas apron yang sudah terbangun 9.700 m<sup>2</sup> dan sampai tahun 2012 telah terbangun seluas 34.885 m<sup>2</sup> dan pada tahun 2013 akan dilakukan pembangunan lanjutan apron 2.250 m<sup>2</sup>, sehingga kebutuhan apron untuk bandara Tarakan sudah selesai.
15. Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pariwisata dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan pematangan lahan untuk pembangunan landas pacu sepanjang 100 x 1.700 meter, pembangunan bandara ini juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi untuk membangun kawasan perbatasan/pulau terluar. Pada tahun 2012 dilakukan penyiapan lahan seluas 77,500 m<sup>2</sup> (konstruksi agregat) sehingga pada tahun 2013 dapat dilakukan pekerjaan konstruksi runway.
16. Pembangunan sarana dan prasarana sungai dan danau meliputi pembangunan Dermaga Melak pada tahun 2012 telah tuntas pembangunannya. Sedangkan untuk Pembangunan Dermaga Tidung Pala pada tahun 2012 telah dilakukan pematangan lahan dan penyediaan pipa pancang dengan progres 100%. Rencana pada tahun 2013 dilanjutkan untuk pembangunan trestle dan fasilitas sisi darat (R. Tunggu + Kantor + Parkir) dermaga.
17. Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air pada tahun 2012 melalui program antara lain :
  - 1) Bendungan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara progres mencapai 54,58 % (meliputi pekerjaan jalan akses, saluran pengelak, dan sebagian tubuh bendungan), D.I. Biatan Kab. Berau progres mencapai 63,32% (telah terbangun jalan



akses 2,7 km, bending 1 buah dan jaringan irigasi 11,24 km, dan D.I. Kaliorang Kab. Kutai Timur progres 17,16 % (telah terbangun Bendung regulator 1 buah dan Jaringan Irigasi 2,5 km).

2) Penyediaan air baku berupa pembangunan Bendungan Sei Wain progres mencapai 6,67 %, terdiri atas pekerjaan jalan akses, dan pembuatan sumur dalam dengan debit 10-15 liter/detik, dan tahun 2013 dilanjutkan pembangunannya.

3) Pengendalian banjir Kota Samarinda berupa :

- a. Sistem Karang asam Besar dengan progress 24,29 %;
- b. Sistem Karang asam Kecil dengan progress 13,26 %;
- c. Sistem Karang Mumus dengan progress 14,99 %;
- d. Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam dengan progress 17,69 %;
- e. Normalisasi Polder Air Hitam dengan progress 100 %.

4) Pengamanan pantai Biduk-Biduk Kab. Berau progres 100% dan Pengamanan pantai BBU Manggar Kota Balikpapan dengan progress 100%.

18. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, telah dibangun prasarana sumber daya air meliputi; Pembangunan Bendung dan Embung untuk penyediaan air baku Pulau Sebatik, Nunukan, Tarakan dan Balikpapan. Pembangunan Bendungan yang sedang berjalan antara lain Bendung Marangkayu, Bendung Kaliorang, dan Bendung Biatan untuk meningkatkan produktifitas pertanian, serta telah dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi 23.278 meter. Pada tahun 2012 dibangun jaringan irigasi mencapai 17.470 meter, sehingga saat ini telah terbangun jaringan irigasi sepanjang 40.748 meter.

- a. Bendungan Marangkayu; fungsi untuk irigasi, air baku 200 lt/detik, mikrohidro 135 kWh, dan pengendalian banjir;

- luas areal irigasi 1500 Ha, petani 725 KK, Kelompok Tani 23 kelompok, produktifitas pertanian 6.360 ton/tahun.
- b. Bendungan Kaliorang; fungsi untuk irigasi, air baku 300 lt/detik, dan pengendalian banjir; luas areal irigasi 1300 Ha, petani 509 KK, Kelompok Tani 19 kelompok, produktifitas pertanian 3.432 ton/tahun.
  - c. Bendung Biatan; fungsi untuk irigasi dan mikrohidro; luas areal irigasi 1800 Ha, petani 250 KK, Kelompok Tani 12 kelompok, produktifitas pertanian 1.500 ton/tahun.
19. Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Kurang Mampu pada tahun 2012 telah terbangun sebanyak 3.994 Unit dari target RPJMD 2009-2013 sebanyak 5.000 Unit.
  20. Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam pada tahun 2012 sebesar Rp. 171 Milyar dengan Pola Tahun Jamak 2011-2013 dengan progres capaian 21,15 % meliputi kegiatan mobilisasi & pengadaan pipa pancang.
  21. Pembangunan Convention Hall dibiayai melalui APBD Provinsi dengan Pola Tahun Jamak 2011-2013 sebesar Rp.256,9 milyar. Sampai tahun 2012 progres pembangunannya telah mencapai 19 %, dan pada akhir Maret 2013 mencapai 28,05%.
  22. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Kota Samarinda dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi air bersih 200 lt/detik, dan pada tahun 2013 telah tuntas pembangunannya.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pertanian, antara lain :

1. Luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur tahun 2008 sebesar 409.564 hektar dan tahun 2009 meningkat menjadi 530.554 hektar. Kemudian tahun 2010 sebesar 663.533 hektar, tahun 2011 menjadi 827.347 hektar atau naik 22,69% dan Tahun 2012 menjadi 961.802 ha. Luas 961.302 ha terdiri dari

PBS seluas 717.845 ha, PTPN seluas 17.237 Ha dan Perkebunan Rakyat seluas 226.720 Ha. Sementara produksi sawit (wujud produksi tandan buah segar / tbs) dalam tahun 2008 sebanyak 1,6 Juta Ton, tahun 2009 menjadi 2,3 Juta Ton atau naik 43,75% dan tahun 2010 produksi sebesar 3,05 Juta Ton, tahun 2011 produksi menjadi 4,47 Juta Ton atau naik 46,56%, tahun 2012 menjadi 5,73 Juta Ton.

Tabel 4.3 Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Timur

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Luas Areal (ribu ha)	409,56	530,55	663,55	827,35	961,80
Produksi (ribu ton)	1.664	2.289	3.054	4.471	5.730

2. Produksi CPO setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2008 sebesar 366.148 Ton, tahun 2009 meningkat menjadi 505.610 Ton. Demikian pula tahun 2010 meningkat menjadi 672.035 Ton dan tahun 2011 menjadi 975.112 Ton. Pada tahun 2012 produksi CPO mencapai 1.032.204 Ton.
3. Pada tahun 2009 terdapat luas panen padi 146.177 ha dengan produksi 555.561 Ton GKG, tahun 2010 terdapat luas panen padi 150.031 ha, dengan produksi 588.877 Ton GKG. Sedangkan tahun 2011 luas panen padi seluas 140.215 Ha dengan produksi sebesar 552.616 Ton GKG. Pada tahun 2012 (ASEM) luas panen padi sebesar 140.689 ha dengan produksi sebesar 553.441 ton. Produktivitas padi tahun 2011 sebesar 39,34 kw/ha dan tahun 2012 (ASEM) sebesar 39,40 kw/ha. Bila dibandingkan kebutuhan beras Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar 401.505 Ton, yang dapat dipenuhi secara mandiri baru mencapai 92,02%. Tahun 2011 kebutuhan beras Kalimantan Timur sebesar 416.222 ton dengan persentase ketersediaan mencapai 83,30 %. Tahun 2012 kebutuhan beras sebesar 425.379 dengan persentase ketersediaan sebesar 81,63%. Untuk mencapai swasembada beras, perlu dilakukan perluasan areal tanam baru yang dapat mengatasi kondisi ketidakmandirian Kalimantan Timur dalam pemenuhan

kebutuhan beras, Intensifikasi pertanian dan Diversifikasi pangan berupa penganekaragaman konsumsi pangan.

4. Situasi Ketersediaan Pangan ditunjukkan oleh ketersediaan energi, protein dan lemak. Tingkat ketersediaan energi tahun 2008 sebesar 2.470 kilokalori per kapita, tahun 2009 sebesar 2.478 kilokalori per kapita, tahun 2010 sebesar 2.482 kilokalori per kapita dengan pertumbuhan 0,24% dan tahun 2011 sebesar 2.413 kilokalori per kapita, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.492 kilokalori per kapita. Dan Tingkat ketersediaan protein perkapita tahun 2008 sebesar 70,55 Gram, tahun 2009 sebesar 71,02 Gram, tahun 2010 sebesar 72,00 Gram dengan pertumbuhan 1,02% dan tahun 2011 sebesar 72,33 gram, pada tahun 2012 meningkat menjadi 73,30 gram. Sedangkan tingkat ketersediaan lemak perkapita tahun 2008 sebesar 46,97 Gram, tahun 2009 sebesar 51,29 Gram, tahun 2010 sebesar 61,12 Gram dengan pertumbuhan 14,07% dan tahun 2011 sebesar 69,72 Gram. Ketersediaan energi di tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan terhadap ketersediaan energi pada tahun 2011, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan produksi beras yang mana pada tahun 2011 sebesar 552.616 ton sedangkan tahun 2012 sebesar 553.441 ton. Peningkatan produksi beras tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan energi karena sumber energi terbesar masih didominasi oleh beras. Jika dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Gizi yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, angka ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka yang menjadi standar. Adapun standar untuk ketersediaan energi adalah 2.200 kkal/kapita/hari dan standar untuk ketersediaan protein adalah 57 gram/kapita/hari. Sebagai koreksi untuk lemak tidak ada standar tertentu, yang mana asupan lemak ke dalam tubuh cenderung dihubungkan terhadap kondisi kesehatan seseorang.
5. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras yang ditargetkan 1,5% per kapita pertahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI Tahun 2010, maka

telah dikeluarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Pangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Timur. Program aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui dan telah pula diikuti instruksi beberapa Bupati/Walikota. Program aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui Percepatan Gerakan Penganekaragaman Pangan yang dimulai dari sosialisasi di Sekolah Dasar/MI melalui pemberian KIT pada 70 SD/MI, Pemberian Alat Pengolah Tepung untuk 40 KWT, tahun 2012 bertambah 20 KWT sehingga menjadi 60 KWT dan Pengembangan Tanaman Pekarangan oleh 110 Kelompok Wanita Tani di pedesaan, dan menjadi 190 kelompok tani di tahun 2012, sosialisasi di hotel, lembaga masyarakat dan PKK melalui Gerakan Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal Non Beras dan Tepung. Gerakan ini mulai menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek konsumsi dari 80.50 pada tahun 2008 menurun menjadi 79.10 pada tahun 2009, pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 82.90 dan turun di tahun 2011 menjadi 80.70, pada tahun 2012 diproyeksikan menjadi 81.20. Ketidakstabilan skor PPH dari aspek konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya/kebiasaan masyarakat Kalimantan Timur dalam konsumsi pangan, dimana kelompok bahan pangan padi-padian/beras masih merupakan makanan pokok yang belum bisa tergantikan oleh kelompok pangan lainnya.

6. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 meliputi 31 Desa, dan pada tahun 2011 menjadi 47 desa dan tahun 2012 menjadi 53 desa termasuk desa inti dan desa replikasi. pembangunan Lumbung Pangan di 11 Unit pada tahun 2011, dan pada tahun 2012

bertambah 7 unit, sehingga menjadi 18 unit (Anggaran APBD dan APBN). Dan untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Pelaksanaan LDPM yang dimulai sejak tahun 2009 berlanjut tahun 2011 melalui tahapan Bansos, maka tahun 2012 sudah masuk ke Pasca Mandiri dan tetap dibina secara teknis dan administrasi Gapoktannya karena keberadaan LDPM ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen ditingkat kelompok tani, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Kalimantan Timur.

7. Dalam upaya pelaksanaan program strategis pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan di pedesaan dan perbatasan, diperlukan SDM penyuluh yang cukup, handal dan berkualitas agar petani menjadi produktif, mandiri, dan berkemampuan manajerial dalam mengembangkan usaha tani. Jumlah penyuluh PNS tahun 2008 sebanyak 558 orang, tahun 2009 sebanyak 635 orang dan tahun 2010 sebanyak 853 orang. Pada tahun 2011, penyuluh pertanian menjadi 855 orang. Tahun 2012 penyuluh PNS sebanyak 876 orang dan penyuluh THL sebanyak 338. Jumlah Penyuluh yang telah melakukan sertifikasi profesi penyuluh sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 367 Orang untuk Penyuluh Pertanian Terampil di Provinsi dan 14 Kab/Kota, 405 Orang untuk Penyuluh Pertanian Ahli di Provinsi dan 14 Kab/Kota, 2 Orang untuk penyuluh pertanian ahli di BPTP totalnya 774 Orang penyuluh yang bersertifikat profesi Penyuluh. Untuk mengapresiasi para penyuluh dan kelompok tani tersebut, Pemerintah memberikan Perhargaan

kepada Penyuluh Berprestasi setiap tahunnya dan dilaksanakan pada acara HUT Kemerdekaan RI, dan pelatihan kepada penyuluh guna meningkatkan kemampuan.

8. Dalam upaya untuk mewujudkan swasembada beras, telah dilakukan pencetakan sawah baru pada tahun 2008 seluas 2.023 Hektar, tahun 2009 seluas 800 Hektar, tahun 2010 seluas 600 Hektar dan tahun 2011 telah dicetak sawah seluas 2.604 ha bersumber dari data APBN dan APBD. Tahun 2012 cetak sawah tercatat bertambah seluas 4.350 Ha.
9. Upaya pencetakan sawah baru sekitar 2.604 Hektar di tahun 2011, tahun 2012 sekitar 5.770 Ha baik bersumber dari dana APBD maupun APBN, diharapkan dapat mengimbangi pertanian fungsional menjadi lahan non pertanian sekitar 2.605 Ha per tahun. Melihat tingginya alih fungsi lahan tersebut diperlukan penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, yang melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Saat ini telah terbit Raperda, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Perda ini perlu ditindak lanjuti oleh Bupati/Wakil Bupati dengan menerbitkan Perda turunan tentang Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
10. Dalam upaya membangun kemandirian pangan dalam mengantisipasi melonjaknya harga beras dan pemanasan global, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan membangun Rice/Food Estate di Delta Kayan Bulungan yang memiliki potensi area seluas 50.000 Ha. Pada tahun 2010 telah selesai dibuat Master Plan oleh Pemkab Bulungan dan telah menarik minat PT. Sang Hyang Sri untuk berinvestasi yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Dirut PT. SHS dengan Bupati Bulungan, disaksikan Gubernur pada tanggal 27 September 2010. Lokasi Rice/Food Estate di Kalimantan Timur ada beberapa perusahaan menanamkan investasinya di bidang pertanian diantaranya PT. Sang Hyang Sri (SHS) dan PT. Miwon di Bulungan, PT. Tiga Pilar Group di PPU dan Paser.

Telah dilakukan penanaman perdana sekaligus peresmian Delta Kayan Food Estate oleh Menteri Pertanian RI tanggal 26 September 2011. Kunjungan Kerja Menteri Pertanian di Kabupaten Bulungan Dalam Rangka Launching food estate di Tanjung Buka 26 September 2011 kemudian pada 11 Januari 2012 Menteri BUMN melakukan kunjungan kembali terhadap Food Estate. Kerjasama Antar Daerah Pembangunan Kawasan Transmigrasi Food Estate Delta Kayan Kab. Bulungan Kunjungan Gubernur Kaltim dalam rangka Panen Perdana Padi di Areal PT. Nusa Agro Mandiri (Solaria) desa Salimbatu, Tanjung Palas tengah 12 juni 2012. Luas Lahan yang tersedia di setiap kabupaten kota; berau 62.751 Ha, Bulungan 50.000 ha, Kutai Barat 71.000 ha, Kutai Kertanegara 36.347 ha, Kutai Timur 62.630 ha, Malinau 1.933 ha, Nunukan 46.700 ha, PPU 1.400 ha, Paser 5.500 ha, Tana Tidung 6.200 ha sehingga total 334.461 ha (data per 18 Januari 2012). Investor yang mengajukan permohonan kepada Bupati dan Gubernur, diantaranya PT. SHS, PT Pertanian, PT Pusrit holding, PT Solaria Grou, PT Miwon, PT Berau Jagung raya, PT. Anugrah, PT, Intraco Penta, PT Bangun Desa Pangan, PT Bosowa, PT. Tiga Pilar, PT Harim dan lainnya dengan jumlah total 22 Investor dengan luas lahan ajuan sebesar 550.945 ha.

11. Pada 5 September 2012 dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Food Estate. Kemudian pada tanggal 08–10 Oktober 2012 dilaksanakan Workshop Dalam rangka Kesiapan Permesinan dan Alsintan untuk mendukung program Nasional Rice - Food Estate di Kalimantan Timur oleh Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
12. Sub sektor peternakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari 101.176 ekor sapi di tahun 2009 meningkat menjadi 108.460 ekor di tahun 2010. Tahun 2011 ternak sapi mencapai 98.699 ekor dan tahun 2012 mencapai 104.017 ekor. Populasi babi sebesar 87.568 ekor babi pada tahun 2009 dan tahun 2012 meningkat 12 persen atau 101.483 ekor. Populasi ayam buras pada tahun 2009 sebesar 4.312.760 ekor dan pada tahun 2012



meningkat 38,47% atau 5.972.102 ekor. Untuk populasi ayam petelur pada tahun 2009 sebesar 1.370.150 ekor dan pada tahun 2012 meningkat 2,08% atau sebesar 1.398.593 ekor. Populasi ayam broiler/pedaging pada tahun 2009 sebesar 39.485.000 ekor dan pada tahun 2012 meningkat 3,82% atau sebesar 40.993.380 ekor. Sedangkan populasi itik pada tahun 2009 sebesar 192.959 ekor dan pada tahun 2012 meningkat 20,7% atau sebesar 232.896 ekor.

13. Kegiatan lainnya yang dilakukan pada tahun 2010 adalah pembangunan Puskesmas 2 unit di Kabupaten Paser dan Kutai Barat, pembuatan kios daging 10 unit di Kabupaten Berau, pengadaan peralatan RPU 2 paket di Kabupaten Balikpapan dan Samarinda. Pada tahun 2011 dibangun RPU di Penajam Paser Utara, Paddock di Paser dan Pabrik Pakan Mini di UPTD Api-API Penajam Paser Utara. Pada tahun 2012, dibangun Puskesmas 2 unit di Balikpapan dan Bulungan, sedangkan check point di Nunukan.
14. Telah digalakkan Program Kredit Ternak Sejahtera melalui Bank Kaltim untuk membantu peternak dalam peningkatan skala usaha yang akan merubah usaha sambilan menuju ke usaha peternakan sebagai cabang usaha maupun usaha pokok. Pada tahun 2011 realisasi kredit ternak sejahtera sebesar Rp.7,732 Milyar. Tahun 2012, plafon kredit ternak sejahtera meningkat menjadi 9,7 milyar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu meraih dua penghargaan P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan) Award, yakni penghargaan Citra Produk Berdaya Saing 2012 dan Grand Citra Produk Pertanian Berdaya Saing 2012 pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Dirjen P2HP, Kementerian Pertanian.
15. Produksi perikanan Kalimantan Timur yang bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya umum tahun 2009 sebesar 129.199,7 Ton dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 308.621 Ton atau meningkat sebesar 30,34%. Pada tahun 2011 produksi mencapai 378.830 Ton. Tahun 2012 produksi perikanan mencapai 398.323,4 ton.

16. Produksi perikanan sebagaimana yang disebutkan di atas didukung oleh armada perikanan tangkap laut sebanyak 35.478 unit pada tahun 2008 menjadi 37.151 unit tahun 2009 atau naik sebesar 5,7%, tahun 2010 berjumlah 26.494 unit dan tahun 2011 berjumlah 28.732 unit atau naik 8,45%, tahun 2012 27.518 unit. Armada diperairan umum pada tahun 2008 berjumlah 26.470 unit dan tahun 2009 berjumlah 25.817 unit atau turun sebesar 2,47%, untuk tahun 2010 berjumlah 17.010 unit dan tahun 2011 berjumlah 26.080 unit, tahun 2012 berjumlah tetap 26.080 unit. Luas usaha perikanan dari kegiatan budidaya tambak pada tahun 2009 seluas 89.247 Ha, budidaya kolam seluas 4.262 Ha dan budidaya laut seluas 3.423,9 Ha. Pada tahun 2010 luas usaha budidaya tambak mencapai 175.344 Ha, budidaya kolam seluas 4.838 Ha dan budidaya laut/pantai seluas 4.911 Ha. Tahun 2011 luas usaha budidaya tambak mencapai 152.419 Ha, budidaya kolam seluas 2.129 Ha dan budidaya laut/pantai seluas 6.444 Ha. Sampai tahun 2012 luas usaha budidaya tambak mencapai 152.419 Ha, budidaya kolam seluas 2.129 Ha, dan budidaya laut/pantai seluas 6.444 Ha.

Tabel 4.4 Produksi Perikanan Kalimantan Timur (Ton)

Jenis Perikanan	2008	2009	2010	2011	2012
Perikanan Laut	92.175	94.937	111.702	103.406	105.392,3
Perairan Umum	34.687	34.262	42.108	42.775	42.775,9
Tambak	28.194	32.788	53.236	56.630	48.778,7
Kolam	2.119	1.796	1.911	2.214	2.502,1
Keramba	24.082	31.859	31.669	35.104	32.261,6
Budidaya Laut	5.965	42.945	65.992	138.678	166.600,7

17. Dalam rangka revitalisasi perikanan tangkap akan dikembangkan kapasitas tangkap dari 5 Gross Ton (GT) menjadi 30 GT. Dalam tahun 2011 tersedia 7 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap Pursesaine, tahun 2012 menjadi 9 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap Pursesaine. Perikanan Pembudidaya menyerap tenaga kerja sebanyak 60.901 orang,

sedangkan Perikanan Tangkap menyerap tenaga kerja sebanyak 78.733 orang.

18. Dalam rangka pengembangan Kalimantan Timur sebagai provinsi koperasi, di Kalimantan Timur telah berkembang unit-unit koperasi dari 4.128 unit pada tahun 2009 menjadi 4.578 unit pada tahun 2010 dan 5.128 unit pada tahun 2011. Jumlah anggota tahun 2011 dari 411.426 orang meningkat 5,4% dari jumlah anggota tahun 2010 sejumlah 390.348 orang. Pada Tahun 2012, jumlah koperasi sebanyak 6.141 unit dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 419.661 orang.
19. Dalam bidang usaha kecil dan menengah, Pada tahun 2011 telah dikembangkan 18.368 unit Usaha Mikro 388.886 unit usaha kecil dan 859 unit usaha menengah dengan klasifikasi usaha terdiri dari 316.185 unit usaha industri, 55.028 unit usaha perdagangan. dan 35.900 unit usaha jasa. Pada tahun 2012, telah dikembangkan 20.524 unit usaha mikro 406.006 unit usaha kecil dan 908 unit usaha menengah.
20. Untuk pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Pada tahun 2010 telah di salurkan dana bantuan kredit dari Bankaltim kepada kelompok-kelompok usaha sebesar Rp.1,76 Trilyun yang tersalur kepada 6.290 debitur serta kepada petani dan nelayan melalui program Kredit Sawit Sejahtera sebesar Rp.1,03 Milyar, program Ternak Sejahtera sebesar Rp.3,47 Milyar dan Kredit Perikanan Sejahtera Rp.1,35 Milyar. Tahun 2012 Bankaltim menyalurkan dana sebesar 2,9 Trillyun dari target sebesar 5,1 Trillyun bagi 7.500 debitur untuk kredit pengembangan UMKM dan kredit padi sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera.
21. Capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2011, yaitu mencapai Rp.1.666 Trilyun atau naik 79,24% dari capaian tahun 2010. Pada Tahun 2012 mencapai 2,413 Trilyun. Sejak tahun 2009 KUR sebesar Rp.370,50 Milyar rupiah dan tahun

2010 Rp.929,44 Miliar. Kenaikan ini merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung menunjang peningkatan ekonomi Kalimantan Timur.

22. Sektor kepariwisataan telah dikembangkan beberapa sarana dan prasarana wisata, pengembangan obyek wisata pada tahun 2009 sebanyak 393 obyek wisata, meningkat pada tahun 2012 menjadi 550 obyek wisata. Sedangkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur untuk tahun 2009 sebanyak 1.155.674 orang terdiri dari Wisman 23.768 orang dan Wisnus 1.131.906 orang dengan pendapatan yang bersumber dari Wisnus Rp.393,93 Miliar dan Wisman US\$ 23.77 juta. Pada Tahun 2010 jumlah wisatawan sebanyak 278.591 orang (Wisman 24.410 orang dan Wisnus 1.174.626 orang) dengan pendapatan US\$ 24,41 juta dan Rp.416,92 Miliar atau meningkat 2,7% dari tahun 2009. Pada tahun 2011 kunjungan wisatawan sebanyak 1.303.855 orang (Wisman 25.264 orang) dan Wisnus 1.253.327 orang) dengan pendapatan yang bersumber dari Wisman US\$ 25,264 Juta dan Wisnus Rp.451,19 Miliar. Tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.337.300 orang (Wisman 26.148 orang dan wisnus 1,34 juta orang) dengan pendapatan yang bersumber dari wisman US\$ 26,14 Juta dan wisnus Rp.468 Miliar.
23. Jumlah Sanggar Seni dan Seni Budaya yang terbina mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mencapai 778 Sanggar Seni. Sedangkan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan terus meningkat, tahun 2010 mencapai 36 Buah meningkat di tahun 2011 dan 2012 yaitu mencapai 64 buah.
24. Selain itu, Kepulauan Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai salah satu dari 15 Destinasi Unggulan Destination Management Organization (DMO) di Indonesia bersama dengan Pulau Sabang di Aceh, Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kota Tua Provinsi DKI Jakarta, Borobudur Provinsi Jawa Tengah, Kawasan Bromo-

Tengger-Semeru Provinsi Jawa Timur, Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah, Bunaken Provinsi Sulawesi Utara, Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Raja Ampat Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Bali, hal ini mendorong dalam pembangunan peningkatan pengembangan sarana prasarannya untuk pengelolaan yang lebih baik serta dukungan dari masyarakat. Wujud dari penetapan sebagai salah satu DMO tersebut pada tahun 2013 ini Festival Derawan masuk sebagai salah satu agenda dari rangkaian kegiatan internasional Sail Komodo 2013. Untuk mendukung pengembangan wisata bahari di gugusan Pulau Derawan, pada tahun 2011 sudah mulai dibangun bandara di Pulau Maratua Kabupaten Berau dengan landasan 100 x 1700 m. Pada tahun 2012 dilakukan penyiapan lahan seluas 77,500 m<sup>2</sup> sehingga pada tahun 2013 dapat dilakukan pekerjaan kontruksi agregat untuk runway. Disamping itu juga dikembangkannya Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan dapat beroperasi di tahun 2013 ini.

25. Sektor kehutanan pada tahun 2008 lahan kritis seluas 5.762.225 Ha ditargetkan tahun 2013 turun menjadi 3.402.536 Ha melalui kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan serta program "one man five trees" sebanyak 7.628.145 pohon. Luas lahan kritis pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 5.186.002 Ha menjadi 4.663.352 Ha pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 2.622.681,49 Ha dan tahun 2012 mencapai 2.594.324,27 Ha. Jumlah titik api (hotspot) pada tahun 2008 sebanyak 1.141 titik, menurun menjadi 2.028 titik tahun 2009 dan 1.115 titik tahun 2010. Pada 2011 bertambah menjadi 1.179 titik, karena adanya musim kemarau. Pada tahun 2012 mencapai 1.507 titik.
26. Pelaksanaan program Kalimantan Timur Hijau berupa kegiatan penanaman berbagai jenis tumbuhan pada daerah-daerah lahan kritis, eks tambang dan lokasi lainnya melalui program 1 orang 5 pohon (one man five trees). Pada tahun 2010 telah dilakukan

penanaman di seluruh Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut bantuan subsidi Provinsi ke Kabupaten/Kota yang rata-rata bantuannya sebesar Rp.500 juta per Kabupaten/Kota. Dukungan dari pihak swasta antara lain; PT. Total Indonesia pada tahun 2010 yang berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur telah melakukan penanaman mangrove di kawasan Delta Mahakam sebanyak 10 juta pohon dan BPD Kalimantan Timur menanam 1.000 pohon tahun 2011. Pada tahun 2011 telah dilakukan penanaman sejumlah 21 Juta Pohon. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan penanaman mangrove di Kecamatan Marangkayu sebanyak 20 ribu pohon pada tahun 2009 dan telah dilaksanakan kegiatan pengamanan hutan lindung di Kabupaten Nunukan, hutan lindung Sungai Wain di Kota Balikpapan serta konservasi kawasan hutan lindung. Pada tahun 2008 mangrove mengalami kerusakan berat seluas 329.579 Ha dan terus mengalami perbaikan dengan menanam pohon mangrove dan pemeliharaan, diantaranya Marangkayu dan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanjung Batu Kabupaten Berau, sehingga pada tahun 2011 mengalami penurunan kerusakan seluas 178.202 Ha atau turun 15,05%. Selain mangrove telah dilakukan monitoring Terumbu Karang di lima Kabupaten/Kota, hasil menunjukkan bahwa kondisi mangrove rata-rata berada pada kategori baik; diantaranya Kabupaten/Kota Nunukan, Paser, Bontang, Berau dan Paser Penajam Utara. Kerusakan padang lamun dan terumbu karang salah satu penyebabnya adalah bom ikan dan sedimentasi.

27. Dalam rangka mendukung tekad Pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kita bersama semua elemen masyarakat telah mendeklarasikan program Kaltim Hijau pada Kaltim Summit 2010 pada Tanggal 7 Januari 2010, sebagai komitmen pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (green development).

28. Saat ini Kaltim juga aktif dalam pembangunan demonstration activity (DA) pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD). Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau menjadi dua kabupaten pertama yang terlibat dalam DA-REDD yang akan didukung oleh Pemerintah Jerman (melalui GTZ, KfW) dan TNC. Demonstration Activities (DA) – Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation (REDD) kerjasama Pemerintah Indonesia-Jerman di Kaltim, merupakan bagian dari Forests and Climate Change Program (FORCLIME), yang terbagi kedalam dua fase, yaitu mendukung kegiatan readiness dan investasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Malinau dan Berau.
29. Kalimantan Timur juga mencanangkan Program OMFIT (One Man Five Trees) hingga tahun November 2012 telah berhasil menanam pohon sebanyak 28.155.547 pohon.
30. Kalimantan Timur berkomitmen untuk beralih ke jalur pembangunan berbasis perubahan iklim. Bagi Provinsi yang sedang mengembangkan perekonomian seperti Kaltim, tidak akan memilih opsi menurunkan emisi jika hal ini akan menahan pertumbuhan ekonomi, dan oleh karena itu strategi yang dipilih adalah pembangunan ekonomi dan mitigasi CO2 dapat dikuatkan secara bersama sama. Strategi tersebut dituangkan dalam dokumen strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi.
31. Kalimantan Timur telah memiliki 3 dokumen Strategi dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yaitu :
  - a. Dokumen Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
  - b. Dokumen Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah di legalkan berdasarkan keputusan Gubernur No. 54 Tahun 2012.
  - c. Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD + (SRAP REDD)
32. Pada Januari 2011, Kaltim telah membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) di tingkat Provinsi. DDPI ini mewadahi,

mengkoordinasikan dan mendukung semua hal yang berhubungan dengan inisiatif perubahan iklim. Semua kelompok kerja yang berkaitan dengan REDD, digabung sebagai subkomite dan sektor swasta, serta LSM juga berpartisipasi melalui dewan penasehat teknis. Para Bupati/Walikota mendampingi steering committee, dan memberi laporan secara langsung kepada Gubernur.

33. Penilaian kinerja perusahaan Industri dan Jasa (proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah dilakukan penilaian 28 perusahaan industri dan jasa pada tahun 2009, dengan perolehan 1 emas, 9 hijau, 13 biru dan 5 merah. Tahun 2010 penilaian terhadap 34 perusahaan industri dan jasa dengan perolehan 1 emas, 10 hijau, 16 biru, 6 merah dan 1 hitam. Pada tahun 2011 sebanyak 33 perusahaan industri dan jasa dengan perolehan 2 emas, 10 hijau, 19 biru dan 2 merah. Tahun 2012 telah dilakukan penilaian 35 Perusahaan industri dan jasa serta migas dengan perolehan 2 emas, 11 hijau, 21 biru, 1 merah.
34. Sedangkan perusahaan pertambangan batubara (proper) tahun 2009 telah dilakukan penilaian 24 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 12 hijau, dan 10 biru. Tahun 2010 telah dilakukan penilaian 34 perusahaan, dengan perolehan 1 emas, 12 hijau, 16 biru dan 5 merah. Tahun 2011 penilaian 37 perusahaan, dengan perolehan 2 emas, 17 hijau, 14 biru dan 4 merah. Tahun 2012 penilaian 67 perusahaan, dengan perolehan 2 emas, 26 hijau, 24 biru dan 15 merah.
35. Untuk penilaian kinerja perusahaan HPHTI/IUPHHK-KT, telah dilakukan penilaian 24 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 5 hijau, 18 biru dan 1 merah. Pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 23 perusahaan dengan perolehan 8 hijau, 14 biru dan 1 merah. Tahun 2011, 32 perusahaan dengan perolehan 8 hijau dan 22 biru dan 2 hitam. Tahun 2012 Perusahaan yang dinilai 33 dengan perolehan 1 emas, 9 hijau, 22 biru dan 1 merah.



36. Pekan Lingkungan Indonesia, pada tahun 2009, Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Lingkungan Hidup peringkat pertama, tahun 2010 juara I dan tahun 2011 sukses menjadi juara I dan pada bulan juni 2012 menjadi juara umum.
37. Ekspor ke luar negeri Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar US\$ 37,97 Milyar mengalami kenaikan sebesar 51,15% dibanding tahun 2010 sebesar US\$ 25,12 Milyar dan pada tahun 2009 sebesar US\$ 18,92 Milyar. Kenaikan ekspor tahun 2011 disebabkan oleh naiknya ekspor migas sebesar 64,84% yakni dari US\$ 11,32 Milyar menjadi US\$ 18,66 Milyar. Sementara ekspor non migas juga mengalami peningkatan sebesar 40% dari US\$ 13,80 Milyar menjadi US\$ 19,32 Milyar. Ekspor Kalimantan Timur tahun 2012 sebesar US\$ 33,79 Milyar terdiri dari Ekspor Migas sebesar US\$ 15,00 Milyar dan Non Migas sebesar US\$ 18,79 Milyar. Penurunan ekspor ini terutama disebabkan turunnya harga dan lesunya permintaan batubara
38. Ekspor ke luar negeri Kalimantan Timur dengan Negara tujuan Jepang pada tahun 2012 adalah yang tertinggi mencapai US\$ 9,39 Milyar atau sebesar 27,79% dari total seluruh ekspor Provinsi Kalimantan Timur. Negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah China termasuk Taiwan dengan nilai ekspor mencapai US\$ 9,03 Milyar atau 26,74% dan selanjutnya Republic Korea Selatan dengan nilai ekspor US\$ 5,16 Milyar atau 15,26%. Sehingga nilai ekspor ketiga Negara ini mencapai 69,78% dari total ekspor Kalimantan Timur.
39. Sementara itu, realisasi impor ke luar negeri tahun 2012 mencapai US\$ 8,14 Milyar yaitu dengan migas sebesar US\$ 5,34 Milyar dan non migas sebesar US\$ 2,81 Milyar yang berasal dari negara Asia, seperti Aljermania senilai US\$ 1,12 Milyar atau 13,72%, Nigeria US\$ 1,10 Milyar atau 13,53%, Singapura US\$ 1,01 Milyar atau 12,46%.
40. Dengan memperhatikan besaran ekspor impor, tahun 2011 Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan

sebesar US\$ 30,76 Milyar dan pada tahun 2012 juga mengalami surplus sebesar US\$ 25,65 Milyar.

Tabel 4.5 Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Timur (Juta US\$)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Ekspor	24.700	18.922	25.116	37.974	33.792
a. Migas	17.025	9.290	11.319	18.655	14.999
b. Non Migas	7.674	9.632	13.797	19.318	18.793
Impor	5.232	4.884	6.296	7.216	8.143
a. Migas	3.477	3.241	4.522	5.084	5.338
b. Non Migas	1.775	1.643	1.746	2.132	2.805
Net Ekspor (surplus)	19.467	14.038	18.847	30.757	25.649
a. Migas	13.548	6.049	6.796	13.571	9.661
b. Non Migas	5.919	7.988	12.051	17.185	15.988

41. Cluster industri yang berbasis gas dan kondensat, terutama produk petrokimia yang terletak di kawasan industri Bontang dengan produk kimia berupa urea, amoniak, soda ash dan methanol. Sedang yang dalam proses penyelesaian proyek pembangunannya adalah ammonium nitrat. Selain itu, telah dilakukan penambahan kapasitas produksi urea dengan pembangunan pabrik urea unit 5, yang saat ini telah mencapai 30%.
42. Batubara menjadi primadona Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai cadangan sampai tahun 2012 sebesar 9,2 Milyar Ton, produksi tahun 2009 sebesar 144,464 Juta Ton, tahun 2010 sebesar 178,450 Juta Ton atau naik 14,19% dan tahun 2011 produksi sebesar 208,066 Juta Ton atau naik 45,64%, dan produksi pada tahun 2012 sebesar 220 juta ton. Jumlah produksi tersebut terdiri dari 33 ijin PKP2B., Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.384 atau total ijin di Kalimantan Timur sebanyak 1.417 ijin.
43. Penerimaan negara dari royalty batubara di Kalimantan Timur tahun 2009 Rp.680,219 Milyar, tahun 2010 Rp. 692,305 Milyar, tahun 2011 Rp.1,017 Trilyun, Dan tahun 2012 Rp. 1,251 Triliun. Dan iuran tetap Tahun 2009 sebesar Rp. 4.017 Milyar, tahun

2010 sebesar Rp. 4,253 Milyar, tahun 2011 sebesar Rp.8,362 Milyar, dan tahun 2012 sebesar Rp.8,423 Milyar.

44. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk migas dan Gas Metana Batu Bara terdapat 79 WKP, yang terdiri dari 33 WKP status eksploitasi, pada tahun 2009 produksi minyak bumi sebesar 56,15 juta barrel, tahun 2010 sebesar 56,79 juta barrel relatif stabil, tahun 2011 sebesar 53,02 juta barrel atau sedikit menurun dari tahun 2010 yang disebabkan menurunnya produksi sumur-sumur tua. Tahun 2012 tercatat produksi minyak mentah di Kaltim sebesar 47,44 juta barel, target produksi minyak bumi tahun 2013 sebesar 44 juta barrel. Produksi gas bumi tahun 2009 sebesar 1.048 juta MMBTU, tahun 2010 sebesar 1.045 Juta MMBTU sedangkan untuk tahun 2011 sebesar 911 Juta MMBTU dengan beroperasinya proyek South Mahakam 1 dan 2 akan beroperasi untuk meningkatkan produksi gas alam meningkat. Tahun 2012 produksi gas bumi di Kaltim sebesar 822 juta MMBTU, target produksi gas bumi tahun 2013 sebesar 760 juta MMBTU.
45. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009, telah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg ke rumah tangga dan usaha kecil, yang sebelumnya dilakukan sosialisasi bersama SKPD terkait dan PT. Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, sampai tahun 2011 telah terealisasi sebesar 82,02%, dan untuk tahun 2012 terealisasi 98,05% dengan ini ditargetkan pada tahun 2013 mencapai 100%.
46. Capaian hasil pembangunan bidang ketenagalistrikan tahun 2011 untuk pembangkit listrik oleh PT.PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2009 daya terpasang sebesar 561,34 MW, daya mampu sebesar 402,43 MW dengan beban puncak 448,8 MW, tahun 2010 daya terpasang sebesar 622,57 MW, daya mampu sebesar 478,35 MW, beban puncak sebesar 447,8 MW , tahun 2011 daya terpasang menjadi 652,18 MW atau naik 4,76%, mampu menjadi 488,31 MW atau naik 2,08%, beban puncak menjadi 458,8 MW atau naik 2,45%. Tahun 2012 daya terpasang 665,8 MW atau naik 2,09%, daya mampu 494,5 MW atau naik 1,27%, beban puncak 464,3 MW

atau naik 1,20%. Sedangkan tahun 2009 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.567,48 Kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 5.432,28 Kms, tahun 2010 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.715,36 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 5.570,01 kms, tahun 2011 untuk JTM menjadi sepanjang 4.727,08 Kms atau naik 0,25%, JTR menjadi sepanjang 4.915,74 Kms atau turun 11,75%. Tahun 2012 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.751,31 kms, JTR sepanjang 4.976,67 kms.

47. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) tahun 2009 terpasang 7 unit, hingga tahun 2012 terpasang 9 unit, ada penambahan 2 unit, sedangkan pembangkit listrik tenaga biogas tahun 2009 sebanyak 1 unit, tahun 2010 menjadi 7 unit, tahun 2011 menjadi 11 unit, tahun 2012 menjadi 12 unit. PLTS tahun 2009 terpasang 22.867 unit di 415 desa, PLTS Tahun 2010 terpasang 23.466 unit di 468 desa, tahun 2011 terpasang 24.300 unit yang tersebar 469 desa dan tahun 2012 terpasang 24.798 unit yang tersebar 512 desa. Rasio rumah tangga berlistrik/rasio elektrifikasi (RE) tahun 2009 sebesar 61,75%, tahun 2010 sebesar 63,90%, tahun 2011 sebesar 64,13% dan tahun 2012 sebesar 65,72% atau naik 1,59% dari tahun 2011.
48. Jika cadangan tenaga listrik seharusnya 35% dari beban puncak maka total daya listrik menjadi 950 MW hingga tahun 2013. Untuk mengatasi persoalan kekurangan kelistrikan di Kalimantan Timur, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain : pembangunan PLTU 2x110 MW bekerjasama dengan PLN yang telah di-ground breaking oleh Bapak Gubernur pada tanggal 25 Maret 2011 dan progress pembangunannya 2012 mencapai 55,92%. PLTU Gunung Bayan 2x15 MW kerjasama dengan Perusda Balikpapan dengan PT. Gunung Bayan di Kariangau yang telah dilaksanakan topping out oleh Bapak Gubernur pada tanggal 12 Januari 2012 dan progress pembangunannya 2012 mencapai 70%. PLTG Peaking PLN 2 x 50 MW progress pembangunannya

2012 mencapai 84,34%, PLTG Senipah 2 x 41 MW yang telah di-ground breaking oleh Bapak Gubernur pada tanggal 21 November 2011 dan progress pembangunannya 2012 mencapai 85%. PLTU Cahaya Fajar Kalimantan Timur (CFK) 1 x 50 MW, progress pembangunannya 2012 mencapai 30%.

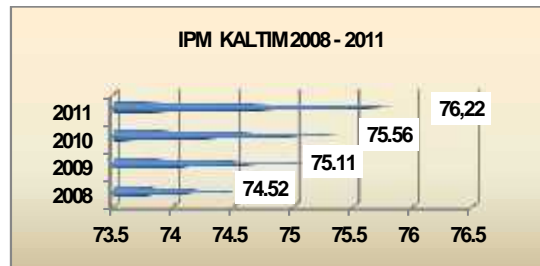
49. Pada tanggal 22 November 2011 Pemerintah Provinsi mendapatkan Juara Pertama dalam Kompetisi Usaha Energi Baru dan Terbarukan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pembangunan Instalasi Biogas Untuk Kelistrikan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur yang dibangun pada tahun 2008-2010.
50. Pada Tanggal 12 September 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan dari ASEAN Centre For Energy di Kamboja sebagai Runner-Up untuk Category Off-Grid pada ASEAN Renewable Energy Project Competition 2012 "The Development of Biogas Power Plant in Bukit Harapan Village Kutai Timur District East Kalimantan".

#### AGENDA TIGA, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

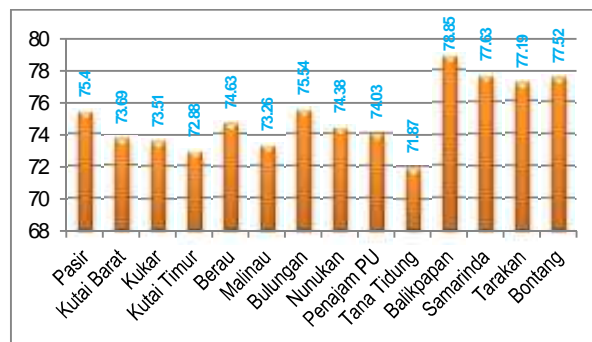
Disamping pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Pembangunan SDM dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Capaian pembangunan sumber daya manusia diindikasikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kalimantan Timur dari 74,52 pada tahun 2008 menjadi 75,11 pada tahun 2009, begitu pula pada Tahun 2010 mencapai 75,56%, pada tahun 2011 IPM Kalimantan Timur Mencapai 76,22 dan IPM Kaltim telah melampaui rata-rata Nasional yang baru mencapai nilai 72,77 dan Kaltim menempati rangking

5 (lima). Sebagian besar Kabupaten/Kota nilai IPM telah di atas rata-rata nasional.

Grafik 4.3 Perkembangan IPM Kalimantan Timur



Grafik 4.4 IPM Kab/kota Kalimantan Timur 2011



Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pendidikan tahun ketiga RPJMD 2009-2013 diantaranya:

Program "KALTIM CEMERLANG" (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) dan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan upaya pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan 20%, alokasi dana fungsi pendidikan mengalami peningkatan dari Rp. 798,98 Milyar pada Tahun 2008 menjadi Rp 1,630 Trilyun Tahun 2012. Melalui Alokasi dana tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami fluktuatif, dimana untuk jenjang pendidikan SD/MI dari 110,38 % tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 104,83% tahun 2011. Sementara untuk APK SLTP/MTs dari 88,61% tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 97,62% tahun 2011 sedangkan APK SLTA/MA mengalami penurunan kembali dari 76,38% tahun 2009 menjadi 73,00% tahun 2011.

Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/Mi juga mengalami penurunan dimana tahun 2009 mencapai 93,74% dan tahun 2011 menjadi 92,23%. Kemudian untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs mengalami peningkatan dari 72,06% pada tahun 2009 menjadi 72,40% pada tahun 2011. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMU/MA angka partisipasi murni mengalami peningkatan dari 53,10% tahun 2009 dan tahun 2011 menjadi 54,58%. Kemudian untuk melek huruf penduduk usia 10 tahun keatas di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 mencapai 97,18 % dan pada tahun 2011 menjadi 97,26%.

Tabel 4.6 Indikator Pendidikan Kalimantan Timur (Persen)

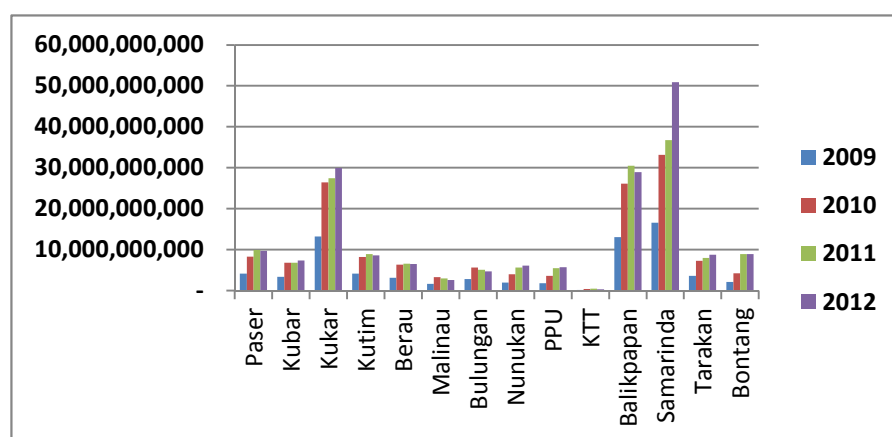
Uraian	2008	2009	2010	2011
<b>Angka Melek Huruf (AMH)</b>	96,71	97,18	97,36	97,26
Angka Partisipasi Kasar (APK)				
a. SD	110,95	110,38	113,85	104,83
b. SLTP/MTs	87,53	88,61	90,86	97,62
c. SLTA/MA	69,89	76,38	72,38	73,00
Angka Partisipasi Murni (APM)				
a. SD	93,59	97,34	94,14	92,23
b. SLTP	71,19	72,06	72,56	72,40
c. SLTA	53,94	53,10	53,66	54,58

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Melalui pendidikan Pemerintah Provinsi dari tahun ke tahun secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pendidikan antara lain melalui (1) Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tahun 2010 sebanyak 24 RSBI dan tahun 2011 menjadi 29 RSBI, tahun 2012 menjadi 44 RSBI. (2) Penambahan penghasilan Guru (insentif), dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru di semua jenjang pendidikan baik Negeri maupun Swasta dengan alokasi dana Rp.233,535 Milyar tahun 2011 dan meningkat pada tahun 2012 Rp. 234,989 Milyar dengan jumlah guru 61.734 orang; (3) BOSDA, diarahkan untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah menengah atas dan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebanyak Rp.144,076 Milyar tahun 2010 untuk siswa SMA/MA/Kejuruan sebanyak 115.261 siswa dan terus meningkat

menjadi Rp.163,605 Milyar tahun 2011 sebanyak 130.884 siswa serta tahun 2012 menjadi 179,338 Milyar sebanyak 133.500 siswa; (4) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru ke jenjang S1/D IV, kualifikasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sampai pada tahun 2012 sebesar 51,99% (5) PAUD diarahkan untuk menitikberatkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia dini agar mempunyai kemampuan bermasyarakat, beragama serta kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk bantuan Tutor PAUD sebesar Rp.19,256 Milyar dan pada tahun 2012 alokasi dana bantuan Tutor PAUD meningkat menjadi sebesar Rp.25,704 Milyar.

Grafik 4.5 Bosda Tahun 2009-2012



Pemerintah Provinsi juga tetap memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan, karena pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan bermutu. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling karena ketiga fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Perkembangan fasilitas penunjang kesehatan di Kalimantan Timur menunjukkan adanya indikasi semakin membaik, khususnya perkembangan sarana Puskesmas. Pada tahun 2012 Puskesmas di Kalimantan Timur tercatat 1.263 unit, yang terdiri dari Puskesmas Induk sebanyak



224 unit, diantaranya merupakan Puskesmas 24 jam sebanyak 130 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 716 unit serta Puskesmas Keliling sebanyak 323 unit. Disamping ketersediaan Puskesmas, jumlah rumah sakit di Kalimantan Timur pada tahun 2012 48 unit yang terdiri dari rumah sakit umum daerah 18 unit, rumah sakit swasta 12 unit, rumah sakit TNI 4 unit dan rumah sakit BUMN 2 unit dan rumah sakit khusus 12 unit, semakin berkembang dalam membenahi dan melengkapi fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut.

Tabel 4.7 Sarana Kesehatan di Kaltim Tahun 2008-2012

No.	Sarana Kesehatan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Posyandu	4.405	4.481	4.671	4.671	4.761
2	Polindes	338	339	269	272	330
3	Puskesmas	1.678	1.153	1.139	1.245	1.259
	- Induk	208	208	214	217	220
	- Pembantu	660	735	716	716	716
	- Keliling	210	210	209	312	323

Sumber : Dinkes Prov Kaltim

Peningkatan jumlah sarana kesehatan tersebut ternyata juga diimbangi dengan penambahan jumlah para tenaga medis yang tersebar diseluruh kawasan daerah Kalimantan Timur. Ketersediaan tenaga medis dimana Kalimantan Timur pada tahun 2012, yang meliputi Dokter Umum sebanyak 1012 orang, dokter spesialis sebanyak 357 orang, dokter gigi sebanyak 323 orang dan bidan sebanyak 1659 orang serta perawat sebanyak 5.777 orang. Disamping itu para tenaga ahli kesehatan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan tenaga medis.

Perubahan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit serta jumlah tenaga kesehatan ini ditunjukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan, agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Diharapkan dengan penyuluhan ini penularan penyakit seperti diptheria, muntaber, kolera dan demam berdarah sebagai akibat dari sanitasi lingkungan yang kurang baik dan buruk serta kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat dicegah.

Tabel 4.8 Tenaga Kesehatan di Kaltim, Tahun 2008 - 2012

No.	Tenaga Kesehatan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Dokter Umum	786	786	791	795	1012
2	Dokter Spesialis	288	292	295	302	357
3	Dokter Gigi	246	237	252	253	323
4	Perawat	4.945	4.956	4.960	5.619	5.777
5	Bidan	1.339	1.339	1.442	1.629	1.659
6	Apoteker	135	136	136	137	226
7	Ahli Gizi	244	231	231	257	283
8	Ahli Rontgen	120	16	18	18	96

Sumber : Dinkes Prov Kaltim (Data Tahun 2012 Sampai Bulan Agustus)

Demikian pula dengan prevalensi Balita Kurang Gizi di Kalimantan Timur semakin menurun dari 19,3 % pada tahun 2009 menjadi 12,7 % pada tahun 2010.

Tabel 4.9 Angka Harapan Hidup dan Tempat Berobat Tahun 2008-2011 (persen)

	2008	2009	2010	2011
Angka Harapan Hidup (tahun)	7,80	71,00	71,20	71,40
Tempat Berobat (%)				
a. Rumah Sakit	13,85	20,85	15,70	17,58
b. Praktek Dokter	28,76	33,27	32,47	30,97
c. Puskesmas	41,64	35,83	43,01	43,05
d. Petugas Kesehatan	13,51	8,83	6,99	6,31
e. Pengobatan Tradisional	2,24	1,21	1,83	2,09

Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Alokasi anggaran kesehatan melalui APBD Provinsi terus meningkat, tahun 2009 sebesar 8,56%, tahun 2010 mencapai 13,84%, tahun 2011 sebesar 10,81% dan tahun 2012 mencapai 9% dari total APBD, memenuhi amanah UU 36 Tahun 2009. Walaupun demikian masih terdapat permasalahan. Prevalensi penyakit malaria yang disebabkan kondisi geografis Kalimantan Timur dengan kawasan hutan yang luas yang merupakan daerah endemi malaria, prevalensinya 2,12% pada tahun 2010, namun menurun pada tahun 2011 menjadi 1,75% dan tahun 2012 kembali menurun hingga 1,3% dan masih berada di bawah rata-rata nasional (5/1000 penduduk). Prevalensi HIV/AIDS 1,10% pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 sebesar 0,12%, dimana angka masih berada diatas rata-rata nasional 0,2% juga merupakan masalah serius yang dihadapi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan tenaga medis, dimana rasio dokter dan rasio bidan masih jauh dari rata-rata rasio nasional. Rasio dokter sebesar 28 sedangkan rasio bidan sebesar 60.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tahun 2012 dialokasikan dana bantuan keuangan puskesmas 24 jam sebesar Rp.34 Milyar yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.

Dibidang penanggulangan kemiskinan, Program di Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur selalu menunjukkan presentase yang menurun. Menurut data Sakernas Agustus 2010 TPT tercatat 10,10% lebih rendah dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009 tercatat 10,83 %. Sedangkan pada Agustus tahun 2011 menjadi 9,84%, dan Agustus 2012 tercatat 8,90%.

Grafik 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012



Untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan peluang kesempatan kerja disektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) hal ini terlihat disubsektor Perkebunan dengan menyerap Tenaga Kerja tahun 2008 sebanyak 324.137 orang, tahun 2009 sebanyak 344.671 orang, tahun 2010 sebanyak 374.312 orang, pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 447.402 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 488.634 orang yang bekerja pada perkebunan karet, kelapa dalam, kelapa sawit, lada, kopi dan komoditi lainnya. Sejalan dengan peningkatan potensi peluang kesempatan kerja tersebut. Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja dan berusaha maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja

(BLK) di Bontang, Kutai Barat dan Berau serta Revitalisasi BLKI Balikpapan dan Nunukan, disamping itu pada tahun 2012 telah dioperasikannya Bursa Kerja On Line ( BKOL ) untuk memfasilitasi kepentingan antara Pencari Kerja dengan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja secara Elektronik melalui Website [www.infokerja-kaltim.com](http://www.infokerja-kaltim.com) serta pelaksanaan Pelatihan keterampilan kerja di BLKI/PPD/LPKS sebanyak 2.486 orang, Penghargaan Produktivitas Sidhakarya terhadap 6 UKM dan Pembentukan Desa Produktif sebanyak 4 desa @ 15 Orang. Bidang transmigrasi tahun 2012 telah ditempatkan warga transmigrasi sebanyak 350 KK/1.307 jiwa lokasi SP5 dan SP8 Tanjung Buka Kab.Bulungan.

Melalui program-program PRO RAKYAT, khususnya program-program pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin 286.400 orang (9,51%), tahun 2009 turun menjadi 239.220 orang (7,73%), pada tahun 2010 berjumlah 243.000 orang (7,66%) dan kemudian pada maret 2011 sebesar 247.900 (6,77%) dan pada Maret 2012 sebesar 253.340 (6,68%) yang berarti terdapat penurunan persentasi jumlah penduduk miskin dari tahun 2008 sebesar 2,83%. Dengan demikian selama empat tahun ini, terdapat 31.100 orang yang keluar dari kemiskinan. Walaupun jumlah penduduk miskin turun signifikan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, dilihat menurut Kabupaten/Kota, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi kabupaten adalah masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 4.10 Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kaltim 2008-2012

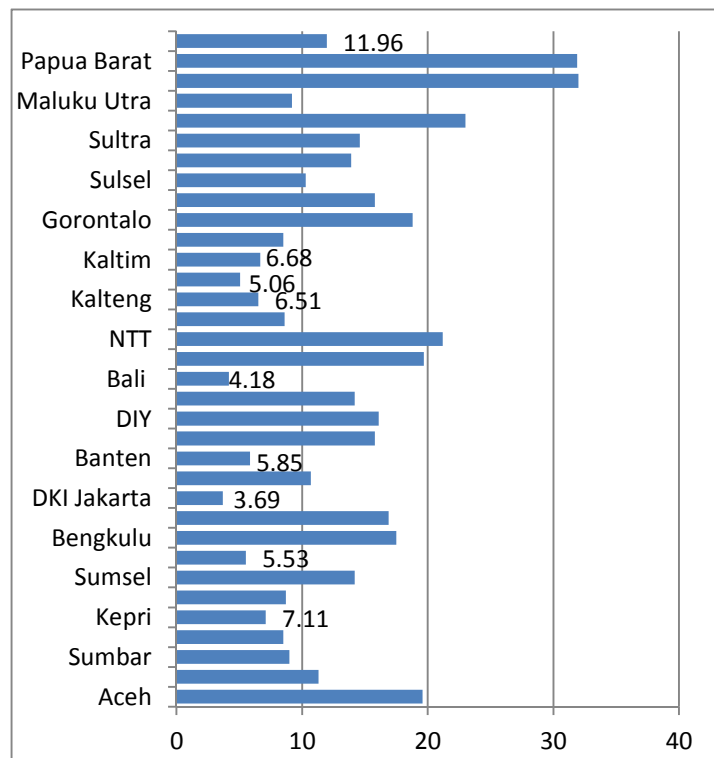
Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
<b>PendudukBekerja (orang)</b>	1.259.587	1.302.772	1.481.898	1.591.003	1.619.118
<b>Penduduk Penganggu (orang)</b>	157.376	158.224	166.557	173.693	158.263
<b>TPAK (%)</b>	64,31	64,41	66,41	68,51	66,64
<b>TPT (%)</b>	11,11	10,45	10,10	9,84	8,90

<b>Penduduk Miskin (orang)</b>	259.450	245.050	243.000	247.900	253.340
<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	9,51	7,73	7,66	6,77	6,68

Grafik 4.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur 2011



Grafik 4.8 Tingkat Kemiskinan Provinsi Se-Indonesia 2012



Dalam upaya peningkatan kesehatan bagi keluarga miskin, disamping pemberian Jamkesmas melalui APBD Provinsi pada tahun 2012 dialokasikan dana Jamkesda sebesar Rp. 20 Milyar.

Selain itu upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya :

1. Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga seperti :
  - a. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui KUBE, dari target sebesar 1.650 KK, terealisasi sebesar 2.010 KK lebih tinggi 22% dari target yang telah ditetapkan.
  - b. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui PKH dari target sebesar 4.530 RTSM terealisasi sebesar 3.947 RTSM (87,13%).
  - c. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni, dari target sebesar 100 KK, terealisasi sebesar 140 KK (140%).
2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak :
  - a. Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar, dari target sebesar 3.400 anak, tercapai hanya sebesar 3.007 anak (88,44%).
  - b. Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan, dari target sebesar 140 anak terealisasi sebesar 213 anak (152,14%).
3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial kepada wanita bermasalah sosial/wanita korban tindak kekerasan, dari target sebesar 30 orang terealisasi sebesar 103 orang (343,33%).
4. Pemberdayaan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil, dari target 100 KK terealisasi sebesar 162 KK (162%).

Selain itu untuk pengentasan kemiskinan dilakukan juga upaya yaitu pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis potensi unggulan daerah di Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Tarakan; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan); PNPM-Mandiri Perkotaan, Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota; fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan pengembangan

kawasan pemukiman; jalan dan jembatan di wilayah perbatasan; bantuan permodalan bagi UMKM; modal usaha dan saprodi bagi usaha tani, perkebunan rakyat, nelayan dan peternak; fasilitasi bantuan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Tahun 2008 alokasi dana untuk PNPM-Mandiri Perdesaan mencapai Rp. 87 Milyar dimana bersumber melalui APBD Provinsi dan APBN, Tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 92,900 Milyar dan Tahun 2010 mencapai Rp.202,425 Milyar. Tahun 2011 sebesar Rp.174,435 Milyar dan Tahun 2012 mencapai 191,265 Milyar.

## B. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Program dan kegiatan prioritas urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2012, adalah :

### I. Urusan Pendidikan, dengan SKPD pelaksana :

#### Dinas Pendidikan

#### 1. Program dan kegiatan :

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2012 menetapkan 24 program dan 124 kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dan merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan yang nyata, program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

#### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2012 Anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 310.468.793.000,- Setelah perubahan menjadi Rp. 407.325.793.000,- dengan capaian kinerja 87,64 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - a. Telah dilaksanakannya pembangunan 2 Unit Pembangunan TK Provinsi di Kota Samarinda dan Tenggarong.
  - b. Telah disalurkan bantuan insentif tutor PAUD ke 14 Kabupaten Kota se Kalimantan Timur.
- 2) Program Wajib Belajar 9 Tahun
  - a. Telah dibangun laboratorium untuk Sekolah Dasar sebanyak 2 Unit di Kota Bontang dan Penyelesaian Rehab sekolah 1 unit di Kota Balikpapan dan Finishing SLB di Kabupaten Pasir.
  - b. Telah dilaksanakan pengadaan peraga IPS sebanyak 240 Set untuk 120 Sekolah Dasar dan IPA sebanyak 20 Set untuk Sekolah Dasar yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota.
  - c. Telah dilakukan lomba-lomba pertandingan kreatifitas siswa tingkat SMP kepada 7.000 siswa se Kalimantan Timur.
  - d. Telah didistribusikan buku-buku bahan ajar SD lima mata pelajaran sebanyak 60.000 siswa di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat.
  - e. Telah didistribusikan buku perpustakaan, kamus, buku lalu lintas sebanyak 333.900 eks dan buku BSE sebanyak 287.600 eks ke Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat.
  - f. Telah didistribusikan buku peraga pembelajaran Al-Qur'an ke 14 Kabupaten Kota se Kalimantan Timur.
- 3) Program Pendidikan Menengah
  - a. Tersalurnya beasiswa berprestasi kepada 60 siswa pasiat, 15 siswa di Turki, dan 420 siswa SMA Negeri 10 Samarinda selama 1 tahun.
  - b. Telah dilakukan lomba-lomba pertandingan tingkat SMP kepada 7.000 siswa se Kalimantan Timur.



- c. Telah dilakukan lomba-lomba pembinaan minat, bakat serta kreatifitas siswa berupa pertandingan tingkat SMA kepada 3.628 siswa se Kalimantan Timur.
  - d. Telah dilakukan lomba keterampilan siswa SMK kepada 210 siswa tingkat provinsi dan telah dilaksanakannya Liga Pelajar Indonesia dengan peserta 8.400 orang.
  - e. Telah dibuat Detail Engineering Desaign (DED) Education Centre di Kota Samarinda.
  - f. Telah dibangun ruang kelas baru untuk SMA dan SMK sebanyak 20 ruangan untuk Kabupaten Bulungan, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - g. Telah dilakukan pembangunan Sekolah Terpadu sebanyak 3 unit di Kabupaten Nunukan, Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan.
  - h. Telah dibangun ruang kelas baru sebanyak 6 ruangan untuk SMK Unggulan di Kota Samarinda.
  - i. Telah dilakukan pembangunan MTs dan MAN di Kota Balikpapan, Kabupaten Bulungan dan Tarakan.
  - j. Telah dibangun Asrama Siswa Mutiara Bangsa di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
  - k. Telah dilaksanakan pengadaan alat praktek dan peraga siswa sebanyak 6 jenis sebanyak 25 set untuk 62 sekolah.
- 4) Program Pendidikan Non Formal
- a. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.
  - b. Pengembangan Pendidikan keaksaraan.
  - c. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
  - d. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal.
  - e. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.

- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
  - a. Telah dilaksanakan pelatihan bagi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 5 mata pelajaran.
  - b. Telah dilaksanakan peningkatan kualifikasi ke S1/D4/S2 sebanyak 3.453 guru.
  - c. Telah didistribusikan sebanyak 500 laptop untuk guru.
- 6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Telah disalurkan melalui beasiswa Kaltim Cemerlang kepada 10.751 siswa dan mahasiswa se Kalimantan Timur dalam dan luar daerah.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Semua dana yang sifatnya bantuan harus melalui Biro Sosial berdasarkan Permendagri Nomor : 30 Tahun 2007, padahal sudah tercantum pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Prov. Kaltim sehingga tidak dapat direalisasikan.
- b. Terbatasnya waktu pelaksanaan karena terlambatnya pengesahan SK dan DPA-SKPD
- c. Dana merupakan hasil dari sisa tender pengadaan barang dan jasa serta efisiensi penggunaan dana yang tidak mempengaruhi pencapaian realisasi fisik.
- d. Ada beberapa program yang telah dianggarkan APBN namun telah diusulkan pada anggaran APBD sehingga tidak dilaksanakan lagi.

Solusi :

- a. Diharapkan dana persediaan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim cukup tersedia.
- b. SK maupun pengesahan DPA-SKPD diharapkan terbit pada awal Januari tahun yang sedang berjalan.

## II. Urusan Kesehatan, dengan SKPD Pelaksana :

### a. Dinas Kesehatan, dengan :

#### 1. Program dan kegiatan :

Untuk mendukung kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 44 program dan 178 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

#### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD. Pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp.74.586.655.000,- setelah perubahan menjadi Rp.95.993.625.000,- dengan capaian kinerja 73,00 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

#### 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Revitalisasi Sistem Kesehatan, melalui kegiatan Pertemuan monitoring puskesmas 24 jam, Pelatihan pelayanan mutu puskesmas 24 jam, Pembinaan puskesmas 24 jam, UGD, PONED dan pelayanan spesialis, Rapat koordinasi pelayanan puskesmas 24 jam.
- b. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, melalui kegiatan Sosialisasi kebijakan pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan dasar.
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan Lomba Balita Sehat, Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP), Kemitraan bidan dan dukun, Pelacakan kasus kematian ibu di puskesmas, Advokasi dan sosialisasi kesehatan jiwa masyarakat, Pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, Penjaringan kesehatan anak sekolah, Orientasi pedoman buku KIA Balita, Penggerakan puskesmas santun Usia, Sosialisasi uji kompetensi injeksi vit.K dan topi verbal Balita, serta pertemuan koordinasi OBGYNs.
- d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, melalui pertemuan

- workshop Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Pertemuan perencanaan program pelayanan kesehatan khusus, Bimbingan teknis dan konsultasi program pelayanan kesehatan, Kegiatan Sosek Malindo bidang kesehatan.
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui Pertemuan monitoring evaluasi program pelayanan kesehatan khusus, Pertemuan monev dan perencanaan yankes gakin, daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar, Monev pelayanan kesehatan laboratorium, Pemantauan pasca pelatihan MTBS, SDIDTKA, Afeksia dan BBLR, serta Monev P4K ke kab/kota.
  - f. Pembinaan teknis dan pelayanan kesehatan indera oleh UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat.
  - g. Pembinaan teknis dan pelayanan laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, Pengembangan dan penerapan standar pelayanan kesehatan di RS
  - b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan melalui Lokakarya akreditasi RS, Pertemuan evaluasi standar pelayanan kesehatan di DTPK, Rakor akreditasi sarana kesehatan, Pelatihan pengembangan Puskesmas Poned, Pelatihan pengembangan RS Ponek, Pelatihan GELS, Pelatihan asesor tenaga kesehatan, Workshop MTKP, Sosialisasi akreditasi laboratorium, Sosialisasi NSPK, Workshop kesehatan ibu dan anak, Pertemuan pengembangan regulasi tenaga kesehatan, Penilaian tenaga kesehatan teladan, dan Pengumpulan data kesehatan ibu dan anak.
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui kegiatan Monev standarisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.

- 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, melalui kegiatan Pemantauan/ monitoring kegiatan fogging fokus
  - b. Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging (larvasida)
  - c. Pengadaan vaksin penyakit menular (vaksin anti rabies, Anti difteri serum, Anti tetanus serum)
  - d. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, melalui kegiatan Sweeping vaksinasi bagi bayi dan balita, Evaluasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
  - e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, melalui kegiatan Pelatihan konseling dan testing HIV (VCT), Pelatihan IMAI/HIV AIDS, pengadaan reagen/logistik sifilis dan HIV, Pengadaan kelambu berinsektisida, Sosialisasi pengobatan penderita HIV dengan ART, Sosialisasi pengobatan penderita malaria dengan ACT
  - f. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, melalui kegiatan Rakor teknis dan pertemuan LS/LP penanggulangan DBD dan TB, Fasilitasi penjangkauan tersangka/pasien baru TB, Monitoring dan pemantauan program zoonosis, Monitoring pengendalian penyakit Flu Burung dan penyakit Kusta.
  - g. Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular, melalui survei evaluasi filariasis (kaki gajah), Survei resistensi insektisida terhadap vektor dan survei uji petik jentik DBD, Survei dinamika penularan malaria dan Survei resistensi insektisida.
  - h. Peningkatan imunisasi, melalui pertemuan evaluasi pemantauan wilayah setempat (PWS), Pertemuan pelaksanaan crash program campak, Pemantauan cold chain/ rantai dingin, Supervisi suportif program imunisasi pada daerah dropout follow up (DOFU)

- i. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, melalui Pembuatan buku pedoman penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana, Pembuatan buletin epidemiologi, Penyusunan profil penanggulangan bencana, Surveilans terpadu penyakit puskesmas/rumah sakit, Penggandaan buku pedoman penyakit tidak menular, Sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB dan Surveilans kesehatan haji embarkasi/debarkasi
  - j. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan penyakit menular, melalui kegiatan Pengembangan jejaring pengendalian penyakit tidak menular, Monev pengamatan surveilans epidemiologi.
  - k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui kegiatan Pertemuan evaluasi program Pengendalian penyakit, dan Asistensi teknis surveilans kesehatan haji.
- 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, melalui kegiatan seleksi dan fasilitasi program Kab/Kota sehat, Pemantauan kualitas lingkungan, Pengawasan kualitas limbah rumah sakit
  - b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
  - c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, melalui pengembangan wilayah sehat, Kabupaten/Kota sehat dan pasar sehat
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui pertemuan evaluasi kota sehat.
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, melalui pameran dan kampanye kesehatan, liputan dan siaran radio, serta penyuluhan kelompok dan keliling, Pencetakan poster, leaflet, booklet, naskah koran, spanduk, banner dan billboard.

- b. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dalam promosi kesehatan dengan melaksanakan Rakor pokjanal posyandu.
  - c. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, melalui workshop desa siaga, pemantapan pola hidup bersih dan sehat.
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program promosi kesehatan, Monev desa siaga
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, melalui kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, Konfirmasi/penyelidikan kasus gizi buruk dan Pengumpulan data peta rawan gizi.
  - b. Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, melalui kegiatan Sosialisasi dan advokasi penanggulangan gizi buruk, Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi tenaga kesehatan di puskesmas perawatan, Pengadaan larutan penanggulangan gizi buruk, Pengadaan makanan pendamping ASI
  - c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi, melalui pertemuan Sosialisasi dan advokasi peningkatan ASI eksklusif, Semiloka peningkatan ASI eksklusif.
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program gizi dan penggunaan garam beriodium
- 7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan seperti obat gizi, obat anti tuberkulosis , obat malaria dan obat buffer stock
  - b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, melalui Pembinaan teknis program farmasi dan makanan, Pengiriman/distribusi dan pemusnahan obat
  - c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS, melalui pertemuan implementasi pelayanan informasi obat di sarana pelayanan
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui monitoring pelaksanaan penggunaan obat

- rasional, Monitoring pelaksanaan pelayanan informasi obat.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Sumber Daya Kesehatan
    - a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit Kab/Kota terutama di daerah terpencil dan bencana, melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, yaitu pelatihan bidan/fasilitator untuk Desa Siaga, Pelatihan petugas pemeriksa kesehatan calon jamaah haji, pemutakhiran data tenaga kesehatan, Bantuan beasiswa pendidikan kesehatan dalam negeri.
    - b. Pendidikan dan pelatihan formal, melalui kursus-kursus singkat/pelatihan bidang kesehatan, Short course di Adelaide University, Pelatihan E-procurement
    - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, melalui Workshop perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, Pembinaan akreditasi sarana, institusi pendidikan dan diklat kesehatan, Monev data perijinan sarana dan tenaga kesehatan, Peningkatan kemampuan pengelola keuangan
    - d. Pembinaan teknis dan pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan oleh Balai Pelatihan Kesehatan
    - e. Pelaksanaan pendidikan kesehatan oleh Akademi Keperawatan
  - 9) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
    - a. Pemindahan tugas PNS, melalui penempatan tenaga kesehatan PTT
  - 10) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
    - a. Penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi kesehatan, dengan pengumpulan data profil kesehatan dan indikator SPM bidang kesehatan, pertemuan pengembangan sistem informasi kesehatan
    - b. Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dengan mengembangkan



- penyusunan perencanaan yang terpadu melalui Musrenbang kesehatan, pertemuan evaluasi kinerja pembangunan kesehatan, mengadakan rapat kerja tingkat daerah dan nasional serta Pengembangan sistem kesehatan daerah, Pembinaan perencanaan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan, Konsultasi pembinaan perencanaan dan penyusunan program kesehatan
- c. Monitoring dan evaluasi melalui pengumpulan data perencanaan dan evaluasi pelaksanaan SPM di Kab/Kota, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Laporan tahunan pelaksanaan pemerintah daerah bidang kesehatan (LPPD)
- 11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, melalui rapat koordinasi teknis pengelola pembiayaan kesehatan, sosialisasi pola pengelolaan keuangan BLUD, pertemuan penyusunan pola tarif unit pelayanan kesehatan, advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pembelajaran pengelola keuangan BLUD.
- b. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu, melalui pertemuan rakor dan midterm pengelolaan jamkesmas/jamkesda, bantuan transport rujukan bagi petugas dan keluarga pasien, bimbingan teknis pengelolaan pembiayaan
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.
- 12) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, berupa LAKIP, LPPD dan laporan indikator kinerja, serta Monev pelaksanaan pembangunan kesehatan.
- b. Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran

- c. Penyusunan pelaporan bulanan prognosis realisasi anggaran, berupa laporan bulanan kegiatan dan anggaran.
- d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

### 3. Permasalahan dan Solusi

- 1) Cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan anak belum dapat dikatakan tercapai secara maksimal, karena masih ada 1 (satu) indikator yang tingkat capaiannya dibawah 50% dari target, yaitu :

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (48.3%). Rendahnya cakupan tersebut dikarenakan data yang diterima baru mencakup hingga bulan november, pemahaman/persepsi terhadap definisi operasional masing-masing indikator belum sama sehingga diperlukan upaya :

- a. peningkatan pemahaman melalui evaluasi juknis indikator dan system pencatatan dan pelaporan
  - b. Penggunaan kohort ibu, bayi dan balita disetiap pelayanan kesehatan
  - c. Setiap ibu hamil, bayi dan balita harus menggunakan buku KIA
  - d. Setiap kabupaten/kota harus melaksanakan audit maternal perinatal
  - e. Meningkatkan kerjasama lintas sector (PKK) melalui pencatatan ibu hamil, bayi dan balita yang dilakukan dalam program dasa wisma
  - f. Penguatan monitoring evaluasi terhadap kabupaten/Kota secara integrasi program dari provinsi
- 2) Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, dapat dikatakan tercapai karena sebagian besar indikator dapat mencapai target, yaitu dengan tingkat pencapaian:
    - a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (102%)
    - b. Puskesmas 24 jam di tiap kecamatan (83%)
    - c. Cakupan puskesmas dengan 2 dokter (100%)
    - d. Cakupan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (100%)
 Sedangkan hasil yang belum memuaskan adalah :
    - a. Cakupan peserta KB aktif (83.2%) atau baru

mencapai 98% dari target

b. Puskesmas ISO (65%)

Hal ini disebabkan karena Puskesmas ISO belum menjadi prioritas Kementerian Kesehatan RI sehingga untuk perkembangannya diserahkan kepada kemampuan daerah masing-masing.

Untuk pengembangan puskesmas 24 jam diprioritaskan untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah, untuk mempercepat pencapaiannya pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada Kab/Kota yang semakin meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp. 16,6 M menjadi Rp. 28 M tahun 2012 dan 34 M tahun 2012

3. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan laboratorium telah berhasil dicapai, karena semua pasien/sampel dapat dilayani dengan baik. Selanjutnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Laboratorium pada masyarakat yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, sejak tahun 2010 lalu telah memperoleh sertifikasi ISO 17025-2005 sebagai Laboratorium Penguji.
4. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan mata masyarakat, melalui pelayanan operasi buta katarak telah berhasil dicapai bahkan telah melampaui target dari 1550 orang yaitu berhasil mengoperasi sebanyak 1573 orang (101%), selanjutnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) sejak tahun 2010 telah diadakan peralatan Laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) dan mulai berfungsi pada tahun 2012 yang bermanfaat untuk mengurangi mata minus berat dan kelainan mata dengan ketergantungan kaca mata sehingga kondisi mata pasien semakin baik bahkan ada yang tidak perlu lagi menggunakan kaca mata. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan olah raga masyarakat telah mencapai target berdasarkan keanggotaan (member) yang tercatat

lebih dari 1000 orang yang ditargetkan.

b. RSUD. A.Wahab Syahranie, dengan :

1. Program dan kegiatan :

Untuk mendukung kebijakan RSUD. A. Wahab Syahranie Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 16 program dan 50 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran Dinas Kesehatan dari APBD dialokasikan sebesar Rp.299.597.752.000,- setelah perubahan menjadi Rp.284.542.425.368,90 dengan capaian kinerja 69,56 persen.

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan , maka program yang dilaksanakan pada tahun 2012 untuk APBD Murni adalah sebagai berikut ;

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Keberhasilan kegiatan pelayanan publik di rumah sakit tidak terlepas dari keberhasilan pelayanan administrasi, sedangkan keberhasilan pelayanan administrasi tidak lepas dari tersedianya penyediaan jasa, dll

Kegiatan

a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

c. Penyediaan alat tulis kantor.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

e. Penyediaan makanan & minuman.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

g. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan.

h. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

i. Penyediaan Jasa Tenaga Tetentu.

- j. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan.
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
  - c. Pengadaan mebeleur.
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional.
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan. Pengadaan pakaian Dinas/beserta perlengkapannya.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 

Dari hasil analisis SWOT maka dapat ditentukan 10 sasaran Program yang ditetapkan harus sesuai untuk mendukung visi, misi dan tujuan organisasi. Diantaranya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur merupakan program utama di RSUD AWS, karena tanpa SDA yang baik dan unggul maka semua program lainnya tidak dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal ( Pembelajaran Manajemen dan Teknis ).

Sasaran

Meningkatnya jumlah Peserta Diklat Sesuai dengan Kompetensi.

Terealisasinya Jumlah Pendidikan/Pelatihan Formal dan Non Formal.

Terealisasinya Kemitraan dengan Fakultas Kedokteran di Tanah Jawa.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 

Kegiatan

  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 

Kegiatan

- Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - Kegiatan
      - a. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
      - b. Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  - 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
    - a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
    - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS ParuParu/ RS Mata
 

Sebagai rumah sakit Rujukan utama di Kaltim dan sebagai rumah sakit Pendidikan maka RSUD AWS akan mengembangkan pelayanan Unggulan terhadap jenis-jenis pelayanan medis .

Kegiatan

    - a. Pengadaan Alat alat Kesehatan Rumah sakit / Kedokteran Umum.
    - b. Pengadaan mebeleur rumah sakit.
    - c. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.
    - d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.
    - e. Pengadaan alat kesehatan untuk IRD + ICCU.
  - 10) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS mata
 

Kegiatan

    - a. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit.
    - b. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
    - c. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur rumah sakit.
    - d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah sakit.

3. Permasalahan dan Solusi

Maka dengan penetapan program dan kegiatan tersebut diatas dapat untuk mengatasi masalah yang masih terjadi, tetapi terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu ;  
Belum optimalnya kerjasamanya/koordinasi lintas program dan sektor terkait dari segi implementasi, termasuk kemitraan dengan swasta dan masyarakat serta dunia usaha.

b. RSUD. Kanujoso Djatiwibowo, dengan:

1. Program dan Kegiatan :

Untuk mendukung kebijakan RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan program 19 dan 55 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran RSUD. Kanujoso Djatiwibowo dari APBD dialokasikan sebesar Rp. 301.614.895.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 338.729.007.790,25 dengan capaian kinerja 84,55 persen.

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Mata

- a. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum sebanyak 159 unit.
- b. Pengadaan mebeleur rumah sakit sebanyak 160 unit.
- c. Pembangunan gedung instansi rawat inap sebanyak 1 gedung.
- d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga (Mesin cuci dan mortuary Refrigerator) sebanyak 2 unit.

- 2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Mata
  - a. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit sebanyak 37 unit.
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit sebanyak 35 unit.
3. Permasalahan dan Solusi
 

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2012 terdapat permasalahan yang timbul diantaranya :

  - setiap tahapan kegiatan tidak semua kegiatan terakomodir karena menyangkut tersedianya dana / biaya yang diperlukan serta ditinjau pula dari segi tingkat prioritas dan kebutuhan.

Solusi

  - Solusi yang dapat diambil pada permasalahan ini adalah mengadakan analisa kebutuhan di setiap bidang kegiatan seperti analisa kebutuhan pegawai, analisa keuangan, peralatan dan perlengkapan yang menunjang peningkatan pelayanan di rumah sakit.
- c. RSKD Atma Husada, dengan :
  1. Program dan Kegiatan
 

Untuk mendukung kebijakan RSK. Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 12 program dan 38 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal yang tertuang pada RPJMD SKPD.
  2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :
 

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran RSK. Atma Husada dari APBD dialokasikan sebesar Rp. 36.376.013.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 41.379.971.000,- dengan capaian kinerja 86,42 persen.



- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Terlaksananya penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba.
- 2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Mata
  - a. Terlaksananya pembangunan rumah sakit.
  - b. Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum.
  - c. Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumah sakit.
  - d. Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.
  - e. Terlaksananya pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
3. Permasalahan dan Solusi
 

Secara umum kondisi pelayanan RSJD. Atma Husada Mahakam tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun kualitas pelayanan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan jumlah tempat tidur kelas III di rumah sakit masih tidak mampu menampung seluruh pasien tidak mampu/kelas III yang sesuai standar. Juga Sumber Daya Manusia yang profesional di lingkungan RSJD. Atma Husada Mahakam yang masih sangat terbatas.

Solusi yang harus dilakukan adalah :

  - a. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana RSJD. Atma Husada Mahakam agar dapat memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit baik di rawat jalan dan rawat inap.
  - b. Pada tahun anggaran berikutnya lebih memfokuskan penganggaran untuk menambah tempat tidur pada ruang rawat inap kelas III dengan membangun gedung baru khusus perawatan pasien kelas III.
  - c. Menambah tenaga (SDM) RSJD. Atma Husada Mahakam yang memiliki potensi dan keahlian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta manajemen rumah sakit.
  - d. Menambah pelayanan 24 jam di RSJD. Atma Husada Mahakam misalnya Apotek 24 jam, Rekam Medis

24 Jam dan pelayanan 24 jam lainnya yang menunjang pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat yang telah melayani pasien selama 24 jam.

d. RSUD Tarakan, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 17 program dan 41 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2012 Anggaran RSUD Tarakan dialokasikan sebesar Rp. 204.513.021.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 250.513.137.907, dengan capaian kinerja 82,75 persen.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, maka melalui kebijakan ditetapkan program kerja sebagai berikut:

1) ALOKASI APBD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

a) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

b) Penyediaan makanan dan minuman.

c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

d) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

e) Penyediaan jasa pegawai non PNS.

f) Penyediaan jasa tenaga tertentu.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan:

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan:

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan:

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan:

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.

f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan:

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.

g. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.

Kegiatan:

a) Pembangunan Rumah Sakit.

b) Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit/Kedokteran umum.

h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.

Kegiatan:

a) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit.

b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit.

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit.

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan:

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

2) ANGGARAN BLUD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

a) Penyediaan jasa surat-menyurat.

- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e) Penyediaan alat tulis kantor.
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h) Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- i) Penyediaan makanan dan minuman.
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- k) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.
- l) Penyediaan jasa pegawai non PNS.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  
Kegiatan:
  - a) Pengadaan peralatan gedung kantor.
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.  
Kegiatan:
  - Pengadaan pakaian kerja lapangan.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  
Kegiatan:
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.  
Kegiatan:
  - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
- f. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.  
Kegiatan:
  - a) Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit/Kedokteran umum.
  - b) Pengadaan mebeleur Rumah Sakit.

- c) Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit.
- d) Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit.
- g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.  
Kegiatan:
  - a) Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Sakit.
  - b) Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit.
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Kegiatan:
  - Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan BLUD.

e. Badan Narkotika Provinsi

1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 11 program dan 24 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2012 Anggaran BNP dialokasikan sebesar Rp.9.567.685.000,- tanpa ada perubahan dengan capaian kinerja 71,63 persen.

3. Permasalahan dan Solusi

Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur merupakan instansi vertikal dibawah koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN).

i. Urusan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ditetapkan dalam Program Rutin dan Pembangunan Badan Lingkungan

Hidup Provinsi Kalimantan Timur ada 8 program dan 45 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2012 Anggaran BLH dialokasikan sebesar Rp.23.986.978.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 24.836.978.000,- dengan capaian kinerja 79,24 persen.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

1) Pengkajian dampak Lingkungan

- a. Tertanganinya penanganan kasus-kasus lingkungan dan sengketa Lingkungan Hidup.
- b. Terbentuknya Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan disahkan oleh DPRD Prov. Kaltim.
- c. Terlaksananya peran dan fungsi Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3LSH).
- d. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas PPNS – LH dan PPLHD se Kalimantan Timur.
- e. Terlaksananya Peningkatan Penataan Hukum Lingkungan pada seluruh Perusahaan yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- f. Terlaksananya Rapat Koordinasi Amdal se-Kalimantan Timur.
- g. Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi.
- h. Pengawasan UKL/UPL bagi kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- i. Pembinaan pelaksanaan Manajemen Komisi penilai AMDAL dan Kelengkapan data AMDAL serta UKL/UPL pada BLH se-Kaltim.
- j. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Daerah.
- k. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL Kab/Kota se-Kaltim.

- l. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL/RPL Kab/Kota se Kalimantan Timur.
- m. Terlaksananya Rapat Koordinasi PPLH se-Kaltim dan Rapat Kordinasi Regional Se Kalimantan
- 2) Pengendalian Pencemaran
  - a. Terlaksananya pengawasan dan meningkatnya ketatan dunia usaha terhadap Peraturan-peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kinerja Perusahaan (Proper).
    - a) Proper Industri dan Jasa, telah dilakukan penilaian terhadap 28 Perusahaan Industri dan Jasa pada tahun 2009, dengan perolehan 1 emas, 9 hijau, 13 biru dan 5 merah, tahun 2010 penilaian terhadap 34 Perusahaan industri dan jasa dengan perolehan 1 emas, 10 hijau, 16 biru, 6 merah dan 1 hitam. Pada tahun 2011 sebanyak 33 perusahaan Industri dan jasa dengan perolehan 2 emas, 10 hijau, 19 biru dan 2 merah. Tahun 2012 telah dilakukan penilaian terhadap 35 Perusahaan Industri Jasa serta Migas dengan Perolehan 2 emas, 11 hijau, 21 biru dan 1 Merah.
    - b) Sedangkan Perusahaan Pertambangan Batubara Tahun 2009 telah dilakukan penilaian 24 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 12 hijau, dan 10 biru, tahun 2010 telah dilakukan penilaian 34 perusahaan, dengan perolehan 1 emas, 12 hijau, 16 biru dan 5 merah, tahun 2011 Penilaian 37 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 17 hijau, 14 biru dan 4 merah, tahun 2012 penilaian 67 perusahaan, dengan perolehan 2 emas, 26 hijau, 24 biru dan 15 merah.
    - c) Untuk penilaian kinerja perusahaan HPHTI/IUPHHK-KT, telah dilakukan penilaian 24 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 5 hijau, 18 biru dan 1 merah, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 3 perusahaan dengan perolehan 8 hijau, 14 biru dan 1 merah. Tahun 2011 32 perusahaan dengan dengan perolehan 8 hijau, 22 biru dan

2 hitam. Tahun 2012 perusahaan yang dinilai 33 dengan perolehan 1 emas, 9 hijau, 22 biru dan 1 merah

- b. Terpantaunya kualitas lingkungan di Sungai Mahakam kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, serta sungai Segah di Kabupaten Berau.
- c. Terlaksanannya pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. Terlaksanannya Pemantauan limbah cair Industri di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang.
- e. Tersusun Raperda tentang Pengelolaan B3 Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Terpantaunya Kualitas udara ambien Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

3) Pengendalian kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup.

- b. Terinventarisirnya Kerusakan Mangrove di Kalimantan Timur. Dari jumlah luas mangrove 883.379 ha rusak 329.579 ha.
- c. Kerusakan Hutan dan Lahan  
Terinventarisnya lahan kritis di Kaltim tahun 2008 seluas 5762.225 ha, Tahun 2009 seluas 5.186.002 ha (mengalami penurunan menjadi 4.663.352 ha) dan tahun 2010 7.982.749 ha.
- d. Upaya Menghadapi Perubahan Iklim antara lain :
  - a. Adanya Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012.
  - b. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SARP REDD).
  - c. Penanaman 1 Juta Pohon di Samobja dan Kota-kota lainnya di Kalimantan Timur.
- e. Program One Men Five Tree.
- f. Pengelolaan Keneakargaman Hayati dan Ekosistem  
Konsevasi Insitu dan eksit



- 4) Pengembangan Kapasitas.  
a. Adanya penerima penghargaan Adipura

Tabel 4.11 PENGHARGAAN ADIPURA TAHUN 2012

No	Kab/Kota	Nama Penghargaan
1	Kota Bontang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adipura (K. Kota Sedang)</li> <li>• Plakat Terminal terbaik (K. Kota Sedang)</li> </ul>
2.	Kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adipura</li> <li>• Taman Terbaik ke 2 (Kategori Kota Besar)</li> </ul>
3.	Kota Tarakan	Adipura
4.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Piagam Penghargaan Adipura
5.	Kabupaten Berau	Taman Terbaik ( Kategori Kota Kecil)
6.	Kota Tarakan	Taman Terbaik ke 3 ( Kategori Kota Sedang)

- b. Tersosialisasinya upaya produksi ramah Lingkungan untuk meminimalisasi limbah industri
- c. Terbinanya Laboratorium Lingkungan kearah akreditasi nasional
- d. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil bidang LH
- e. Adanya calon penerima Kalpataru dari Kalimantan Timur
- f. Adanya laporan Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH)/SLHD
- g. Meningkatnya Kemampuan Kapasitas personil dilingkungan BLH Prov. Kaltim melalui Kursus dan Bimtek.

h. Terciptanya Sekolah Hijau yang peduli terhadap Lingkungan hidup (Adiwiyata)

5) Pekan Lingkungan Indonesia

Pekan Lingkungan Indonesia, pada tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur, Melalui Badan Lingkungan Hidup mendapat Peringkat Pertama, tahun 2010 dan tahun 2011 Juara 1, tahun 2012 sukses menjadi Juara Umum.

3. Permasalahan dan Solusi

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur pada dasarnya menuntut perhatian seluruh pelaku pembangunan yakni pemerintah (stake holder), masyarakat dan pihak swasta/perusahaan, agar masalahnya tidak menjadi semakin besar dan lebih kompleks.

ii. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Tata Ruang & Perumahan :

Dinas Pekerjaan Umum, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Sebagaimana pelaksanaan Program prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 telah melaksanakan 61 program dengan 293 kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran SKPD DPU Provinsi Kaltim tahun 2012 sebesar Rp. 2.851.793.347.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 3.291.736.493.792,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.485.268.287.539,- dengan capaian kinerja 75,50 persen.

1) Program Pembangunan jalan dan jembatan

- a) Perencanaan pembangunan jalan.
- b) Survey kontur jalan dan jembatan.
- c) Pembangunan jalan.
- d) Perencanaan pembangunan jembatan.
- e) Pembangunan jembatan.

- 2) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - a) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
  - b) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 3) Pembangunan turap/talud/bronjong
  - a) Perencanaan turap/talud/bronjong.
  - b) Pembangunan turap/talud/bronjong.
- 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan
  - a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
  - b) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
  - c) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
  - d) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
- 5) Tanggap darurat jalan dan jembatan
  - a) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat.
  - b) Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat.
- 6) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
  - a) Inspeksi kondisi jalan.
  - b) Inspeksi kondisi jembatan.
- 7) Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
  - a) Penyusunan sistem informasi database jalan.
  - b) Penyusunan sistem informasi database jembatan.
- 8) Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan
  - a) Pembangunan gedung workshop.
  - b) Pembangunan laboratorium kebinamargaan.
  - c) Pengadaan alat-alat berat.
  - d) Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.
  - e) Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.
  - f) Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop.
  - g) Rehebitasi/Pemeliharaan laboratorium kebinamargaan.
  - h) Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat.
  - i) Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.
  - j) Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

- 9) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
  - a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi.
  - b) Perencanaan pembangunan reservoir.
  - c) Perencanaan normalisasi saluran sungai.
  - d) Pembangunan reservoir.
  - e) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.
  - f) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
- 10) Penyediaan dan pengelolaan air baku
  - a) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
  - b) Peningkatan distribusi penyediaan air baku.
- 11) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber air lainnya.
  - a) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
- 12) Pengendalian banjir
  - a) Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali.
  - b) Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
  - c) Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir.
  - d) Pembangunan prasarana pengaman pantai.
  - e) Pembangunan reservoir pengendalian banjir.
- 13) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  - a) Perencanaan pengembangan infrastruktur.
- 14) Pembangunan infrastruktur pedesaan
  - a) Penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan.
  - b) Pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan.
- 15) Pengembangan perumahan
  - a) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.
  - b) Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).
  - c) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
  - d) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan.

- e) Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan.
- f) Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
- g) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.
- 16) Pemberdayaan komunitas perumahan
  - a) Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.
- 17) Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
  - a) Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
- 18) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
  - a) Pengembangan sistem distribusi air minum.
  - b) Penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bagi masyarakat miskin.
- 19) Perencanaan Tata Ruang
  - a) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
  - b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan.
  - c) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
  - d) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.
  - e) Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.
  - f) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota.
  - g) Penyusunan rencana tata ruang kawasan.
  - h) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 20) Pemanfaatan Ruang
  - a) Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
  - b) Penyusunan norma, standar, dan criteria pemanfaatan ruang.
  - c) Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang.
  - d) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.
- 21) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

- b) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang.
  - c) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
  - d) Pengawasan pemanfaatan ruang.
  - e) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang.
  - f) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 22) Pengaturan Dan Perberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi
- a) Sosialisasi dan deseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.
  - b) Forum jasa konstruksi.
  - c) Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi.
  - d) Fasilitasi sertifikat tenaga terampil jasa konstruksi.
- 23) Pengawasan Jasa Kontruksi
- a) Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi.
- 24) Penyusunan Perencanaan Program Dan Monitoring Kegiatan ke-PU-an
- a) Penyusunan perencanaan program ke-PU-an.
  - b) Monitoring dan evaluasi kegiatan ke-PU-an.
  - c) Rapat koordinasi ke-PU-an.
  - d) Review Renstra 2009-2013.
  - e) Penyusunan pelaporan 5 tahunan kinerja ke-PU-an.
  - f) Penyusunan pelaporan tahunan kinerja ke-PU-an.
  - g) Penerapan manajemen berbasis kinerja.
  - h) Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.
- 25) Penyusunan Sistem Informasi ke-PU-an
- a) Penyusunan sistem informasi bidang pekerjaan umum.
  - b) Penataan jaringan system informasi bidang pekerjaan umum.
  - c) Pengadaan sarana dan prasarana informasi ke-PU-an.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan pada :

Sumber Daya Air :

- a. Pembebasan Tanah.
- b. Tambang.
- c. Petani.

Bina Marga :

- a. Jalan yang ada saat ini sebagian besar merupakan jalan eks HPH dan Tambang, sehingga pembangunannya tidak direncanakan menurut standar yang baik.
- b. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas jalan ( $\geq$  MST 8 Ton/Kelas IIIa).
- c. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) oleh instansi terkait terhadap para pelaku pelanggaran angkutan beban lebih (over load) dan penertiban ukuran kendaraan.
- d. Belum terlaksananya penanganan jalan secara terprogram sampai final surface
- e. Kondisi tanah yang sangat labil sehingga terjadi longsoran-longsoror atau patahan yang tidak terduga
- f. Terbatasnya material yang berkualitas untuk konstruksi jalan sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain.
- g. Belum tuntasnya penyelesaian pembangunan jalan lintas Kalimantan poros selatan dan poros tengah.
- h. Pembangunan jalan lintas Kalimantan poros tengah dan koridor perbatasan masih dalam tahap pembangunan secara bertahap.

Cipta Karya :

- a. Belum sinkronisasi Program antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.
- b. Masalah pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

- c. Pengelolaan pasca konstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

Solusi Dan Saran :

- a. Sebelum pembangunan fisik, Kabupaten/Kota harus menyelesaikan terlebih dahulu pembebasan lahan, sehingga alokasi fisik yang telah dianggarkan dapat digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- b. Untuk mengatasi permasalahan penanganan jalan tersebut dapat dibiayai dengan sistem kontrak Multiyears. Untuk pelaksanaan fisik yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun (secara bertahap), pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Perlu adanya Sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.
- d. Dapat dilakukan secara bersama-sama (sharing) melalui pendanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBN dan Loan.

### iii. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik

#### a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### 1. Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana urusan wajib Perencanaan Pembangunan dengan 14 Program dan 51 Kegiatan pada tahun 2012 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

##### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran sebesar Rp.56.856.877.000,- setelah perubahan menjadi Rp.62.041.877.000,- dengan capaian kinerja 90,48persen yang bersumber dari Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  - b. Terselenggaranya Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang).
  - c. Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur 2012.
2. Program Pengembangan Data/Informasi
  - a. Tersedianya buku Kaltim Dalam Angka (KDA) tahun 2012.
  - b. Tersedianya buku Statistik Sektorial 2012.
  - c. Tersedianya buku PDRB lapangan usaha 2008-2011.
  - d. Tersedianya buku PDRB penggunaan 2006-2011.
  - e. Tersedianya analisis data triwulan kinerja perekonomian 2012.
  - f. Tersedianya analisis kinerja program kegiatan pembangunan 2012.
  - g. Tersedianya bulletin, kliping, pameran terkait kegiatan di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
  - h. Tersedianya buku Profil 2010 dan 8 kelompok data Provinsi Kalimantan Timur 2010-2012.
3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

  - Belum terbangunnya satu data informasi yang bisa dipakai sebagai perencanaan dan monitoring pembangunan daerah
  - Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang ahli dalam merumuskan, mengkaji dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah
  - Perencanaan harus mampu mengubah ketergantungan daerah pada sumbangan Sumber

Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui dengan menggali dan pengelola potensi SDA yang dapat diperbaharui.

- Perencanaan harus mampu memformulasikan alokasi anggaran belanja publik lebih besar dari belanja aparatur.
- Perencanaan harus mampu menentukan prioritas pembangunan dan memberikan alokasi anggaran yang proporsional terhadap prioritas tersebut.
- Perencanaan harus mampu menyusun formasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, sehingga stimulan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- Masih terdapat 5 (lima) isu strategis daerah yang merupakan program perencanaan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Beberapa upaya/solusi peningkatan kualitas perencanaan yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

- Membangun dan mensinergikan satu data yang menjadi acuan perencanaan pembangunan di daerah dengan melibatkan stake holder yang bias membantu.
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami perencanaan dalam merumuskan, mengkaji serta mengevaluasi pembangunan daerah.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi secara vertikal (Pusat dan Kabupaten/Kota) maupun horisontal ( Antar Wilayah/lembaga) secara aktif.
- Memperhatikan dan menganalisa isu strategis pada lingkungan global, nasional, regional dan daerah.
- Peninjauan kembali struktur BAPPEDA (penyesuaian dengan beban kerja)

b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal sebagai pelaksana urusan wajib Perencanaan Pembangunan dengan 8 Program

dan 35 Kegiatan pada tahun 2012 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2012, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran sebesar Rp.15.854.802.000,- setelah perubahan menjadi Rp.16.418.002.000,- dengan capaian kinerja 80,58 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

### a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- Tersusunnya Grand Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Terlaksananya Konsultasi dan Koord. Dengan Instansi Vertikal (Pusat & Daerah)
- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Lokpri
- Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Bidang-bidang)
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur di 3 Kab. Perbatasan dan Pulau Terluar
- Terbinanya SDM Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM di 3 Kabupaten Perbatasan
- Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi di Daerah-daerah Sentra Produksi Yang Potensial di 3 Kabupaten Perbatasan
- Teridentifikasinya Kondisi Pasar-pasar Tradisional di 3 Kabupaten Perbatasan
- Terbitnya Secara Berkala Buletin Pengelolaan Kawasan Perbatasan
- Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

- Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi yang Berbasis Produk Unggulan di 3 Kabupaten Perbatasan.
- Tersusunnya Data Potensi Ekonomi di 3 Kabupaten Perbatasan
- Terselenggaranya Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan Kebudayaan, Seni, Kerajinan dan Pariwisata di 3 Kabupaten Perbatasan.
- Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal.

VI. Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan 16 program dengan 89 kegiatan pada tahun 2012 untuk meningkatkan potensi pemuda dalam Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan dalam pembangunan serta memperluas kesempatan pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sumber Dana APBD Provinsi untuk Tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.58.719.401.000,- setelah perubahan menjadi Rp.223.946.201.000,- dengan capaian kinerja 95,00 persen.

Adapun output dan outcome utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

a. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. (terselenggaranya TOT penyuluh pencegahan penggunaan narkoba sebanyak 150 orang)
- Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional. (terlatihnya pasukan paskibraka sebanyak 40 orang)
- Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3). (Pelatihan pembekalan SP3 sebanyak 35 orang)
- Bimbingan generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Provinsi).

- (terlaksananya pelatihan persiapan dan pembekalan Bhakti pemuda sebanyak 70 orang dan JPI sebanyak 14 orang)
- Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor. (terpilihnya 3 orang pemuda pelopor Kaltim)
  - Pendidikan dan Pelatihan Pramuka. (Pelaksanaan Pembinaan Pramuka tingkat Dasar (KMD) sebanyak 40 orang)
  - Pembinaan Alumni Program kepemudaan. (sebanyak 60 orang yang terdiri dari purna paskibraka, Purna Caraka muda Indonesia, Purna prakarya muda Indonesia, dan Purna KPN)
  - Monitoring dan Konsultasi Program Kepemudaan (Monitoring kegiatan pada 14 Kab/kota)
  - Peningkatan Peran serta Kepemudaan ( Pertukaran Pemuda/PPAN sebanyak 3 Orang, Kapal Pemuda Nusantara sebanyak 6 orang, Japan east Network of Exchange student and Youths Student/JENESYS sebanyak 2 orang)
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat. (Pembinaan atlet PPLP sebanyak 40 orang)
  - Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi. (pelaksanaan senam)
  - Penyelenggaraan kompetisi olahraga.(Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi/POPPOV di Kota tarakan, Pelaksanaan Pekan Olahraga SD/MI di Kab. PPU, Pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah di Kota Makassar)
  - Pemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa dan masyarakat. (terlaksananya HAORNAS yang diikuti 450 orang)
  - Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi.(Pemberian Bonus PON XVIII 2012 sebanyak 140 orang, NPC 94 orang, OLYMPIADE 3 orang, POPPOV 154 orang, POR SD/MI 257 orang)
  - Pengembangan olahraga rekreasi. (Pelaksanaan outbound serta character building bagi pegawai Dispora Prov. Kaltim)
  - Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah.

- Penyelenggaraan olahraga Multi Event (Pelaksanaan 3 Lomba /Aerobic,Poco-poco, Lari 10 K)
- Monitoring dan Konsultasi Program Keolahragaan
- Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatih Olahraga (Pelatihan pelatih dan Guru olahraga sebanyak 80 orang).
- Pembinaan Klub Olahraga Mahasiswa di Perguruan Tinggi (Pembinaan 5 Klub Olahraga di Perguruan tinggi).
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
  - Peningkatan Pembangunan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri.
  - Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri. (Operasional Sekolah khusus olahragawan Internasional selama 1 tahun)
- d. Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Olahraga
  - Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga (terlaksananya pelatihan kewirausahaan yang diikuti 90 orang pemuda dari 14 Kab/Kota).
  - Pelatihan Kecakapan Hidup (Pelatihan keterampilan yang diikuti 80 orang dari Kab/Kota).
  - Monitoring dan Konsultasi bidang Pengkajian Kewirausahaan Pemuda Industri olahraga. (Monitoring kegiatan pada 12 Kab/Kota)
  - Ekspo Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Permasalahan utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 adalah Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri yang berubah dari Multi Years Contract (MYC) / Tahun Jamak ke Pelaksanaan tahunan sehingga jadwal dan sisa waktu realisasi anggaran yang sudah sedikit mengakibatkan pembangunan ini ditunda sementara.

#### b. Solusi

Menurut berbagai pihak yang berkompeten pelaksanaan Tahun Jamak sangat baik karena tidak

terlalu membebani pelaksanaan APBD tahun bersamaan, diharapkan pada tahun 2013 pelaksanaan pembangunan secara MYC dapat dilaksanakan demi terwujudnya peningkatan prestasi olahraga Kaltim melalui atlet-atlet Kaltim yang juga berprestasi secara akademik.

## VII. Urusan Penanaman Modal

Badan Perijinan Penanaman Modal Daerah, dengan :

### 1. Program dan Kegiatan

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 telah melaksanakan 8 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.

### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2012 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.16.644.601.000,- setelah perubahan menjadi Rp.18.244.601.000,- dengan capaian kinerja 86,16 persen.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

#### 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi.

- a) Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di 14 Kab/Kota.
- b) Terselenggaranya pameran investasi (14 kali pameran dalam negeri dan 2 kali pameran di luar negeri).
- c) Terbentuknya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (adanya 1 laporan hasil rapat se Kaltim dan 1 laporan hasil RKPPMD).
- d) Terjalin kerja sama antar Provinsi Kaltim dengan NTB dan Jawa Barat.

#### 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

- a) Terinformasinya peluang investasi di wilayah Kalimantan Timur melalui rapat, seminar,

workshop dan berbagai bentuk promosi lainnya dan telah disusunnya peta potensi dan peluang investasi.

- b) Terlaksananya operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  - c) Meningkatnya izin penanaman modal yang diterbitkan.
- 3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.
- a). Tersedianya Sumber daya, sarana, dan prasarana penunjang yang dibutuhkan BPPMD Prov. Kaltim.
  - b). Meningkatnya kualitas sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penanaman modal antara lain:

- 1) Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 28.328.800.000.000 pada tahun 2011 menjadi Rp. 30.478.370.000.000 di tahun 2012.
- 2) Realisasi PMA di Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp. 12.132.500.000.000 dan pada tahun 2012 PMA di Kaltim sebesar Rp. 22.769.100.000.000 dan relaisasi PMDN di Kaltim tahun 2011 sebesar Rp. 16.196.300.000.000 dan pada 2012 sebesar Rp. 7.709.270.000.000, terjadi penurunan investasi PMDN di Kaltim disebabkan antara lain, karena kebijakan pemerintah pusat yang saat ini mendorong investasi dari sektor tambang ke sektor perkebunan dan manufacturing.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Reformasi birokrasi yang mengamanatkan peningkatan kualitas, kecepatan, dan ketepatan waktu pelayanan pada masyarakat dunia usaha utamanya dalam hal perijinan investasi yang belum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, maka untuk memacu percepatan perwujudan hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya:

- 1). Penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelayanan perijinan.
- 2). Peningkatan Sistem informasi Manajemen, Sarana dan Prasarana.
- 3). Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.



VIII. Urusan Wajib Koperasi & UMKM dan Urusan Pilihan Industri, Perdagangan:

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, dengan:

1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur (termasuk dengan 3 UPTD), maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebanyak 35 Program dan 102 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sumber Dana APBD Provinsi untuk Tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.57.910.728.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 61.395.728.000,- dengan capaian kinerja 86,88 persen.

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Dengan Kegiatan :

- a. Terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
- b. Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.
- c. Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.

2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Dengan Kegiatan :

- a. Terlaksananya Oprasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrolagian.
- b. Terlaksananya Peningkatan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di 14 Kab/Kota.

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Dengan Kegiatan :

- a. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

3. Permasalahan dan Solusi;

Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pengembangan struktur ekonomi ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil

menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai Krisis yang menimpa negeri ini oleh berbagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembinaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal.

#### SOLUSI

- Perlunya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Untuk mengantisipasi ketersediaan stok menyusun prognosa untuk kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis.
- Melakukan pemantauan harga setiap hari dan pemantauan stok setiap bulannya.

IX. Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan Pertanahan ;  
Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan Umum),  
dengan:

1. Program dan Kegiatan

Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim pada tahun 2012 telah melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan yang merupakan kebijakan Biro pemerintahan Umum Tahun 2012.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim tahun 2012, dengantotal anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.3.974.307.575,- dengan progres 79,49 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan :
  - a. Implementasi system Adminitrasi Kependudukan (membangun, Updating dan pemeliharaan).
  - b. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil.
  - c. Sosialisasi kebijakan kependudukan.

- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
  - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan.
  - b. Penilaian Camat Berprestasi.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - a. Peningkatan pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Kaltim dan Kab/Kota.
  - b. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Prov. Kaltim.
- 4) Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.
  - a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pertanahan.
  - c. Fasilitasi dan koordinasi Kamtibmas.
- 5) Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  - a. Forum koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kab/Kota se Kaltim.
  - b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah.
  - c. Koordinasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan PAD.
  - d. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kecamatan Kab/Kota se Kaltim.
  - e. Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Semangat Mencintai Negara dan Daerah.
- 6) Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah.
  - a. Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Adminitrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan

- a. Untuk pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi calon anggota Dewan berkas pengusulan persyaratan administrasi belum lengkap sehingga sering terjadi terjadi kelambatan dalam prosesnya.
- b. Masih terbatasnya dana untuk menunjang kegiatan untuk kelancaran Kependudukan sehingga masih banyak permasalahan kependudukan yang belum dapat tertangani secara maksimal.
- c. SKPD terlambat menyampaikan laporan Program/Kegiatan yang dikelola sehingga penyusunan LPPD Gubernur terhambat.
- d. Masih kurangnya kegiatan untuk melakukan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerimaan dana perimbangan keuangan daerah antara Pemerintahan pusat dan daerah dan pendapatan daerah untuk Kabupaten/Kota sehingga data masih belum dapat tergali sebagaimana mestinya.
- e. Permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi puluhan tahun yang lalutanpa bukti pendukung atau hanya berupa fotocopy bukan asli, yang disengketakan masyarakat dari Kabupaten/Kota cenderung lebih banyak di alamatkan kepada Pemerintah atau Gubernur karena tidak puas terhadap sikap Pemda setempat.

#### Solusi

- a. Memberikan penjelasan/menyurati Bupati/Walikota serta Pimpinan DPRD Kab/Kota agar untuk usul penggantian antar waktu (PAW) bagi calon Anggota Dewan harus benar-benar melengkapi persyaratan yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk usulan anggaran pada Tahun 2013 perlu adanya penambahan alokasi dana untuk Kependudukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Membuat jadwal penyampaian laporan.
- d. Meminta kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan Program/Kegiatan agar segera menyelesaikan dan menyampaikannya.

- e. Diusulkan penambahan anggaran kegiatan Koordinasi Pendapatan asli Daerah pada Tahun 2013.
- f. Mengadakan rapat-rapat atau memfasilitasi dengan melakukan koordinasi serta konsultasi serta menyurati Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti permasalahan serta mengadakan/melaksanakan sosialisasi sepanjang anggaran tersedia.

X. Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Transmigrasi;

Dinas Ketenagakerja & Transmigrasi, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dinas Ketenagakerja & Transmigrasi melalui 24 Program dan 117 kegiatan sebagai pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja (Sub Bidang Ketenagakerjaan).

Berdasarkan Prioritas dan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan (Penurunan Tingkat Pengangguran dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan).

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mendapat sumber dana Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 62.818.038.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.54.609.069.469,- dengan progres 86,93 persen. capaian kinerja 90,04 persen.

I. Ketenagakerjaan.

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja :

- Terlaksananya Pelatihan bagi pencari kerja (pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan);
- Terlaksananya Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK (Uji assessor pelatihan, verifikasi Tempat Uji Kompetensi);
- Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha produktif bagi wirausaha;
- Terlaksananya Penilaian Kinerja Perusahaan dan penghargaan Siddhakarya.

- b. Program peningkatan kesempatan kerja :
    - Tersusunnya informasi tentang kondisi pencari kerja yang ada di Kalimantan Timur;
    - Terinformasinya lowongan kerja yang ada di Perusahaan melalui Bursa Kerja Online (BKOL) dan Bursa Kerja Khusus (BKK);
    - Terselenggaranya Job Market Fair (JMF), pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
    - Terlaksananya perluasan kerja melalui Padat Karya Produktif.
  - c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan :
    - Terbinanya lembaga-lembaga ketenagakerjaan/hubungan industrial;
    - Terfasilitasinya hubungan yang kondusif antara pekerja dan pengusaha;
    - Terpantaunya pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan;
    - Terlaksananya bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- II. Ketransmigrasian :
- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi:
    - Tersedianya prasarana dan sarana social ekonomi di kawasan Transmigrasi.
    - Terbangunnya Puskesmas, gedung SD di kawasan Transmigrasi di kabupaten Bulungan.
    - Pembangunan dan peningkatan jalan di kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur.
  - b. Program Transmigrasi Lokal :
    - Terbinanya kualitas sumberdaya warga Transmigrasi melalui pelatihan ketrampilan bagi wanita dan Intensifikasi, komposisi dan pengendalian hama (INPOSMA).

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan :

- a. Makin berkurangnya jumlah pegawai fungsional (Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator dan Pegawai Pengawas), karena purna tugas sedangkan penambahan pegawai masih menunggu;

- b. Sebagian besar perusahaan kurang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan sehingga berdampak pada rendahnya kualitas dan produktivitas kerja;
- c. Tidak seimbangnya jumlah pegawai pengawas yang ada dibanding jumlah perusahaan yang diawasi;
- d. Kurangnya perhatian perusahaan dalam memberikan pembinaan terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja.
- e. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik dari segi teknis maupun administrasi.
- f. Pengembangan wilayah Transmigrasi terkendala oleh kesiapan lahan yang belum secara keseluruhan memenuhi criteria penyiapan lahan yang telah ditetapkan sesuai peraturan Menteri;
- g. Perkembangan pelaksanaan Transmigrasi terkendala oleh kualitas Transmigrasi khususnya Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang belum memiliki etos kerja yang diharapkan karena belum fokus menjalankan fungsi sebagai transmigrasi.
- h. Pembinaan transmigrasi belum dapat dilakukan secara optimal karena petugas Pembina lokasi belum memenuhi standar yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, kondisi saat ini hanya 1 orang petugas dari 7 orang petugas yang dibutuhkan.

Solusi :

- a. Perlunya penambahan pegawai fungsional (Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator, Pengawas Ketenagakerjaan) untuk memenuhi capaian target kinerja yang ditetapkan SKPD;
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada perusahaan-perusahaan yang kurang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan;
- c. Memberikan himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas bagi pekerjanya;

- d. Peningkatan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan baik dari segi teknis maupun administrasi;
- e. Dukungan program dan kegiatan yang mengoptimalkan penyediaan lahan sesuai standar yang telah ditetapkan dan atau memfasilitasi penyusunan rencana teknis sesuai kebutuhan daerah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan;
- f. Dilakukan peningkatan etos kerja dan kompetensi Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) melalui pelatihan, pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- g. Peran dan tugas Pembina UPT telah diupayakan dengan menunjuk petugas lintas sektor terkait (guru, pustakawan, dokter, paramedis, rohaniawan, petugas UPT non PNS, perangkat desa dan petugas keamanan) namun insentif yang diberikan tidak memadai dibandingkan dengan tugas yang diemban.

#### XI. Urusan Wajib Ketahanan Pangan;

Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan, dengan :

##### 1. Program dan Kegiatan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 16 Program Pembangunan Ketahanan Pangan dengan 67 kegiatan sebagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012.

##### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat Total anggaran APBD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.22.455.069.00,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp.18.877.422.299,- dengan progres 84,07 persen.

sehingga persentase total realisasi sebesar 89,29 persen.

##### 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.

##### 2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

- b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan.



### 3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kondisi ketahanan pangan dan penyuluhan di Kalimantan Timur Tahun 2011 cenderung semakin baik dan kondusif, namun kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih belum mencapai standar yang direkomendasikan. Sedangkan permasalahan lain yang dihadapi dalam upaya melanjutkan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan, antara lain :

- a. Produksi dan kapasitas pangan daerah semakin terbatas
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
- c. Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, dan bencana
- d. Hasil analisis ketersediaan belum dimanfaatkan secara maksimal
- e. Pengelolaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara optimal
- f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan prasarana karena :
  - Semakin maraknya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian
  - Terjadinya kenaikan harga pangan terutama beras, akibat menurunnya stok pangan sebagai akibat dari bencana alam
  - Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat masih rendah, yang dicirikan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi dan seimbang serta aman
  - Masih terjadinya kasus gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai bahan kimia, biologi dan sebagainya.

- g. Sedangkan dalam pengembangan penyuluhan di Kalimantan Timur terjadi dimana Sumberdaya petani yang semakin berkurang dengan usia petani yang semakin tidak produktif. Generasi muda petani yang diharapkan meneruskan usaha pertanian lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan batubara atau kelapa sawit yang sedang berkembang pesat saat ini.
- h. Keterbatasan akses terhadap perkembangan teknologi pertanian, modal usaha, sarana parasarana serta informasi pasar.
- i. Kompetensi penyuluh pertanian belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan produksi padi melalui intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi lahan minimal produksi GKP 5 persen per tahun, sehingga tingkat ketahanan pangan (energy) dapat tercapai.
- b. Mempercepat program aksi diversifikasi pangan dan sosialisasi panganekaragaman pangan sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi secara bertahap melalui pola berimbang, bermutu dan bergizi.
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi ke daerah marginal sehingga dapat meningkatkan percepatan distribusi pangan/akses pangan dengan biaya murah dan mudah.
- d. Melakukan intervensi rawan pangan, percepatan program cadangan pangan wilayah dan percepatan program desamandiri pangan diperluas disetiap desa, serta melakukan koordinasi secara periodik dengan Dolog dalam penanggulangan kerawanan pangan.
- e. Mempercepat Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), sehingga mampu mengurangi kemiskinan dipedesaan dan menyerap tenaga kerja dipedesaan secara optimal.
- f. Mempercepat revitalisasi Penyuluhan
- g. Penguatan kelembagaan penyuluhan, melalui program aksi pemberdayaan kelembagaan, yang diikuti dengan pendidikan dan latihan secara berjenjang dan berkala.

- h. Melakukan pengawasan makanan segar dan olahan secara berkala disentra-sentra produksi dan sentra konsumsi, serta melakukan pengawasan jajanan anak sekolah melalui Programe Food Inspector.

## XII. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan :

### 1. Program dan Kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penyelenggara urusan wajib melaksanakan 13 Program dan 43 Kegiatan pada tahun 2012 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kaltim pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kaltim pada tahun 2012 mendapat total anggaran sebesar Rp. 17.368.295.000,- dan Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.13.458.411.455,- Atau sebesar 77,49 persen.

#### a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan :

1. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
  - Capacity Building peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik tahun 2012.
  - Workshop/Capacity Building untuk eksekutif, legislatif dan LM pemerhati perempuan.
2. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
  - Sosialisasi UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan penanggulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- Rakor Pemberdayaan Perempuan dan KB se-Kaltim di Bontang.
  - Rakor Lintas Sektor (Peningkatan kapasitas SDM PPRG, Pertemuan Tim Teknis SKPD untuk PPRG, Sinergi, Evaluasi & Koordinasi LM Pemerhati Perempuan dan anak, Rakor menuju Kaltim Layak Anak)
- b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:
- Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan.
  - Penguatan gugus tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (EKSA), penguatan aplikasi SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM) pusat pelayanan terpadu.
  - Sosialisasi dan advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP).
  - Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
- c. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak :
1. Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perempuan.
    - Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG bagi perempuan.
  2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
    - Operasional P2TP2A
    - Sosialisasi P2TP2A
    - Penyusunan sistem pencatatan perlindungan perempuan
  3. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak.
    - Rakernis KLA, penyusunan pergub tentang percepatan Kaltim sebagai pengembang KLA, seminar dalam rangka HAN (Remaja Kaltim bebas HIV/AIDS), pertemuan forum anak daerah se-Kaltim 2012, peringatan rangkaian

- HAN (Hari Anak Nasional) 2012 dan pengukuhan balita sehat
4. Evaluasi pelaksanaan PUG
    - Evaluasi pelaksanaan PUG
    - Fasilitasi forum Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA).
    - Kompilasi data Pug
    - Penyusunan draft Pergub PUG
    - Penyusunan PPRG
    - Penyusunan naskah akademis Perda PUG
  5. Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
    - Penyusunan Bulletin BPPKB
  - d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan :
    1. Pembinaan organisasi perempuan.
      - Pengkajian pembangunan manusia berbasis gender.
      - Pengkajian ekonomi rumah tangga perempuan (ketahanan keluarga).
      - Pembinaan/Penilaian Peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS), Gerakan Sayang Ibu (GSI), KSI/Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) dan perusahaan pembina nakerwan 2012 di 14 Kab/Kota se Kaltim
    2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Pembinaan/Pengembangan Desa Prima Perempuan Indonesia Maju Mandiri dan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha)
    3. Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan.
      - Pameran (Kaltim Expo/Kaltim Fair)
  - e. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri:
    1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB/lomba posyandu.
  - f. Program Keluarga Berencana

1. Pembinaan keluarga berencana.
  - Fasilitas pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Prov. Kaltim tahun 2012
  - Orientasi penyuluh agama terhadap calon pengantin di PPU, Bontang dan Berau.
  - Lomba pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- g. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
  1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
    - Advokasi/konseling calon pengantin menuju keluarga bahagia dan sejahtera.
    - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk remaja pra nikah.
3. Permasalahan
  1. Badan PP dan KB merupakan badan yang baru dibentuk, sehingga masih perlu diadakan pembenahan baik sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor.
  2. Kualitas SDM yang masih sangat terbatas terutama sebagai fasilitator dan transfer informasi tentang PP dan PA dan tenaga spesifik lainnya (pelaksana keuangan, pelaksana perencanaan dan pranata computer, psikologi/psikolog)
  3. Kurangnya Staf atau pegawai Non Struktural yang hanya berjumlah 19 orang s.d tahun 2012 dan jumlah pejabat Struktural 14 orang sehingga ada beberapa pejabat eselon IV yang masih belum memiliki staf/pejabat pelaksana.
  4. Masih adanya kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara teknis dan terus menerus
  5. Pembinaan Kepegawaian/mutasi yang cepat di Kabupaten/Kota mengakibatkan pencapaian target tidak sebagaimana yang diharapkan

#### 4. Solusi

1. Mohon dapat difasilitasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
2. Penempatan PNS/Pejabat sesuai dengan Kualitas yang dibutuhkan dan memiliki latar belakang yang bersinergi dengan lembaga yang ada.
3. Penambahan PNS kurang lebih 20 orang sesuai kebutuhan dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - Psikolog/S1 Psikologi.
  - Pranata Komputer (2 orang).
  - Tenaga Akutansi/ S1 Keuangan.
  - Supir.
  - D1/D3 Kesehatan.
  - Administrasi lainnya
4. Secara bertahap mendiskusikan tentang pelaksana PP 38 tahun 2007 terutama masalah KB (Keluarga Berencana)
5. Himbauan kepada Kabupaten/Kota untuk tidak melaksanakan mutasi secara frontal (Bedol Desa) karena Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan issue baru yang memerlukan pemahaman dan sikap tindakan

### XIII. Urusan Wajib Perhubungan

Dinas Perhubungan, dengan :

#### 1. Program dan Kegiatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, telah menetapkan 22 Program dan 112 kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan.

#### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD SMK Pelayaran Kaltim serta UPTD Jembatan Timbang KM. 17 Karang Joang Balikpapan total alokasi anggaran sebesar Rp. 591.430.615.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.845.319.000,- dan Belanja Langsung Rp. 583.585.296.000,-. Untuk Belanja Langsung yang dikelola pada SKPD Dinas Perhubungan (Non UPTD) sebesar Rp. 493.585.296.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 424.980.777.321,- atau sebesar 86,10%.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1). Terselenggaranya administrasi perkantoran
  - 2). Tersedianya jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3). Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah
  - 4). Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1). Tersedianya peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Prasarana Aparatur
  - 1). Tersedianya pakaian seragam pegawai guna meningkatkan disiplin pegawai
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1). Terdidiknya pegawai sesuai kompetensi yang diperlukan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
  - 1) Tersusunnya dokumen LAKIP, Renja, LKPD, Laporan Tahunan
  - 2) Tersusunnya dokumen keuangan
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - 1) Tersusunnya dokumen perencanaan studi review DED Dermaga Maratua Kab. Berau
  - 2) Tersusunnya dokumen perencanaan studi jaringan transportasi jalan angkutan penumpang tidak dalam trayek Samarinda-Balikpapan
  - 3) Tersusunnya studi lokasi pengganti Jembatan Timbang Km. 17 Karang Joang Balikpapan
  - 4) Tersusunnya kebijakan, norma, standar perhubungan berupa Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Umum untuk angkutan batu bara dan hasil perkebunan kelapa sawit dan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang Tataran Transportasi Wilayah Kalimantan Timur
  - 5) Terlaksananya kegiatan Rakornis Perhubungan se Kalimantan Timur di Kab. Bulungan



- 6) Tersusunnya dokumen kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan
- 7) Terkelolanya fasilitas VIP Bandara Temindung
- g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - 1) Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu, marka dan pagar pengaman pada ruas jalan Provinsi
- h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - 1) Bertambahnya tingkat kesadaran sopir/juru mudi kendaraan umum dalam berlalu lintas
  - 2) Meningkatnya tingkat disiplin masyarakat pengguna angkutan umum
  - 3) Terkendalinya tingkat disiplin angkutan umum di jalan raya
  - 4) Tersusunnya laporan analisis data base layanan angkutan (LHR)
  - 5) Terpilihnya sopir/juru mudi angkutan umum teladan (AKUT)
  - 6) Terlaksananya forum LLAJ
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1) Terlaksananya pembayaran pengelola kegiatan sesuai ketentuan
- j. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - 1) Tersedianya fasilitas apron konstruksi sarang laba-laba luas 1.444 m<sup>2</sup>
  - 2) Tersedianya fasilitas sisi darat (bangunan teknis, gedung terminal, gedung penunjang) dan fasilitas sisi udara Bandara Samarinda Baru (pematangan tanah untuk apron)
  - 3) Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana SDP (dermaga sungai Tana Tidung dan rehabilitasi bangunan pelabuhan penyeberangan Kariangau Balikpapan)
  - 4) Bertambahnya panjang landasan Bandara Long Bawan
  - 5) Bertambahnya panjang landasan Bandara Long Ampung dan berkurangnya obstacle
  - 6) Bertambahnya panjang landasan Bandara Data Dawai Kab. Kutai Barat

- 7) Berkurangnya obstacle Bandara Kalimantan Kab. Berau
  - 8) Tersedianya fasilitas sisi udara Bandara Maratua Kab. Berau (Runway) konstruksi aggregate (CBS)
  - 9) Terbangunnya fasilitas sisi darat (bangunan workshop) Pelabuhan Laut Maloy Teluk Golok Kab. Kutim
  - 10) Terbangunnya moring dholphin dan pemagaran serta pengecatan gedung terminal PLBL Lamijung Kab. Nunukan
  - k. Program Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
    - 1) Terpasangnya rambu-rambu jalan sebanyak 865 buah
    - 2) Terpasangnya marka jalan sepanjang 50.000 m dan paku marka sebanyak 1.150 buah pada ruas jalan provinsi
    - 3) Terpasangnya pagar pengaman jalan sepanjang 1.324 m pada ruas jalan provinsi
3. Permasalahan dan Solusi
- a. Permasalahan
    - 1). Kurang konsistennya Team TAPD dan pihak SKPD dalam penyelesaian data dukung terkait dengan usulan program/kegiatan
    - 2). Lambatnya proses administrasi terkait legalitas Pengelola Kegiatan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
    - 3). Lambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
    - 4). Aksesibilitas ke lokasi kegiatan
    - 5). Rendahnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara terpadu dan berkesinambungan
    - 6). Rendahnya pelaksanaan pengendalian dilapangan oleh Pengelola Kegiatan
    - 7). Sosial masyarakat, berupa aksesibilitas ke lokasi masih milik masyarakat dan terdapat areal yang masih dalam status kepemilikan oleh masyarakat
  - b. Solusi
    - 1). Team TAPD dan pihak SKPD harus konsisten terkait dengan data dukung usulann kegiatan

- 2). Legalitas SK Pengelola Kegiatan, Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus di proses dan disyahkan sejak awal bulan pada tahun anggaran berjalan
- 3). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa harus di lakukan pada awal tahun berjalan minimal bulan Maret tahun berjalan harus sudah terkontrakkan
- 4). Pihak SKPD Pengusul kegiatan harus betul-betul memahami kondisi rencana lokasi kegiatan, dan diharapkan pada saat pelaksanaan sudah tidak terjadi masalah kesulitan aksesibilitas oleh pihak pelaksana kegiatan (Penyedia Barang/Jasa)
- 5). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan harus dilakukan secara terkendali dan terpadu (Inspektorat, Team TAPD dan SKPD)
- 6). Pihak Pengelola Kegiatan (PPTK dan atau KPA) harus memahami dan konsisten dalam pelaksanaan tugas
- 7). SKPD dan Team TAPD harus benar-benar konsisten terkait status kepemilikan lahan yang akan di alokasikan untuk kegiatan pembangunan

#### XIV. Urusan Komunikasi dan Informatika

##### a. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan :

##### 1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang Komunikasi dan informatika tahun 2012 sebanyak 17 program dan 56 kegiatan.

##### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012 melalui APBD Provinsi Kaltim mendapat alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.28.905.600.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.425.565.000,- sehingga total Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 34.331.165.000,- Adapun realisasi anggaran Tahun 2012 sebesar

Rp.20.587.666.745,- atau 59,97% dan realisasi fisik sebesar 65,09%.

- 1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa:
  - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi, berupa pengembangan jaringan IT di 14 Kabupaten/Kota.
- 2) Program peningkatan/pengembangan aparatur di bidang telematika:
  - Sosialisasi/Seminar dan Penilaian Penguasaan dalam Rangka Peningkatan E-Govt berupa Sosialisasi yang diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- 3) Program perencanaan pembangunan informasi dan komunikasi:
  - Operasional pelaksanaan E-Govt sekretariat E-Proc berupa Sosialisasi dan pelatihan kepada SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi sebanyak 54 SKPD.
- 4) Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika:
  - Pengembangan/Pembenahan/Aplikasi Website SKPD di Prov. Kaltim berupa pengembangan website 54 SKPD Provinsi Kaltim.
- 5) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi :
  - Pembinaan Standarisasi Aplikasi/Software Legal berupa pembinaan software legal di 14 Kabupaten/Kota.
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo:
  - a. Pembinaan/Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim berupa sosialisasi terhadap penyelenggara jasa titipan di 3 Kabupaten/Kota.

### 3. Permasalahan dan Solusi

- Kurang memadai Sarana dan Prasarana  
Kurangnya sarana dan prasarana terutama untuk sektor pos dan telematika adalah masalah mendasar yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur,

terutama yang tinggal didaerah terpencil dan atau di wilayah perbatasan. Permasalahan ini antara lain adalah :

- 1) Belum semua desa tersedia layanan pos ;
- 2) Belum semua desa tersedia layanan telekomunikasi ;
- 3) Belum semua desa tersedia layanan radio atau televisi;
- 4) Belum semua desa tersedia layanan internet/komunikasi data.

Adanya permasalahan ini adalah akibat dari belum tersedianya kantor pos, jaringan telematika serta pemancar radio/swasta di semua desa/kelurahan di Kalimantan Timur selain itu permasalahan yang juga masih menjadi kendala adalah sumberdaya manusia. Masalah SDM ini adalah masalah klasik, namun selalu muncul dan berdampak cukup serius, dalam bidang komunikasi dan informatika masalah SDM dialami tidak saja oleh masyarakat, namun juga oleh instansi pemerintah.

- Masalah SDM

- 1) Penduduk yang tinggal didaerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- 2) Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- 3) Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- 4) Kurangnya Informasi sebagai akibat tidak terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Salah satu dampak dari otonomi daerah adalah terjadinya keterlambatan dalam alih informasi antara pusat dan daerah. Di era Kanwil, aparat kanwil secara rutin menerima diklat dan bimtek, baik dalam bidang administrasi, maupun teknis. Setelah onotomi daerah, diklat dan bimtek oleh pusat mengalami penurunan drastis. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kemampuan teknis antara aparatur pusat dengan daerah, karena aparat teknis yang ada di daerah

umumnya adalah yang berasal dari kanwil, dan banyak yang sudah memasuki masa pensiun.

Pembangunan jaringan telekomunikasi dan telematika bisa menggunakan satelit atau terrestrial (BTS). Mengingat luasnya wilayah, maka menggunakan salah satu cara di atas tetap memerlukan biaya tinggi bila ingin mengembangkan jaringan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Untuk mengembangkan jaringan perlu biaya besar. Perusahaan penyelenggaraan jaringan tentunya hanya bersedia mengembangkan jaringan bila dianggap menguntungkan. Sedikitnya jumlah penduduk tentunya menjadikan sedikitnya pengguna jasa, dan hal ini tidak menguntungkan bagi segi bisnis karena besarnya modal yang harus saya diinvestasikan sementara keuntungan sangat kecil.

- Banyak area yang blank spot (uncoverage area)  
Wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar merupakan pengunungan yang tertutup oleh hutan lebat. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara telekomunikasi dan telematika bila sarana yang digunakan menggunakan frekuensi radio. Sinyal frekuensi radio tidak bias menembus bukit atau hutan yang lebat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (blank spot).
- Integrasi dan Interoperability Jaringan  
Suatu sistem jaringan telekomunikasi maupun suatu sistem jaringan informatika tidak mudah untuk diintegrasikan dengan sistem jaringan yang lain. Salah satu sebabnya adalah interoperability dari jaringan yang akan diintegrasikan.  
Banyak Kabupaten atau Kota yang telah membangun sendiri, standar, prosedur dan sistem jaringan informatika untuk daerahnya. Mengingat tidak semua Kabupaten/Kota menggunakan standar, prosedur dan sistem jaringan yang sama maka akan muncul permasalahan bilam mana ingin mengintegrasikan jaringan-jaringan ini.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada sistem jaringan yang terhubung dengan jaringan pemerintah pusat. Setiap departemen pusat. Setiap departemen pusat memiliki standar dan prosedur sistem jaringan sendiri, dan sistem ini belum tentu interoperability satu sama lain.

Tugas dan kewenangan suatu dinas umumnya diatur dalam suatu peraturan daerah sendiri. Mengingat Dinas Kominfo masih baru, maka belum ada peraturan daerah tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kalimantan Timur, selain itu bila mana Dinas Kominfo memiliki kewenangan untuk menarik retribusi, tentunya perlu adanya Perda retribusi bidang kominfo. Pada tahun 2008 terbit undang-undang yang berhubungan dengan bidang kominfo, yakni Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Tentunya kedua Undang-undang ini perlu dijabarkan dalam suatu peraturan pemerintah. Untuk implementasinya di daerah, perlu disusun peraturan daerah mengenai ITE dan KIP ini.

b. Sekretariat KPID

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebanyak 9 program dan 22 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tahun Anggaran 2012 melalui APBD Provinsi Kaltim mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.796.618.000,- Adapun realisasi anggaran yang dialokasikan melalui dana APBD Provinsi Kaltim tanggal 31 Desember 2012, dengan realisasi keuangan sejumlah Rp. 3.368.970.384,- atau (88,74 persen).

7) Program

a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi pengembangan perencanaan dalam rangka pengembangan industry penyiaran.

- b. Penyediaan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi dan kerjasama dalam bidang penyiaran.
- c. Evaluasi atas pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran.
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, simplikasi dalam mendukung penyelenggaraan siaran.
- e. Pengklasifikasi standarisasi usaha jasa dan sarana dengan kerjasama secara terpadu.
- f. Pemutakhiran data kurasi data/informasi obyek siaran. Usaha jasa dan sarana penyiaran.
- g. Pelaksanaan sosialisasi melalui, media cetak maupun elektronik.
- h. Peningkatan pelayanan prima.
- i. Peningkatan kualitas dan profesional sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Kegiatan

- a. Terlaksananya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), dengan memberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) terhadap izin yang diajukan masyarakat.
- b. Terlaksananya Dialog Publik dan Sosialisasi UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di 14Kab/Kota.
- c. Terlaksananya administrasi dan penyusunan sistem/pola penyiaran di daerah.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang penyiaran.
- e. Meningkatkan pertumbuhan industry penyiaran di daerah, dengan memberikan kemudahan dan peluang usaha di bidang penyiaran.

## 3. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

1. Urusan perizinan penyiaran merupakan urusan paling rumit dan banyak seleksi dan verifikasi paling tidak 9 pintu kegiatan atau verifikasi dari Dinas Komunikasi dan Infomatika Prov. Kaltim dan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota dan KPID Daerah Prov. Kaltim terakhir ke KPI Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika disitu ada yang namanya Fra Rapat Bersama, baru Rapat bersama antara KPI Daerah, KPI Pusat dengan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menerbitkan Izin Penyelenggara Penyiaran, Jadi tidak heran kalau IPP ini bisa bertahun-tahun baru terbit. Solusi diharapkan pemohon yang ingin mengajukan IPP Administrasi berkas harus diteliti jangan sampai kekurangan berkas.

2. Kegiatan Sosialisasi di 14 kabupaten kota paling tidak 3 tahun baru selesai mengingat dana terbatas, juga waktunya, saat ini baru 5 Kabupaten/Kota dan provinsi telah dilaksanakan, diharapkan untuk tahun tahun mendatang bisa naik anggaran untuk KPID.
3. Kegiatan pemantauan atas isi siaran tidak maksimal karena di Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur belum ada alat CCTV sebagai alat pemantau isi siaran.

Solusi :

1. Dukungan dana anggaran yang memadai akan sangat membantu pencapaian program KPID Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemilihan Anggota Komisiner KPID Provinsi Kalimantan Timur dan pemilihan pegawai Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur yang cukup profesional dalam mendukung jalannya program kerja dari KPID itu sendiri.
3. Dukungan dari berbagai instansi terkait yang maksimal dalam pembangunan penyiaran di Kalimantan Timur.

#### XV. Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri,

##### a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan :

##### 1. Program dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan sinergi pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, guna mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 11 program dan 44 kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, yaitu sebesar Rp.17.098.343.000,- dan realisasi Rp.15.009.803.853,- dengan capaian kinerja 87,79 persen.

### a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di daerah perbatasan.
- Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama.
- Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di perbatasan.

### b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

- Pembauran bagi generasi muda, pelajar, dan pramuka

### c. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) :

- Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- Deteksi dini / kewaspadaan dini.
- Penyuluhan yang berkaitan dengan ketertiban, ketentraman masyarakat tentang rawan bencana dan rawan konflik.

### d. Program pendidikan politik masyarakat :

- Fasilitasi / penelitian berkas bantuan partai politik
- Penyuluhan kepada masyarakat.
- Koordinasi forum-forum diskusi politik.
- Penyusunan data base partai politik, orpol, ormas, LSM dan lembaga adat.
- Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur.

- Kerjasama dengan ormas/LSM di bidang Kesbangpol.
- e. Program ketahanan sosial ekonomi :
  - Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga
  - Pemantauan dampak kebijakan perekonomian.
  - Pengawasan peredaran uang palsu
  - Cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen

b. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2012 menetapkan 7 program dan 33 kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dan merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan yang nyata, program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, yaitu sebesar Rp.14.236.169.000,- dan realisasi Rp.12.704.105.630,- dengan capaian kinerja 89,24 persen.

a. Program :

- 1) Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.

b. Kegiatan

- 1) Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi aparat Satpol PP Prov. Kaltim.
- 2) Pelatihan mental dan fisik bagi anggota Satpol PP.
- 3) Orientasi dan sosialisasi fungsi Satpol PP pada SKPD lainnya.
- 4) Penegakan Peraturan Daerah (PERDA).
- 5) Pengawasan dan pengamanan aset Pemda.
- 6) oordinasi pelaksanaan Trantibum.

- 7) Penyelenggaraan Trantibum.
- 8) Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali).
- 9) Pelaksanaan Hari Bhakti Satpol Pamong Praja se Kaltim.
- 10) Peningkatan operasional penanganan perlindungan masyarakat.
- 11) Pelaksanaan Hari Bhakti Linmas.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Perkembangan Realisasi fisik dan realisasi keuangan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 secara keseluruhan telah mencapai keuangan sebesar Rp.12.704.105.630,- fisik 89,24 persen dari alokasi dana sebesar Rp.14.236.169.000,- yang menurut target sampai dengan 31 Desember 2012 harus mencapai target 100 persen hal ini disebabkan :

- a. Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat kendala yang sangat serius perlu diatasi segera yaitu permasalahan sumber daya aparatur yang keberadaan baik kuantitas maupun kualitas memang sangat terbatas, terutama SDM aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga dalam perjalanannya kepanitiaan pengadaan barang dan jasa tersebut harus menggunakantenaga dari luar SKPD Satpol PP.
- b. Untuk merealisasikan program dan kegiatan yang berkenaan dengan penegakan Perda belum dapat dilaksanakan secara optimal karena SDM aparatur yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum dapat terpenuhi mengingat standar kompetensi atau beberapa hal yang dipersyaratkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
- c. Uang Persediaan yang kurang dari aliran Kas baik Triwulan maupun bulanan sehingga akan sulit dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya paket, hal ini akan berakibat tertundanya kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.
- d. Diperlukan untuk sesegera mungkin pemenuhan terhadap kebutuhan jumlah personil yang memiliki

kualitas serta kompetensi yang sesuai dan peningkatan profesionalisme bagi aparaturnya Satpol PP Provinsi Kaltim.

- e. Untuk mendukung kegiatan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Prov. Kaltim, maka sangat diperlukan adanya peningkatan sarana maupun prasarana yang telah ada.

Terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban, beberapa hal telah dilakukan seperti :

1. Penanganan unjuk rasa pada tahun 2012 yang terjadi sebanyak 16 kali kejadian, adapun tindakan yang dilakukan adalah membantu memfasilitasi/mediasi terhadap pejabat yang akan ditemui atau diminta oleh pengunjuk rasa, menjaga keamanan dan ketertiban agar kegiatan unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan aman dan tertib/tidak menimbulkan anarkis, serta membantu penanganan arus lalu lintas, dengan berbagai permasalahan/aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa antara lain :

- Penyelesaian secara tuntas kasus-kasus pertanahan.
- Penarikan mundur TNI/Polri dari daerah konflik.
- Pencabutan Permen No. 17 Tahun 2005 yang dianggap menyengsarakan rakyat.
- Pencabutan regulasi yang mendiskriminasi perempuan.
- Tuntutan kenaikan upah buruh hingga 100 persen.
- Penolakan terhadap kenaikan BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik).
- Adanya Perda tentang pemberian cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh tanpa adanya pengurangan gaji.
- Peningkatan kesejahteraan upah dan jaminan keselamatan kerja untuk buruh perempuan.
- Stop PHK Buruh yang sedang hamil/melahirkan karena alasan reproduksi.
- Stop kekerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan.
- Naikan pajak kendaraan dan jalan Tol.
- Perbaikan terhadap kerusakan lingkungan.

- Penambahan kuota BBM.
  - Stop penambangan Batubara.
  - Pembatalan lelang dan sengketa tanah disamping Islamic Center.
  - Kejar masalah arbitrase.
  - Musnahkan korupsi di Kaltim.
  - Perbaiki infrastruktur jalan.
  - Pemberian kesejahteraan kepada masyarakat miskin.
2. Penanganan kebencanaan/pemadaman kebakaran, yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 15 kali kejadian kebakaran. Adapun tindakan yang dilakukan adalah membantu suplay air, penanganan arus lalu lintas dan membantu mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang semuanya dapat dilakukan dengan aman dan tertib.
3. Pengamanan Aset, Penertiban dan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI), pada tahun 2012 dilakukan sebanyak 43 kali dengan rincian sebagai berikut :
- Pengamanan aset dilakukan terhadap 3 rumah dinas 2 kantor dan 1 rumah pribadi Gubernur.
  - Penertiban dilakukan 3 kali, seperti membantu pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pembongkaran bangunan tambahan di sepanjang kawasan rest area kilometer 53 jalan poros Samarinda – Balikpapan.
  - Pembongkaran dan pembersihan Pedagang Kaki Lima (PKL) dikawasan Citra Niaga Selatan.
  - Pengawalan/Pengamanan kegiatan Gubernur Kalimantan Timur Sebanyak 38 kegiatan antara lain; pertemuan Tim dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada dikawasan Tahura, Kunjungan Gubernur Kaltim dalam rangka peninjauan pembangunan PLTGB di Kutai Timur, Kunjungan Kerja Menteri Pertahanan dan Gubernur Kaltim di Kutai Kartanegara, Pengamanan peletakan batu pertama pembangunan terminal Bandara Samarinda Baru (BSB), Pengamanan kegiatan Car Free Day setiap hari minggu.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2012 menetapkan 10 program dan 36 kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dan merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan yang nyata, program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dengan dibentuknya APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun Anggaran 2012 mendapat Pagu Anggaran Belanja Langsung APBD (Januari s.d Desember 2012) pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.14.546.940.000,- dan dapat terealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 11.979.854.285.285, capaian kinerja 82,35 persen.

- Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan serta mengembangkan sains (Pengetahuan) teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan membuat serta memperluas kerjasama dengan LSM, Ormas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana.
- Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana melalui media
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan BPBD, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun pembelajaran, agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
- Mendayagunakan kapasitas yang ada dan sarana prasarana yang tersedia untuk promosi kegiatan penanggulangan bencana.

- Menganalisis data dan informasi dan resiko yang ada untuk mengkaji perubahan kondisi sosial ekonomi yang dapat berdampak negatif atau yang menimbulkan bencana. Untuk mendukung kebijakan penanggulangan bencana, program prioritas yang akan dicapai adalah :
- Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- Pencegahan dini dan prabencana.
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur penanggulangan bencana.
- Pengembangan sistem tanggap darurat bencana dan logistik.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

- a. Luasnya cakupan dalam penanggulangan bencana.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten/ Kota.
- c. Minimnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
- d. Terbatasnya SDM yang profesional di setiap Kabupaten/Kota.
- e. Belum semua regulasi penjabaran dari UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah ditetapkan.
- f. Belum adanya SOP dalam penanggulangan bencana.
- g. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

#### Solusi:

- a. Perlunya penambahan sarana dan prasarana serta alokasi dana yang bersumber dari pusat ( APBN) dan dari daerah (APBD).
- b. Perlunya dukungan dan perhatian dari pemerintah untuk memenuhi keterbatasan ini melalui



program-program Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

XVI. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,  
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,

a. Biro Humas dan Protokol, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Biro Humas dan Protokol pada tahun 2012 telah melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, dengan total anggaran sebesar Rp. 16.256.000.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 14.724.224.020,- dengan progres 90,58 persen.

b. Biro Sosial, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Biro Sosial pada tahun 2012 telah melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, dengan total anggaran sebesar Rp. 7.325.000.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.458.254.005,- dengan progres 88,17 persen.

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

- a. Terlaksananya kegiatan Orientasi Pemuka/Tokoh Agama se Kalimantan Timur kemasyarakatan lainnya dalam bertujuan mengoptimalkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh;

- b. Meningkatnya kemampuan dan kualitas Da'i/Khotib Muda dalam berdakwah kepada masyarakat;
  - c. Terlaksananya kegiatan silaturahmi para Pemuka dan Tokoh Agama Provinsi Kalimantan Timur sehingga mendorong kerukunan antar umat beragama;
  - d. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji Kaltim sehingga dapat diketahui hasil evaluasi dan monitoring sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tahun mendatang.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- a. Tersusunnya Laporan-laporan kinerja untuk mengukur kinerja Biro Sosial tahun 2012 yang dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Tahunan;
  - b. Tersusunnya data kepegawaian dan arsip yang semakin baik;
  - c. Meningkatkan mutu pelayanan secara maksimal terhadap pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Sosial, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara perorangan maupun melalui lembaga kemasyarakatan lainnya dalam bertujuan mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.
  - d. Terselenggaranya kegiatan Rakor Kelembagaan Masyarakat se Kalimantan Timur sehingga diketahui kegiatan/program yang dilaksanakan Kabupaten/Kota mengenai pembinaan kepada Kelembagaan Masyarakat;
  - e. Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dan Berkewarnegaraan;
  - f. Terselenggaranya Rakor / Seminar Pembinaan Kepemudaan se Kaltim dalam hal pemahaman para pemuda tentang HIV/AIDS;

- g. Terselenggaranya Rakor / Sosialisasi Keolahragaan se-Kaltim dalam hal peningkatan sistem keolahragaan;
- h. Meningkatnya kesadaran terhadap kegiatan olahraga diantara SKPD dan Masyarakat.
- i. Terselenggaranya Rakor Program Penanggulangan Kesehatan, HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya;
- j. Terselenggaranya Sosialisasi Penanggulangan Kanker Bagi Masyarakat;
- k. Terselenggaranya Sosialisasi Peringatan Hari AIDS se - Dunia;
- l. Terselenggaranya Sosialisasi HIV/AIDS ke Lokalisasi Kabupaten/Kota;
- m. Terselenggaranya Rakor Program Jamkesmas Provinsi Kaltim;
- n. Terselenggaranya Penilaian Tenaga Kesehatan dan Puskesmas Teladan;
- o. Terselenggaranya Rakor Program Bidang Kesehatan

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

- 1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian dokumen anggaran (DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
- 2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Pegawai yang memenuhi kualitas yang diharapkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada;
- 3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Biro Sosial, sistem informasi tentang usulan permohonan hibah dan bantuan sosial, ruang kerja yang masih sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan Arsip, ATK dan

Barang Milik Daerah, serta belum tersosialisasikannya Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Solusi :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan penyesuaian anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS yang selektif, pembinaan, pendidikan dan pelatihan maupun kursus-kursus yang sifatnya teknis;
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kerja dan perkantoran, demikian pula perlunya Standard Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi surat-menyerat kedinasan, hibah dan bantuan sosial, serta pembenahan/pengelolaan kearsipan;
4. Perlu segera mensosialisasikan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perlunya merancang/mendesain Rencana Strategis (Renstra) Biro Sosial Setda Prov. Kaltim dengan melihat kondisi perkembangan internal dan eksternal di Lingkungan Strategis, serta beradaptasi Rencana Strategis Pemprov. Kalimantan Timur 2014-2018. Perlunya pemanfaatan informasi teknologi guna peningkatan pelayanan dan sebagai data pendukung.

c. Biro Umum, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 8 program dan 33

kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 sebesar Rp.120.530.201.000,- realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.104.598.587.275,- dengan progres 86,78 persen.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dijumpai kelemahan dan permasalahan yang harus ditekan serendah mungkin, yaitu antara lain :

- a. Belum efektifnya system dan mekanisme koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran di lapangan.
- b. Banyaknya kegiatan dan acara yang tidak terjadwal dan sulit untuk diprediksi.
- c. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan / acara Pemerintah Daerah.
- d. Distribusi SDM belum sesuai kompetensi pada masing-masing bidang.
- e. Tidak adanya pos anggaran yang dapat mengakomodir keperluan Pimpinan Daerah yang sifatnya mendadak.

Solusi

Peningkatan system mekanisme pelaksanaan perencanaan anggaran dapat mengakomodir keperluan bersifat urgen.

- a. Peningkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
- b. Peningkatan koordinasi kegiatan/acara yang tidak terjadwal dengan instansi terkait.
- c. Optimalisasi realisasi sesuai target capaian yang telah ditetapkan.

d. Biro Organisasi, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Program Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 adalah sebanyak 4 program dengan 25 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Biro Organisasi mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.5.463.800.000,- terdiri dari APBD murni Rp.4.495.000.000,- dan tambahan dalam APBD-P Rp.968.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.765.053.014,- atau sebesar 87,21 % dengan sisa dana yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp.698.746.986,- (12,79%). Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun Output yang dihasilkan pada pelaksanaan, dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, dan pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain :

1. Program Program Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah :

a) Terlaksananya Penyusunan kebijakan system dan prosedur pelayanan sektor publik dan mekanisme prosedur kerja.

- Ditetapkannya Pergub Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

b) Terlaksananya Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik

- Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Fasiltiasi Standar Pelayanan ke beberapa SKPD.

c) Terlaksananya Reformasi pelayanan sektor publik

- Ditetapkannya Pergub Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
- Laporan Tahunan Provinsi Kaltim Ke Ditjen OTDA Kemendagri.
- d) Terlaksananya Pelaksanaan penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Unit penyelenggaraan pelayanan.
- e) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dan ketatalaksanaan.
  - Menghasilkan suatu rekomendasi permasalahan pelaksanaan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Kaltim.
- f) Terlaksananya Optimilasi pelayanan sektor publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
  - Optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan website dilingkungan Setda Prov. Kaltim.
- g) Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Penataan lembaga lain
  - Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2012 tentang Grand Design dan Road Map Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Provinsi Kaltim
  - Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
- h) Terlaksananya Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan
  - Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standardisasi dan Desain Kelembagaan SKPD
- i) Terlaksananya Penataan Sistem Organisasi
  - Draf Peraturan Gubernur tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kaltim
- j) Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan SOTK Kab/kota

- Inventarisasi produk hukum tentang SOTK kab/kota se Kalimantan Timur
  - k) Terlaksananya Penataan dan pendayagunaan aparatur.
    - Draft Pergub tentang Anjab, ABK serta JFT dan JFU.
    - Tersedianya Formasi pegawai JFT dan JFU.
  - l) Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan analisis jabatan dan ABK.
    - Terlaksananya pelaksanaan Anjab dan ABK pada SKPD dan Kabupaten Kota se-Kaltim.
  - m) Terlaksananya Pengembangan budaya kerja aparatur.
    - Menyusun Pergub Pedoman Penerapan Budaya Kerja Aparatur dengan Nomor 86 tahun 2012.
  - n) Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pengembangan budaya kerja Aparatur di Kab/kota.
    - Terlaksananya Budaya Kerja pada SKPD dan Kabupaten Kota se-Kaltim.
  - o) Terlaksananya Koordinasi teknik lanjut pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan.
2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja :
- a. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
    - Pelaksanaan Bimtek/Asistensi Penerapan dan Pengembangan SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - b. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
    - Tersusunnya laporan LAKIP Provinsi, LAKIP Setda, Penetapan Kinerja Provinsi, Penetapan Kinerja Setda, Rencana Kinerja Tahunan Provinsi dan Rencana Kinerja Tahunan Setda.
  - c. Binwas pengembangan dan Penerapan SAKIP.
    - Pembinaan dan Pengawasan dalam penerapan SAKIP pada Kabupaten/Kota.
  - d. Evaluasi kinerja Organisasi Pemerintah.



- Fasilitas dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  - 3. Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004
    - a. Pelaksanaan Penerapan Tata Pemerintahan yang baik.
      - Penyusunan Rencana Aksi Tata Pemerintahan yang baik sesuai MOU antara Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
    - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur
      - Draft Road Map Reformasi Birokrasi.
      - Pencanangan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  - 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan
- Dalam rangka melaksanakan tugas penataan organisasi, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2012 terdapat beberapa permasalahan antara lain :
- a. Kurang optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja.
  - b. Kurangnya kualitas manajemen pelayanan publik.
  - c. Terbitnya PP No. 38 Tahun. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengakibatkan terjadi perubahan mendasar pada perumpunan urusan yang ditangani oleh OPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diwadahi dalam suatu SKPD berbetuk Dinas atau LTD.

- d. Kurang sinkronnya kondisi real kelembagaan OPD Pemerintah Prov. Kaltim yang ada dengan terbitnya PP No. 41 Thn. 2007.
- e. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim.
- f. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim.
- g. Belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Setda Prov. Kaltim.

#### Solusi

Dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja perlu adanya kegiatan :

- a. Optimalisasi penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik, perlunya kegiatan :
  - 1. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - 2. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Kompetisi Daerah.
  - 3. Penerapan SPM.
- c. Penataan Sistem Organisasi.
- d. Penataan dan Evaluasi Kelembagaan.
- e. Meningkatkan Penataan dan Pendayagunaan Aparatur perlu adanya kegiatan :
  - 1. Analisis Jabatan.
  - 2. Analisis Beban Kerja.
  - 3. Penyusunan Informasi Jabatan (Peta Jabatan)
  - 4. Formasi Jabatan JFU (Jabatan Fungsional Umum) dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu).
  - 5. Pengembangan Budaya Kerja.
- f. Penerapan dan Pengembangan Sistem AKIP.
- g. Optimalisasi Pengelolaan atau Pemanfaatan Website dilingkungan Setda Prov. Kaltim.

e. Biro Pembangunan Daerah,dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2012 Biro Pembangunan Daerah telah melaksanakan 4 program dan 6 kegiatan.

1) Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan

- a. Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan administrasi program pembangunan daerah.
- b. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengendalian program kerja pembangunan.
- c. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi pelaporan pembangunan

2) Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan serta pengadaan barang/jasa melalui elektronik (E-Procurement).

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Biro Pembangunan Daerah mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.069.256.120,- atau sebesar 93,02 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengendalian pembangunan, peningkatan sumber daya aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2012 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Ketersediaan dana yang kurang memadai untuk menunjang tupoksi;
- b. Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota dikarenakan pengendalian dan evaluasi dilapangan tidak maksimal disebabkan alokasi anggaran yang terbatas.
- c. Kurang memadainya ruang LPSE, hanya tersedia untuk ruang administrasi dan ruang verifikasi, belum tersedia ruang bidding (tempat penyedia barang/jasa memasukkan penawaran) dan ruang pelatihan termasuk untuk menerima tamu dalam rangka bimbingan teknis sehingga menjadi kendala untuk memfasilitasi lebih baik lagi terhadap pengguna LPSE;
- d. Perangkat jaringan internet pendukung LPSE berupa bandwidth yang terpasang baru 4 Mb (sewa per tahun). Sekurang-kurangnya untuk memberikan layanan yang lebih baik bandwidth yang terpasang 10 Mb agar dapat diakses oleh pengguna yang sulit terjangkau jaringan LPSE Kaltim. Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas bandwidth sekurang-kurangnya sebesar 10 Mb pertahun. Alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp.1 Milyar.

f. Biro Perekonomian,dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2012 Biro Ekonomi telah melaksanakan 3 program dan 4 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Biro Perekonomian mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.4.800.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.150.889.597,- atau sebesar 86,47 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun

tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

3. Permasalahan dan Solusi

Percepatan pembangunan pada bidang ekonomi, akan berdampak pada perubahan lingkungan yang signifikan, oleh karenanya diperlukan fasilitasi dan sinergi terhadap setiap kegiatan pembangunan di daerah Kaltim. Usaha untuk mewujudkan pelayanan public secara prima diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan bertanggungjawab sebagai unsur Aparatur Negara dan abdi masyarakat, sehingga tugas pemerintah dan pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dan optimal yang tanggap terhadap perubahan lingkungan dan berpandangan kedepan.

g. Biro Hukum, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2012 Biro Hukum telah melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan:

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Biro Hukum mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.5.700.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.415.987.300,- atau sebesar 95,02 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum, dokumentasi dan

informasi hukum selama tahun anggaran 2012 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Kurang tersedianya sarana teknologi informasi dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Belum tersedianya kendaraan operasional lapangan;
- c. Koordinasi untuk mencari bukti/surat tertulis dengan instansi/tergugat untuk dijadikan bahan pembuktian dalam persidangan di pengadilan, sering terkendala karena bukti sudah tidak ada/hilang.
- d. Perda dan peraturan Bupati/Walikota masih belum sepenuhnya disampaikan ke Biro Hukum Setda Prov Kaltim ;
- e. Masih ada Kabupaten yang belum memenuhi pembuatan Peraturan Daerah dalam rangka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sampai dengan Bulan Januari 2012;
- f. Masih kurangnya personil yang memahami teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- g. Kurangnya Perhatian SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mendukung program legislasi daerah (Prolegda) dengan menyampaikan Raperda kepada Biro Hukum;
- h. Sering berubahnya susunan personil panitia/tim yang dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur, sehingga proses penetapan Keputusan Gubernur menjadi relatif lama.

Solusi :

- a. Dalam pemberian dokumentasi dan informasi hukum, untuk sementara masih menggunakan sarana yang tersedia.
- b. Dalam melaksanakan operasional Biro Hukum untuk sementara masih menggunakan kendaraan dinas Kepala Biro/Kabag dan kendaraan pribadi.
- c. Dalam persidangan dipengadilan, bukti tidak disertakan.
- d. Sudah disampaikan Surat edaran Gubernur kepada seluruh Bupati/Walikota agar menyampaikan Perda

dan Peraturan Kepala Daerah ke Pemerintah Provinsi untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh SKPD agar menyampaikan prolegda setiap tahun terutama Raperda kepada Biro Hukum untuk dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur setiap tahun.
- f. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh SKPD agar menyampaikan penyusunan personil tim/panitia pada keputusan Gubernur tidak berubah-ubah.
- g. Dalam mempercepat proses pelaksanaan evaluasi Biro hukum melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung.
- h. Dalam mempercepat proses pembahasan Biro Hukum melakukan komunikasi dan kordinasi secara langsung.
- i. Diadakan setiap tahun Rakor Biro Hukum se Kaltim.
- j. Masih perlu diadakan bimtek setiap tahun untuk Kabupaten/Kota se Kaltim
- k. Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

h. Biro Perlengkapan,dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2012 Biro Perlengkapan telah melaksanakan 6 program dan 18 kegiatan

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Biro Perlengkapan mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.74.046.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.66.737.606.307,-atau sebesar 90,13 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun

tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

3. Permasalahan dan Solusi

- a. Kegiatan Peningkatan Sarana Mobilitas dan Administrasi Pemerintah Provinsi Kaltim DPA terlambat disahkan dan diterbitkan.
- b. Kegiatan Pengadaan tanah, persertifikatan dan pengamanan Aset Milik Pemprov Kaltim masih mengalami Kendala.
- c. Kegiatan Rehab Penyempurnaan Fisik Pemerintah Pemprov Kaltim menghadapi kendala.
- d. Kegiatan Penilaian Penghapusan dan Penjualan menghadapi kendala
- e. Perencanaan yang tidak sinkron tidak sesuai dengan usulan.
- f. Terjadinya perubahan/usulan baru yang tidak sesuai dengan DPA.

Solusi:

- a. Sebagian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dirasionalisasikan dan diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
- b. Perencanaan yang tidak sesuai dengan usulan diambil langkah-langkah sebagai berikut :
- c. Telah dilakukan revisi kegiatan.
- d. Disetorkan ke kas daerah
- e. Dalam penyelesaian pembebasan Lahan dan persertifikatan tanah, agar dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan panitia Pembebasan Tanah.
- f. Bagi masyarakat yang lahan/tanahnya akan diganti rugi supaya melengkapi surat-surat tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

i. Biro Keuangan,dengan :

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan,



Pada tahun 2012 Biro Keuangan telah melaksanakan 3 program dan 26 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Biro Keuangan mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.26.878.181.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.582.987.766,-atau sebesar 87,74 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang sudah optimal, tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen.

3. Permasalahan dan Solusi

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain
- b. Belum maksimalnya system pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penyusunan anggaran sampai pada pelaporan.
- c. Masalah regulasi pengelolaan keuangan yang berubah-ubah.
- d. Belum maksimalnya penempatan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan tupoksinya.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Biro dan Instansi lain.
- b. Meningkatkan pengelolaan system
- c. Meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat serta pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

j. Biro Kerjasama & Penataan Wilayah

1. Program dan Kegiatan

Untuk realisasi anggaran Pada tahun 2012 Biro Kerjasama & penataan wilayah telah melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan. umumnya dapat terserap lebih, lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Pada Program ini telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai melalui : Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Pada Program ini telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai melalui :
  - a. Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Kegiatan ini dengan.
  - b. Kegiatan Proses Pembentukan/Pemekaran Wilayah.
  - c. Kegiatan Inventarisasi dan Penamaan Pulau-Pulau Yang Belum Bernama di Kalimantan Timur.
  - d. Kegiatan Inventarisasi dan Penomoran Kode Serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
  
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran  
 Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, dengan total anggaran sebesar Rp.5.590.000.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.4.626.158.475,- dengan progres 82,76persen.
  
3. Permasalahan dan Solusi  
 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama masih dihadapi beberapa permasalahan, dan isu yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 dan seterusnya adalah sebagai berikut :  
 Perbatasan  
 Dalam bagian perbatasan, penyelenggaraan mediasi konflik dan penegasan batas, serta fungsi lain dalam pelaksanaannya masih dihadap beberapa permasalahan dan isyu sebagai berikut :
  - a. Masih terjadinya sengketa batas hamper disemua daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
  - b. Terjadinya perebutan Sumber Daya Alam di beberapa daerah Batas antar Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
  - c. Ketidakpastian hak penduduk dalam pendaftaran Pemilu kada;

- d. Ketidak jelasan kewenangan pengeluaran ijin pengelolaan SDA, Surat Keterangan, dan Bukti Hak Atas Tanah di Daerah Batas Antar Daerah;
- e. Terjadinya overlapping pengaturan Tata Ruang Daerah;
- f. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;
- g. Sikap sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan eksploitasi SDA daripada batas administrasi;
- h. Kondisi geografis Kaltim yang bergelombang, bergunung dan berbukit terjal sehingga menyulitkan dalam pelacakan;

#### Penataan Wilayah

Pelaksanaan Program dan kegiatan penataan wilayah dihadapi permasalahan dan isu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan pemekaran wilayah
- b. Tingginya aspirasi politik banyak kurang didukung oleh aspek teknis, ekonomis dan aspek lainnya;
- c. Kebanyakan penataan wilayah masih diterjemahkan pada pemekaran dan penggabungan wilayah, sehingga hal-hal substansial lainnya masih banyak terabaikan;
- d. Kebanyakan daerah-daerah yang dimekarkan menimbulkan masalah batas daerah;

#### Kerjasama

- a. Penanganan kerjasama masih tersebar, dan terdapat hampir disemua Dinas/lembaga sehingga sulit di koordinasikan dan diketahui tingkat perkemabangannya;
- b. Kajian Kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat, sering kurang didukung oleh informasi dan data yang memadai, akibatnya banyak kesepakatan yang dibuat sulit terealisasi dengan baik;
- c. Beberapa kesepakatan yang disetujui, sulit ditindak lanjuti, karena minimnya dukungan pembiayaan, SDM dan sumber-sumber lainnya;

- d. Kesepakatan Pemerintah dan Pihak lain yang ditindaklanjuti oleh swasta, sering kurang melibatkan swasta yang bersangkutan baik tahap perencanaan, dan proses negosiasi;
  - e. Dalam beberapa kesepakatan pembangunan infrastruktur, dan sarana keberadaan dukungan lahan cenderung belum siap;
  - f. Ajakan kerjasama cenderung diinisiatif oleh pihak lainnya, sedangkan pemerintah kurang mengkaji manfaat secara seksama dari kesepakatan yang dibuat, dan ditanda tangani bersama kesepakatan tersebut Pemerintah Provinsi kurang mendapatkan keuntungan yang optimal;
- k. Sekretariat DPRD Provinsi, dengan :
- 1. Program dan Kegiatan  
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 11 program dan 31 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.
  - 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, dengan total anggaran sebesar Rp.148.729.675.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.127.091.056.848,- dengan progres 85,45 persen.
- l. Dinas Pendapatan Daerah, dengan :
- 1. Program dan Kegiatan  
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 81 program dan 383 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.  
Program pelayanan administrasi perkantoran.  
Tujuan program untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan :
    - a. Penyediaan jasa surat menyurat
    - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- h. Penyediaan alat tulis kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
- o. Penyediaan jasa pegawai non PNS

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.  
 Tujuan program untuk meningkatkan jumlah gedung dan prasarana penunjang kantor.

Kegiatan :

- a. Pembangunan rumah dinas
- b. Pembangunan gedung kantor
- c. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- d. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- f. Pengadaan peralatan gedung kantor
- g. Pengadaan mebelair
- h. Pengadaan tanah
- i. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- j. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
- k. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan

Program peningkatan disiplin aparatur.

Tujuan program untuk meningkatkan disiplin pegawai.

Kegiatan :

- a. Pengadaan mesin absensi/kartu absensi
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan kapasitas sumber daya.

Tujuan program untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas sumber daya pegawai.

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian.

Tujuan program untuk menciptakan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan.

Tujuan program untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kegiatan :

- a. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, dengan total anggaran sebesar Rp.289.387.711.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.234.766.766.912,- dengan progres 81,13 persen.

## 3. Permasalahan dan Solusi

Sebagai upaya Optimalisasi PAD bersama ini disampaikan beberapa permasalahan (Bottel Neck) dibidang Penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

- a. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004, tarif pajak PBB-KB ini adalah sebesar 5 persen dari nilai jual Bahan Bakar Kendaraan, namun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/98/SJ tentang Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tertanggal 14 Januari 2010, maka penyusunan tarif 5 persen ini tidak

diterapkan sepenuhnya 100 persen dan bervariasi untuk masing-masing sektor usaha :

- Sektor Transportasi / umum dikenakan penuh : 100 persen dari tarif 5 persen
  - Sektor kehutanan diterapkan sebesar 90 persen dari tarif 5 persen
  - Sedangkan sektor Industri Kontraktor diterapkan hanya 17,17 persen dari tarif 5 persen
- b. Dengan adanya perbedaan tarif yang sangat lebar antara tarif sektor Industri (17,17 persen) dan sektor Pertambangan, Kehutanan dan perkebunan (90 persen) membuat peluang manipulasi penjualan Bahan Bakar dilapangan oleh para penjual/ penyalur dilapangan dimana penjualan kepada pemakai (end User) sektor pertambangan, kontraktor dijual dengan harga sektor industri.
- c. Hal ini bisa terjadi mengingat karena saat ini Pertamina tidak lagi memegang monopoli penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi ada pesaing lain seperti dari Shell, Petronas, AKR, BAPP dan lainnya sehingga terjadi perang harga dilapangan untuk mendapatkan pembeli (Buys) yang sebanyak-banyaknya.
- d. Indikasi kearah ini bisa terpantau dari agen yang membeli ke Pertamina dengan harga Industri, sedangkan penjualannya ke pemakai (end user) rata-rata dari sektor Pertambangan.
- e. Pada kondisi perekonomian Kaltim sektor Pertambangan lebih dominan dari pada sektor Industri sangat berbeda dengan daerah Jawa yang sektor Industrinya lebih dominan dari sektor Pertambangan sehingga kemungkinan manipulasi pajaknya kecil.

#### Perkiraan Kerugian

- a. Selisih tarif antara sektor Industri (17,17 persen) dengan Pertambangan (90 persen) adalah 5,24 kali lipat
- b. Bila separuh saja dari penjualan/pengeluaran bahan bakar, melakukan manipulasi tarif maka akan terjadi kerugian Pemprov. Kaltim sebesar Rp. 812,50 M

- c. Sampai saat ini penerimaan PBB-KB baru mencapai Rp. 750 M
- d. Upaya pengawasan baik pada Pertamina maupun non Pertamina apalagi pada tingkat agen dilapangan cukup sulit dan banyak menemui kendala.

#### Pajak Alat Berat

Masih rendahnya wajib pajak alat berat untuk membayar pajaknya khususnya perwakilan dari Kuasa Pertambangan

#### Solusi:

- a. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap Surat Edaran Mendagri agar perbedaan tarif antar sektor tidak terlalu lebar sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan.
- b. Terhadap pemberian keringanan tarif seperti ini, seyogyanya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan berapa keringanan pajak yang diberikan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing daerah.
- c. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru, UU No. 28 tahun 2009, lebih memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan Tarif Pajak yaitu menetapkan tarif Pajak PKB, BBN-KB dapat dijadikan rujukan.
- d. Perlu adanya pemeriksaan secara reguler oleh team OPD (Optimalisasi Pendapatan Daerah) terhadap Pertamina dan Non Pertamina dalam bentuk rekonsiliasi data guna memantau pergerakan penjualan dilapangan.
- e. Pemeriksaan dan Pendataan dapat juga dilaksanakan secara reguler bersama BP-Migas pusat.
- f. Pemerintah Daerah juga perlu memiliki data pembanding, untuk itu perlu dilakukan kegiatan survey ke beberapa perusahaan tambang besar (PKB2B) di Kalimantan Timur.
- g. Perlu segera disusun jadwal acara dan team yang solid dengan melibatkan Instansi terkait.



- h. Agar penerimaan pajak kendaraan alat berat masuk ke mekanisme Samsat.
  - i. Mengintensifkan pungutan Pajak Alat Berat khususnya Kuasa Pertambangan dengan melibatkan Pemkab/Pemkot setempat.
- m. Badan Penelitian Pembangunan Daerah, dengan :
- 1. Program dan kegiatan :  
Kebijakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam PROPEDA dan RENSTRA Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya merupakan dasar rujukan utama dalam penyusunan RENSTRA BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012. Program-program yang dilaksanakan oleh Balitbangda terdiri dari 13 program dan 60 kegiatan.
  - 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 telah dianggarkan dana sebesar Rp.21.831.796.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 18.957.913.515,- dengan progress 86,84 persen.
  - 3. Permasalahan dan Solusi  
Beberapa produk Keluaran Balitbangda sudah dihasilkan dan sudah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Harapan akan adanya perubahan sebagai dampak langsung dari input hasil litbang untuk penetapan kebijakan yang berlandaskan hasil penelitian masih perlu diupayakan lebih intensif lagi. Budaya akademis dan analitis dalam penetapan kebijakan , perencanaan belumlah seperti apa diamanatkan oleh Visi Litbang dimana seluruh kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan umum seharusnya didasarkan atas pertimbangan data yang akurat dan benar. Hal itu hanya dapat dilakukan bilamana hasil penelitian dijadikan rujukan utama, sebagai pertimbangan penetapan kebijakan. Dalam usianya yang baru mencapai 11 (sebelas) tahun

Balitbangda Prov Kaltim masih memiliki beberapa permasalahan / kendala :

#### Kendala Jejaring Kerja

Jejaring kerja antar lembaga litbang di Kaltim belum efektif, baik itu sesama litbang daerah maupun dengan litbang yang berada di pusat (Lintas Sektor). Hal ini dikarenakan antara lain kurangnya Sarana dan prasarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, sehingga dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan menjadi terhambat.

#### Kendala Eksternal

- a. Belum semua stakeholders memahami tupoksi Balitbangda Prov. Kaltim sehingga sering terjadi mispersepsi terhadap badan ini yang mengakibatkan koordinasi menjadi terhambat.
- b. Masih dirasakan adanya duplikasi tupoksi antara lembaga Balitbangda dengan lembaga daerah lainnya, sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan sejenis dan kurang intensifnya koordinasi, serta pembinaan kelitbangan yang menjadi tugas pokok Balitbangda
- c. Belum sepenuhnya hasil keluaran litbang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga terkesan keluaran litbang menjadi dokumentasi saja.
- d. Paradigma bahwa kemajuan Iptek dapat menjadi pendorong daya saing dan peningkatan ekonomi ( Knowledge based economy) belum mendapat tempat yang selayaknya.
- e. Belum optimalnya sinergitas 3 (tiga) aktor, yakni kelompok ABG (Academician atau pakar intelektual, Business sector. Atau pelaku usaha/korporasi, serta Government atau pemerintah). Fungsi regulasi pemerintah dan fungsi kecendekiawanan tidak banyak berarti tanpa dukungan pembiayaan (Financial Support) dan penerapan teknologi.

Struktur organisasi lebih menggambarkan karakteristik birokrat daripada teknokrat, membuat aktivitas litbang terpaku pada dikotomi ini.

Menghadapi permasalahan dan kendala, Balitbangda Prov Kaltim telah mengambil beberapa langkah solusi :

- a. Secara bertahap merubah pola pikir (Mind set) dikalangan internal dengan menekankan perubahan cara berpikir dan cara pandang birokrasi ke pola pikir dan cara pandang teknokrat yang profesional.
- b. Secara bertahap dan terencana mengikut sertakan personil (Staf dan Peneliti) dalam pendidikan dan pelatihan baik diklat fungsional maupun struktural untuk meningkatkan kompetensi personil.
- c. Selain itu untuk menanggulangi kekurangan personil (peneliti) telah diusulkan untuk merekrut secara khusus tenaga peneliti setiap tahunnya
- d. Memperluas jejaring kerja antar lembaga lintas sektor, baik di daerah maupun dengan lembaga yang ada di pusat. Sebagai contoh Forum Komunikasi Kelitbang Daerah (FKKD) yang sudah ada di tiga sub regional secara bertahap akan diperluas ke Kabupaten Kota di Kalimantan Timur.

Balitbangda Prov. Kaltim dalam hubungan memperluas jejaring kerja, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat beberapa kesepakatan kerjasama, diantaranya dengan :

- a. Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM
- b. Balitbang Pertanian Departemen Pertanian RI
- c. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- d. Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas ) RI
- e. Badan Standarisasi Nasional ( BSN )
- f. Institut Pertanian Bogor
- g. Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
- h. Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) RI

Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan dana agar lebih efisien dan terfokus pada bidang prioritas. Fokus Litbang kedepan yaitu :

- a. Litbang Teknologi Pangan
- b. Litbang Teknologi Energi Alternatif dan Terbarukan
- c. Litbang Manajemen Transportasi
- d. Litbang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Litbang Kesehatan dan obat-obatan

f. Litbang Pertahanan Keamanan

Secara bertahap mendukung adanya perubahan struktur organisasi yang lebih mencirikan struktur fungsi, agar lebih dinamis dan efisien

Untuk meningkatkan minat menjadi peneliti, secara bertahap akan diusulkan kepada Pemprov. Kaltim untuk memberikan insentif dan fasilitas kerja yang memadai bagi tenaga Peneliti.

n. Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RENSTRA Bandiklat Provinsi Kaltim, pada tahun 2012 lalu, khususnya terkait dengan pelaksanaan Belanja Langsung Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 8 program dan 32 kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi, operasional dan pemeliharaan relatif lebih menonjol, yang merupakan lingkup program yang bersifat penunjang, baik untuk keperluan melengkapi fasilitas fisik, berupa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur maupun kegiatan yang bertendensi terhadap pengembangan kediklatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 lalu Badan Diklat Provinsi Kaltim mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.35.516.675.000,- dan realisasi yang terserap sebesar Rp.29.806.659.449,- dengan progress 83,92 persen, sehingga masih tersisa dana Rp.5,7 milyar yang masih belum terserap.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Diklat Aparatur terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Dalam lingkup Diklat Teknis Fungsional masalah yang terjadi adalah terdapat 10 (sepuluh) kegiatan Diklat yang tidak dapat dilaksanakan, karena masalah teknis perubahan pembiayaan dalam anggaran yang prosesnya disahkan pada akhir tahun sedangkan waktunya sangat sempit untuk dilaksanakan Selain daripada itu, dalam lingkup Diklat Teknis Fungsional ini dihadapkan pula pada

masalah minimnya minat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengirimkan Aparat-nya mengikuti kegiatan diklat yang dilaksanakan ;

- b. Karena dalam pertengahan tahun terkendala dengan perpindahan ke Kantor yang baru, sehingga waktu banyak tersita untuk penataan ruang kerja dan lainnya.

Dalam mengatasi beberapa masalah tersebut diatas maka beberapa langkah strategis yang dianggap perlu untuk dilakukan Bandiklat Provinsi Kaltim pada tahun 2012 :

- a. Dari aspek perencanaan terhadap jumlah peserta yang akan mengikuti Diklat, dikonfirmasi terlebih dahulu dengan BKD dan Satuan Kerja-nya masing-masing, sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, sehingga dengan cara ini akan memberikan kepastian jumlah peserta yang mengikuti Diklat Aparatur, terutama Diklat Teknis Fungsional ;
- b. Peserta Diklat Teknis Fungsional melibatkan pula Aparat dari Kabupaten/Kota se-Kaltim, yang pemberitahuannya dilakukan sejak dini ;
- c. Pengaturan jadwal kegiatan Diklat Aparatur diatur secara optimal terhitung sejak Januari s/d November 2012, mengingat jumlah Diklat Teknis Fungsional yang relatif banyak dan untuk Diklat, maka kendala pengaturan kelas dan fasilitas penunjang penyelenggaraan Diklat sudah dapat diatasi sejak dini ;
- d. Kekurangan tenaga pengajar (widyaiswara), khususnya yang ahli dalam bidang diklat teknis dan fungsional, diatasi dengan melibatkan pejabat Struktural dan fungsional dari Kabupaten/Kota setempat sebagai tenaga pengajar.

- o. Inspektorat Provinsi, dengan ;

- 1. Program dan Kegiatan

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana urusan wajib dengan 12 Program dan 42 Kegiatan pada tahun 2012 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2012, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mengelola anggaran sebesar Rp. 18.209.774.000,- dengan realisasi yang terserap sebesar Rp. 15.832.007.757,- atau 86,94 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## 3. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan:

- a. Belum optimalnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- b. Kurangnya pengetahuan dan wawasan Aparat Pengawasan terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- c. Kurang sinerginya program kerja pengawasan yang dilakukan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
- d. Terjadinya perubahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang lebih mengoptimalkan peranan Inspektorat sebagai quality insurance dan counculting (mitra kerja).
- e. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.

### Solusi :

- a. Optimalisasi program kerja pengawasan yang telah ditetapkan, khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kebijakan Kepala Daerah.
- b. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas masing – masing.
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan

Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan.

- d. Meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
  - e. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut.
- p. Badan Kepegawaian Daerah, dengan :
- 1. Program dan Kegiatan  
Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan 8 Program dan 38 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.
  - 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Pada tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.34.023.227.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.803.105.161,- dengan capaian kinerja sebesar 93,47 persen.
    - a. Program pendidikan kedinasan  
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme  
Kegiatan ini merupakan Program dan kegiatan yang menyusun dan merencanakan Pelaksanaan kompetensi jabatan serta pengiriman tenaga Assessor dan pelaksanaan TPA di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan presentase pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 94 persen.
    - b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur  
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah merupakan program utama atau program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2012 yang terdiri 12 kegiatan
      - Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS.

Kegiatan ini memuat perencanaan karir pejabat struktural, melaksanakan Baperjakat, melaksanakan pelantikan Pejabat struktural, pengangkatan dan pemberhentian Jabatan fungsional serta pemetaan jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi anggaran sebesar 95 persen.

- Seleksi Penerimaan Calon PNS.

Kegiatan ini berisi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan penyusunan formasi Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kaltim. Pelaksanaan Seleksi Calon PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2012 masih dalam moratorium, masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, sedangkan untuk tahun 2012 kegiatan dari seleksi penerimaan Calon PNS menjadi penyusunan menjadi formasi dan pengadaan PNS dengan prosentase pencapaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 82 persen.

- Penempatan PNS.

Kegiatan ini berisi pelaksanaan Penempatan dan penataan PNS dan penyelesaian masalah-masalah Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi Anggaran tahun 2012 sebesar 93 persen.

- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.

Kegiatan ini berisi pelaksanaan kegiatan Kenaikan Pangkat yang dilakukan dua periode dalam satu tahun yaitu periode April dan periode Oktober tahun berjalan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Prosentase pencapaian realisasi Anggaran 2012 sebesar 99 persen.

- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

Kegiatan ini berisi Penyusunan data Kepegawaian dengan menggunakan dua aplikasi yaitu SAPK yang bekerjasama dengan BKN



Jakarta dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Dengan rincian kegiatannya adalah Validasi data, serta penyusunan buku, buku profil, brosur kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi anggaran 2012 sebesar 93 persen.

- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kegiatan ini berisi proses Pemberian bantuan berupa Tali Asih bagi PNS yang purna tugas dan Pemberian bantuan PNS sakit, wafat masih dalam tugas serta pemberian bantuan medical check-up dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi Anggaran 2012 sebesar 95 persen.

- Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Kegiatan ini berisi pelaksanaan rapat pertimbangan, pelaksanaan sumpah janji, pelaksanaan Pembinaan bagi PNS, dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 97 persen.

- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kegiatan ini adalah melakukan perencanaan proses pengiriman tugas belajar dan pemberian bantuan bagi PNS ijin belajar serta ikatan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi Anggaran 2012 sebesar 93 persen.

- Pemberian bantuan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Kegiatan ini adalah hanya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka Seleksi Penerimaan Praja IPDN di lingkungan Kabupaten/Kota se Kaltim dan Pembinaan Praja IPDN di Jatinagor Jawa Barat dengan Prosentase

Pencapaian realisasi anggaran sebesar 92 persen.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berisi data Program dan Kegiatan dalam tahun berjalan dengan prosentase pencapaian realisasi anggaran sebesar 97 persen.
- Penyelenggaraan Sosialisasi pelaksanaan Konseling  
Kegiatan ini adalah Pembinaan PNS yang akan purna tugas berupa bimtek serta melakukan Observasi lapangan (OL) agar PNS tersebut bisa mandiri/berdikari dengan prosentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2012 sebesar 79 persen.
- Ujian Dinas  
Kegiatan ini adalah melakukan pendataan PNS yang mengikuti ujian dinas dari Gol. I/d ke II/a, II/d ke III/a dengan Prosentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2012 sebesar 36,45 persen.
- Rapat Kerja Kepegawaian  
Kegiatan ini adalah melakukan Rapat Kerja Kepegawaian se Kaltim dengan peserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta 14 Kab/Kota se Kaltim untuk menyamakan Persepsi dalam rangka pengelolaan Administrasi Kepegawaian se Kaltim dengan Prosentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2012 sebesar 97 persen.

q. Kantor Penghubung Provinsi di Jakarta, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran guna mewujudkan Visi dan Misi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, maka untuk tahun anggaran 2012 telah ditetapkan 7 Program dan 35 Kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- e. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi
- g. Peningkatan Manajemen Kerja

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2012 pada SKPD Kantor Penghubung di Jakarta terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi sewa kamar mess ke daerah ditergetkan sebesar Rp. 25.291.700.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 22.995.747.027,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai sekitar 90,92 persen.

## 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- d. Letak dan lokasi Kantor penghubung Pemprov Kaltim yang berada di Jakarta dan jauh dari pusat Pemerintah Provinsi sehingga diperlukan waktu dan biaya yang lebih bila melakukan koordinasi dan pengelolaan keuangan di Daerah.
- e. SDM yang terbatas dari segi jumlah dan kemampuan.
- f. Jumlah Anggaran terbatas.
- g. Sarana dan Prasarana yang terbatas.

Solusi :

- a. Melakukan skala prioritas dalam menghadapi undanagn bila memungkinkan
- b. Menambah jumlah PNS.
- c. Penggunaan Anggaran yang efesien dan efektif.
- d. Renovasi dan perluasan kantor dan Mess

## r. Sekretariat KORPRI , dengan :

### 1. Program dan Kegiatan

Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana urusan wajib Otonomi Daerah dengan 7 Program dan 30 Kegiatan pada tahun 2012 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Alokasidan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2012, Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran sebesar Rp.17.624.294.000,- dan realisasi dana yang terserap sebesar Rp. 15.648.320.424,- dengan capaian kinerja 88,79 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## XVII. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, dengan:

### 1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan 11 Program dan 36 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang merupakan pelaksanaa kebijakan Pemerintahan Daerah.

### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Alokasi dana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 16.554.326.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.135.685.365,- (91,43persen) adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

#### a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di 1.203 Desa, 104 kecamatan, 10 Kabupaten.
- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebanyak 281 lembaga.
- Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pengelola profil desa/kelurahan sebanyak 60 orang.
- Terlaksananya fasilitasi pembentukan Pos Pelayanan Teknologi sebanyak 65 Pos Pelayanan Teknologi di 14 Kabupaten/Kota.
- Terpilihnya 3 (tiga) Juara Perlombaan Desa dan 3 (tiga) Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi, dengan klarifikasi sebagai berikut :

#### Juara Perlombaan Desa

Juara I (satu) Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Juara II (dua) Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Juara III (tiga) Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan.

#### Juara Perlombaan Kelurahan

Juara I (satu) Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur Kota, Kota Tarakan.

Juara II (dua) Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota, Kota Samarinda.

Juara III (tiga) Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan.

#### b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

- Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa sebanyak 30 pasar desa yang dibina dan sebanyak 30 BUMDES yang dibina di 10 kabupaten.
- Terlaksananya Pelatihan bagi pengelola UMKM sebanyak 84 UMKM.

#### c. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Terlaksananya pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, melalui pelatihan penyusunan RPJMDes sebanyak 240 orang.
- Terpilihnya 4 (empat) Juara Kepala Desa Berprestasi dan 4 (empat) Juara Lurah Berprestasi Tingkat Provinsi, dengan klarifikasi sebagai berikut :

#### Juara Kepala Desa Berprestasi

Juara I (satu) Nur Alim Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Juara II (dua) Fajar Wijyono Kepala Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsui, Kabupaten Nunukan.

Juara III (tiga) Nina Hartati Kepala Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.

Juara IV (empat) Muhasin Kepala Desa Seniung Jaya, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser.

#### Juara Lurah Berprestasi

Juara I (satu) Suwarso Lurah Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota, Kota Samarinda.

Juara II (dua) M. Idris Lurah Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Juara III (tiga) M. Jamli, A.Md Lurah Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Juara IV (empat) Arif Supriadi, S.STP Lurah Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Terlaksananya Pelatihan Aparatur Desa dibidang Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 30 orang.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Sumber daya aparatur (pegawai) yang tersedia, sebagian masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- b. Belum tertanamnya pola kerja yang efektif dan efisien, sehingga kinerja pegawai masih belum menunjukkan hasil yang maksimal guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Solusi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Melakukan penataan dan memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya.
- c. Mendorong dan menumbuhkan semangat bagi setiap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.
- d. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dalam setiap penyelesaian tugas dan permasalahan yang dihadapi.

## XVIII. Urusan Wajib Sosial

Dinas Sosial, dengan :

### 1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 yang ditetapkan untuk dilaksanakan selain terdiri dari Program dan

Kegiatan yang ada pada setiap SKPD (sebanyak 57 Program dan 202 Kegiatan) juga terdapat Program dan Kegiatan yang merupakan Urusan Wajib Sosial.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 sebesar Rp.64.327.108.000,- terealisasi Rp.56.518.335.431,- dengan capaian kinerja 87,86 persen.

a. Program Bidang Pemberdayaan Sosial, meliputi :

- 1) Pelayanan terhadap keluarga bermasalah sosial, sebagai berikut :
  - a) Penanganan keluarga fakir miskin. Target 1.650 KK, realisasi 2010 KK;
  - b) Penanganan keluarga berumah tidak layak huni. Target 100 KK, realisasi 132 KK;
  - c) Pembinaan keluarga pioner/AKSK. Target 150 KK, realisasi 70 KK.
- 2) Pemberdayaan masyarakat terasing, melalui kegiatan penanganan komunitas adat terpencil (KAT). Dari target 100 KK, terealisasi 162 KK.

b. Program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi :

1. Pelayanan sosial anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagai berikut :
  - a) Penanganan anak terlantar. Target 3.400 anak, realisasi 3.007 anak;
  - b) Penanganan anak balita terlantar. Target 303 anak balita, realisasi 312 anak balita;
  - c) Penanganan anak jalanan. Target 140 anak, realisasi 213 anak;
  - d) Penanganan anak cacat. Target 100 anak, realisasi 100 anak;
  - e) Penanganan anak berhadapan dengan hukum. Target 27 anak, realisasi 27 anak;

- f) Penanganan anak yang membutuhkan perlakuan khusus. Target 16 anak, realisasi 16 anak.
  2. Pelayanan rehabilitasi dan perlindungan kepada wanita bermasalah sosial, melalui kegiatan penanganan wanita tuna susila. Dari target 319 orang, terealisasi 319 orang.
  3. Pelayanan dan perlindungan terhadap lanjut usia bermasalah sosial, melalui kegiatan penanganan lanjut usia terlantar, dari target 770 orang lanjut usia, realisasi mencapai 1.105 orang lanjut usia.
  4. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat fisik, mental dan sosial, sebagai berikut :
    1. Penanganan penyandang cacat. Target 550 orang, realisasi mencapai 782 orang penyandang cacat;
    2. Penanganan eks korban NAPZA, dari target 300 orang, realisasi mencapai 430 orang;
    3. Penanganan eks narapidana, dari target 95 orang, realisasi mencapai 95 orang;
    4. Penanganan orang dengan HIV/AIDS, dari target 100 orang, terrealisasi hanya 75 orang;
  - c. Program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi :
    - 1) Pelayanan rehabilitasi dan perlindungan kepada wanita bermasalah sosial, melalui kegiatan penanganan wanita korban tindak kekerasan, dari target 30 orang, realisasi mencapai 103 orang.
    - 2) Pelayanan dan bantuan bagi korban bencana dan pekerja migran, sebagai berikut :
      - a) Penanganan korban bencana alam. Target 250 jiwa, realisasi hanya mencapai 105 jiwa;
      - b) Penanganan korban bencana sosial/pengungsi. Target 250 jiwa, realisasi mencapai 555 jiwa;
      - c) Penanganan pekerja migran terlantar. Target 150 orang, realisasi hanya mencapai 34 orang.
- Kegiatan pelayanan dan bantuan bagi korban bencana alam dan pekerja migran merupakan



kegiatan yang bersifat tentatif (berdasarkan saat kejadian).

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kehadiran para pencari kerja dari daerah lain yang tidak didukung dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai (non skill), memberikan kontribusi bagi bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Masih ada sebagian kab/kota yang kurang akurat dalam menyampaikan data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi data populasi dan hasil-hasil penanganan PMKS di Kab/Kota, dengan format by name by address.
3. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat, provinsi dan kab/kota.

Solusi :

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dinas/instansi sosial kab/kota, serta koordinasi dalam penyempurnaan kebutuhan data PMKS.
- c. Mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program prioritas dan unggulan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat penghargaan dari Menteri Sosial RI sebagai Provinsi yang telah menerapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Selain itu, Karang Taruna Kalimantan Timur berhasil mendapat Penghargaan sebagai Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional.

## XIX. Urusan Wajib Budaya dan Pilihan Pariwisata :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan :

### 1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

untuk dilaksanakan selain terdiri dari 24 Program dan 93 Kegiatan.

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 sebesar Rp.65.427.330.000,- terealisasi Rp.57.275.553.370,- dengan capaian kinerja 87,54 persen.

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
  - Analisis pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata.
- b. Program pengembangan destinasi pariwisata
  - Peningkatan dan Pengembangan destinasi Pariwisata Seni, Budaya dan Film Provinsi Kaltim.
  - Pengembangan objek pariwisata unggulan.
- c. Program pengembangan kemitraan
  - Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan, usaha jasa dan sarana pariwisata.
- d. Program Nilai Budaya Seni dan Film.
  - Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Film.
- e. Program pengelolaan kekayaan budaya :
  - Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
- f. Program pengelolaan keragaman budaya :
  - Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal.
  - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

## XX. Urusan Wajib Kearsipan

Badan Arsip Daerah, dengan :

### 1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 yang ditetapkan untuk dilaksanakan selain terdiri dari 10 Program dan 39 Kegiatan yang terdiri dari :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
  - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah;
  - Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
  - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- Pada tahun 2012 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan kearsipan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 sebesar Rp.19.908.975.000,- terealisasi Rp.16.736.978.419,- realisasi keuangan 84,07 persen.
- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
    - Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
    - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
    - Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
  - b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
    - Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
    - Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Adapun permasalahan dalam melaksanakan pencapaian program dan kegiatan Badan Arsip Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sarana terutama ruang untuk penyimpanan arsip mengingat Pembangunan Depo Arsip berlantai 4 sampai dengan akhir tahun 2012 belum rampung dilaksanakan, bahkan anggaran untuk lanjutan pembangunan Depo Arsip yang tersedia pada DPA Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tidak direalisasikan sama sekali.
- b. Terbatasnya kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia kearsipan dalam hal ini pejabat fungsional kearsipan masih belum memiliki sertifikasi keahlian dibidangnya.

- c. Kurangnya pemahaman dan teknis pelaksanaan program dan kegiatan dari sub-sub bidang yang ada dengan menyesuaikan jadwal (schedule) yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja tidak optimal.

Solusi :

- a. Dalam upaya mengatasi terbatasnya sarana terutama ruang untuk penyimpanan arsip adalah dengan mengupayakan penyelesaian Pembangunan Depo Arsip, Alokasi anggaran yang telah diterima untuk lanjutan Pembangunan Depo Arsip pada DPA Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) hendaknya dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pejabat fungsional Arsiparis yang ada pada Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur hendaknya segera diikutkan dalam Sertifikasi Kearsipan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap sub bidang hendaknya dikoordinasikan dengan baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

## XXI. Urusan Wajib Perpustakaan

Badan Perpustakaan Daerah, dengan:

### 1. Program dan kegiatan

Untuk mendukung kebijakan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan 7 program dan 26 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

### 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 sebesar Rp25.423.597.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.020.414.387,- atau sebesar 66,95 persen.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa layanan informasi sekaligus sebagai lembaga teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas membina dan mengembangkan berbagai jenis perpustakaan di daerah.

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Perpustakaan belum berjalan secara optimal

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam rangka memberdayakan semua jenis perpustakaan belum dapat berjalan secara optimal, hal tersebut di karenakan :

1) Perpustakaan Umum Kab/Kota belum berperan secara optimal dalam mendukung pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat di daerah. Hingga saat ini di wilayah Kaltim telah terbentuk 12 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 14 Kab/Kota yang ada di Kaltim. Kab/Kota yang belum membentuk kelembagaan Perpustakaan Umum adalah Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Tanah Tidung. Seyogianya Perpustakaan Umum Kab/Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan minat baca di daerah, namun karena berbagai keterbatasan khususnya dalam hal keterbatasan SDM (pustakawan) peran tersebut tidak berjalan secara optimal.

2) Rendahnya komitmen dan kesadaran penerbit, penulis dan pemilik naskah kuno (manuskrip) untuk menyerahkan/melaporkan publikasinya kepada Perpustakaan Nasional dan Badan Perpustakaan Prov. Kaltim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkan bahwa setiap penerbit (termasuk SKPD yang mempublikasikan karya cetak/rekam) dan penulis wajib menyerahkan publikasinya kepada Perpustakaan Nasional RI dan Badan Perpustakaan di Provinsi.

- 3) Belum terciptanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dengan instansi terkait khususnya dengan Dinas Pendidikan Kaltim dan Kanwil Kementerian Agama Kaltim dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah. Kondisi ini menyebabkan kuantitas dan kualitas perpustakaan sekolah yang ada di Kaltim masih memprihatinkan.
- 4) Bantuan/stimulant buku dan meubeler perpustakaan yang telah didistribusikan oleh Badan Perpustakaan Prov. Kaltim kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Puskesmas belum didayagunakan sesuai dengan harapan. Perpustakaan Desa/Kelurahan yang telah mendapat bantuan dari Badan Perpustakaan Prov. Kaltim tercatat 343 dan Perpustakaan Puskesmas sebanyak 10%. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa hanya 60% Perpustakaan Desa/Kelurahan yang didayagunakan dengan baik. Sementara untuk perpustakaan Puskesmas hanya 80% yang didayagunakan dengan baik.
- 5) Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan pada instansi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan perpustakaan di SKPD Provinsi dan Kab/Kota serta perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemernitah belum berkembang dengan baik. Disisi lain pustakawan/pengelola perpustakaan yang ada saat ini lebih berorietasi pada aspek pengolahan dokumen/bahan pustaka dan cenderung mengabaikan aspek pengembangan profesi untuk mencetuskan ide kreatif dan inovatif melalui karya tulis untuk pengembangan kepastakawanan. Stigma ini menyebabkan perhatian Pustakawan untuk memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas kepada masyarakat cenderung terabaikan.
- 6) Belum terbentuknya secara formal jaringan kerjasama perpustakaan dalam upaya mewujudkan

Interoperabilitas Sistem Perpustakaan Digital di Kalimantan Timur.

Solusi :

Untuk mengentaskan berbagai permasalahan di atas, perlu ditempuh langkah strategis berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Perpustakaan Umum Kab/Kota sehingga dapat berperan sebagai mitra Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dalam melakukan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat di daerah. Optimalisasi peran dan fungsi Perpustakaan Umum Kab/Kota dapat dilakukan dengan cara :
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan Umum Kab/Kota melalui pendidikan dan latihan serta melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan standar kompetensi pustakawan.
  - Mengembangkan program bantuan/stimulant untuk meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Kab/Kota, khususnya dalam hal bantuan bahan perpustakaan dan perangkat teknologi informasi
  - Meningkatkan komitmen dan kepedulian Bupati/Walikota serta lembaga legislative dalam mengembangkan perpustakaan dan minat baca di daerah.
- 2) Menggalakkan kembali sosialisasi UU No. 4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan berbagai metode dan media. Sosialisasi secara terus menerus diharapkan akan meningkatkan perolehan publikasi daerah dalam bentuk karya cetak dan karya rekam serta manuskrip. Disamping itu perlu dibentuk forum rapat koordinasi pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990. Forum ini diharapkan dapat melaksanakan pertemuan secara berkala untuk memantau pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990.

- 3) Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dan instansi terkait, khususnya dengan Dinas Pendidikan Prov. Kaltim dan Kanwil Kementerian Agama Kaltim perlu membahas secara bersama pola pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah di wilayah Kaltim. Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada tahun 2009 dinilai belum optimal dalam mengembangkan perpustakaan sekolah sehingga perlu dilakukan evaluasi.
- 4) Perpustakaan Umum Kab/Kota diharapkan dapat berperan secara nyata dalam memonitorpendayagunaan bantuan/stimulan perpustakaan desa/kelurahan yang telah didistribusikan oleh Badan Perpustakaan Prov. Kaltim. Disisi lain Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Puskesmas yang telah menerima dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan puskesmas yang ada di wilayah mereka.
- 5) Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dengan bantuan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim serta Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim perlu merumuskan dan memetakan kebutuhan real tenaga pustakawan di Kaltim melalui Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan. Hasil analisa tersebut selanjutnya akan digunakan untuk dasar penentuan formasi kebutuhan tenaga pustakawan di Kaltim. Disisi lain perlu memprioritaskan diklat bagi tenaga pustakawan khususnya dalam bidang metode penulisan dan juga bidang IT sehingga kinerja dan kompetensi Pustakwan semakin meningkat.
- 6) Badan Perpustakaan Prov. Kaltim perlu membentuk secara formal jaringan kerja sama perpustakaan berbasis teknologi informasi. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyusun grand design konsep Interoperabilitas Sistem Perpustakaan DigitalKalimantan Timur. Konsep dasar dari system ini adalah pemanfaatan secara bersama semua sumber daya koleksi yang dimiliki oleh setiap perpustakaan



dalam rangka memberikan layanan yang cepat dan terpadu.

C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan.

I. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Program merupakan program kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu, maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Pada Tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 14 Program dan 30 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran sumber Pembiayaan Rutin dan Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp.51.679.369.300,- dan terealisasi SebesarRp.45.378.686.310,- dengan capaian kinerja 87,81 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

- Pengadaan Tandon Air Untuk Masyarakat Pesisir sebanyak 10 unit di Kab. Berau
- Pengadaan Etalase Pengembangan Usaha Pesisir sebanyak 10 Unit di Kab. Berau dan Kab Kukar
- Pengadaan Peralatan Gift Shop sebanyak 10 paket di Kab. Berau
- Pembuatan Para-para Penjemuran Ikan sebanyak 6 unit di Marangkayu, Kab. Kukar.

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

- Pembuatan dan penanaman transplantasi karang sebanyak 50 unit di Kab Bulungan dan Kab Berau
  - Pembuatan dan penanaman terumbu buatan sebanyak 50 unit di Kab Bulungan dan Kab Berau
  - Penanaman mangrove sebanyak 14.500 pohon di Tanjung Batu - Berau
  - Restocking benih ikan di kawasan reservat sebanyak 80.000 ekor di Kab. Kukar
- c. Program pengembangan budidaya perikanan
- Pengadaan bibit ikan karamba percontohan di eks tambang sebanyak 5.000 ekor di Kota Samarinda
  - Pembangunan bak pendederan di BBIP Talisayan di Berau
- d. Program pengembangan perikanan tangkap
- Pengadaan alat tangkap Gill Net Perairan Laut sebanyak 50 unit di Kota Balikpapan, Kab. PPU dan Kab Nunukan
  - Pengadaan mesin ketinting, perahu dan gill net sebanyak 20 unit di Kab. Kubar dan Kab Kukar
  - Pengadaan kapal dan perlengkapannya sebanyak 10 unit di Kab. Berau dan Kab Paser
  - Pengadaan alat tangkap bubu sebanyak 20 unit di Kota Balikpapan
  - Pengadaan mesin ketinting 31 PK sebanyak 5 unit di Kab Kukar
  - Pengadaan mesin ketinting 6 PK sebanyak 30 unit di Kab. Kubar dan Kab Kukar
  - Pengadaan peralatan perbengkelan sebanyak 2 paket di Kota Samarinda dan Kab. PPU
  - Pengadaan bantuan kapal, mesin dan alat tangkap sebanyak 1 paket di Kab. Kutim
  - Pengadaan Kapal perikanan tangkap 30 GT sebanyak 5 unit di Kota Samarinda, Kab. Bulungan, Kota Bontang, Kota Tarakan dan Kab Berau.
- e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- Pengadaan fasilitas Unit Pengolahan Skala Kecil untuk mendukung industri pengolahan sebanyak 1 paket di Kota Balikpapan
  - Sosialisasi Gemar Makan Ikan di 5 lokasi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kukar, Kota Tarakan, dan Kab. Berau.
- f. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- Paket bantuan benur sebanyak 4 paket di Kab Kukar, Kota Balikpapan, Kab PPU, dan Kab Bulungan
  - Paket bantuan benih ikan nila dan pakan sebanyak 5 paket di Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kota Samarinda, Kab. Malinau dan Kab Tana Tidung
  - Paket bantuan polyculture (Rumput laut, Udang, Bandeng) sebanyak 5 pake di Kan Kukar, Kota Balikpapan, Kab. PPU, Kota Bontang, dan Kab. Nunukan
  - Paket bantuan nener sebanyak 5 paket di Kab Kukar, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. PPU dan Kab Nunukan.
  - Perbaikan saluran irigasi BBI (Balai Benih Ikan) Sebulu sebanyak 1 paket di Kab. Kukar
  - Pembersihan dan pendalaman waduk BBI Sebulu sebanyak 1 paket di Kab. Kukar
  - Pembuatan kolam ikan hias di Pusat Pelatihan Perikanan sebanyak 1 paket di Muara Badak, Kab. Kukar
  - Pembuatan kolam percontohan di Pusat Pelatihan Perikanan sebanyak 1 paket di Muara Badak, Kab. Kukar
1. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan yang terjadi untuk sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur dalam hal pencapaian target realisasi adalah sebagai berikut :
- a. Umumnya armada perikanan di Kaltim masih dibawah 5 GT yang mana daya jelajah untuk wilayah penangkapan hanya berkisar pada 13 mil pantai,

sehingga hasil tangkapan menjadi kurang maksimal.

- b. Sulitnya mendapatkan serta mahalnya bahan bakar solar untuk melaut sehingga banyak nelayan yang mengurangi waktu dalam menangkap ikan.
- c. Munculnya penyakit ikan dan udang seperti KHV (Koi Herves Viruses) dan White Spot yang menyebabkan para pembudidaya ikan dan udang merugi.
- d. Jaringan irigasi tambak di Kalimantan Timur umumnya hanya satu jalur, yang mana hal ini memudahkan penularan penyakit.
- e. Masih maraknya penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti : Bom, Setrum dan Trawl.

Solusi :

- a. Meningkatkan kemampuan armada perikanan Kaltim yaitu dengan memberikan bantuan mesin kapal 30PK sehingga diharapkan daya jelajah penangkapan ikan bisa lebih maksimal.
- b. Menambah jumlah SPDN (Solar Package Dealer Nelayan) di beberapa daerah sehingga dapat menyediakan bahan bakar solar serta nelayan dapat membeli bahan bakar solar sesuai harga yang ditetapkan oleh Pertamina.
- c. Menggalakkan sosialisasi akan pentingnya menjaga kualitas air yang dalam hal ini adalah satu diantara penularan penyakit terbesar untuk ikan dan udang, serta meningkatkan pengetahuan para pembudidaya ikan dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan.
- d. Memperluas dan memperbanyak saluran irigasi tambak di sentra-sentra tambak Kaltim sehingga kebutuhan akan air tambak dapat terpenuhi.
- e. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terpadu di lapangan serta menindak segala pelanggaran hukum sektor perikanan sehingga akan memberikan efek jera kepada yang menggunakan alat tangkap terlarang.

## II. Urusan Pilihan Pertanian

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & UPTD, dengan :
  - 1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan UPTD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 yang terdiri dari 37 Program dan 139 Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (sumber anggaran Ditjen. Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian).
  - b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (sumber anggaran Ditjen. Hortikultura, Kementerian Pertanian).
  - c. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, industri Hilir, Pemasaran dan Eskpor Hasil Pertanian (sumber anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kementerian Pertanian).
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- Pada tahun 2012 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.88.148.354.000,- terealisasi sebesar Rp.80.413.870.216,- atau sebesar 91,23 persen.
- a. Program peningkatan kesejahteraan petani :
    - Peningkatan kemampuan lembaga petani
    - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
    - Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
    - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
  - b. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian :
    - Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian
    - Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
    - Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
    - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
    - Pengembangan diversifikasi tanaman
    - Penyuluhan sumber pangan alternatif
    - Penyusunan data base potensi produksi pangan

- Pengembangan perbenihan/perbibitan
  - c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan :
    - Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
    - Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian masyarakat
  - d. Program peningkatan produksi pertanian :
    - Pengembangan bibit unggul pertanian
  - e. Program peningkatan teknologi pertanian :
    - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
    - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna
    - Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam.
3. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan :
- Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian program antara lain :
- a. Kondisi infrastruktur sebagai pendukung utama belum cukup memadai sehingga berpengaruh pada proses produksi dan distribusi
  - b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana fisik berupa bangunan, jaringan tata air, alat mesin pertanian, dan lain-lain.
  - c. Kepemilikan lahan masih relatif kecil dan umumnya belum memenuhi skala ekonomi, sehingga diperlukan konsolidasi manajemen pengelolaan yang lebih rasional yang didukung oleh kelembagaan agribisnis dan agroindustri yang efektif.
  - d. Skala usaha yang dikembangkan pada umumnya relatif kecil dan terpencar-pencar yang disebabkan oleh luas kepemilikan lahan yang sangat terbatas, sehingga secara ekonomi kurang menguntungkan dalam agribisnis yang menuntut ketersediaan produksi dalam volume dan kualitas yang memadai dan kontinyu.
  - e. Terjadinya penyusutan areal usaha tani pada daerah-daerah tertentu sebagai dampak dari konsekuensi logis pembangunan daerah, sehingga

secara kuantitas pertambahan areal tanam masih belum maksimal.

- f. Ketersediaan alat mesin pertanian terutama alsin pengolahan hasil sangat terbatas dan masih sulit dimiliki kelompok tani karena harganya mahal. Hal ini menyebabkan produk pertanian terutama produk hortikultura umumnya dijual dalam bentuk primer (segar).
- g. Masih rendahnya daya saing hasil produksi pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan dalam hal kualitas dan harga dibanding produk luar. Hal ini disebabkan karena sistem usaha tani belum dikelola secara profesional dengan berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis secara optimal.
- h. Penerapan teknologi budidaya masih rendah misal dalam penerapan agroinput, penggunaan benih berlabel belum optimal, jarak tanam tidak seragam, aplikasi pupuk masih minimal, pengendalian OPT belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas yang dicapai. Selain itu mutu hasil produk rendah, kadar air dan kotoran tinggi, oleh karena RMU belum memenuhi standar, sehingga kualitas produk kurang kompetitif di pasar.
- i. Keterbatasan modal usaha dan sulitnya mendapatkan modal secara kredit dengan bunga rendah, prosedur mudah dan dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai kebutuhan petani.
- j. Masih rendahnya kompetensi, kapabilitas dan kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha tani dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga terjadi ketidak sebandingan antara luas lahan yang ada dengan kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia.
- k. Kerjasama/kemitraan belum berkembang baik, sehingga petani masih kesulitan memasarkan produknya.
- l. Kemajuan teknologi dan informasi pertanian belum banyak dimanfaatkan di tingkat petani, sehingga petani pada umumnya masih mengembangkan pola-pola pemasaran tradisional.
- m. Pengaruh perubahan iklim global. Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan dan hortikultura

sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim global, dalam wujud pengaruh el Nino (kemarau) dan la Nina (penghujan)

Solusi :

- a. Memantapkan pola intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta efisiensi sumberdaya pertanian dan teknologi spesifik lokasi
  - b. Perluasan areal tanam terutama mengoptimalkan pemanfaatan lahan terlantar/bero, membangun/merehabilitasi jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta sarana pengairan, mengembangkan penangkar benih serta mengfungsikan balai-balai benih
  - c. Peningkatan indeks pertanaman bagi daerah - daerah sentra pertanian melalui pengembangan alat-alat mesin pertanian
  - d. Pengadaan alat-alat pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian
  - e. Meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada kebutuhan pasar
  - f. Pembangunan pertanian diarahkan kepada pendekatan keterpaduan komoditi, wilayah dan usahatani yang mencakup sub sistem hulu, on farm dan hilir
  - g. Pengembangan kemitraan dan usahatani
  - h. Peningkatan SDM dan penyuluhan pertanian serta kelompok tani
  - i. Peningkatan dukungan kelembagaan pertanian.
- b. Dinas Perkebunan dan UPTD, dengan :
1. Program dan Kegiatan  
Untuk mendukung Program dan Kegiatan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 yang ditetapkan untuk dilaksanakan terdiri dari 28 Program dengan Kegiatan yang ada pada SKPD dan UPTD Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
  2. Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Pada tahun 2012 Alokasi anggaran APBD yang diterima sebesar Rp.45.178.014.870,- dengan realisasi sebesar Rp.35.180.841.417,- atau sebesar 77,88 persen.
    - a. Program peningkatan produksi perkebunan :
      - Pengembangan bibit unggul perkebunan



- Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan, waralaba, penyusunan RKDK pupuk dan inventarisasi plasmanutfah
- Pengembangan dan operasional PIR swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan:
  - Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah
  - Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat
- c. Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan:
  - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna
  - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
  - Pelatihan penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam
  - Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan
- d. Program peningkatan kesejahteraan petani kebun :
  - Peningkatan kemampuan lembaga petani
  - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
  - Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
- e. Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan :
  - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh perkebunan
  - Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh perkebunan
  - Penyuluhan dan pendampingan bagi perkebunan
  - Pemberdayaan dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan
- f. Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan :
  - Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan
  - Pengembangan diversifikasi tanaman
  - Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- Penyuluhan sumber pangan alternative
- Penyusunan data base potensi produksi pangan
- Pengembangan perbenihan/perbibitan
- Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet pola PIR Swadaya di wilayah Kalimantan Timur tahun 2012 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2012 pengadaan untuk bibit karet tidak terserap secara keseluruhan hal ini disebabkan karena kontraktor tidak bisa memenuhi semua kebutuhan karet yang diperlukan kontraktor wanprestasi.
- b. Kemampuan teknis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
- c. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru dilakukan oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
- d. Para Petugas Lapangan (PPL) Swadaya dan tahapan-tahapan pengembangannya sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program.
- e. Dalam distribusi bantuan petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan

secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Solusi :

- a. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar-penagkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit dan karet diharapkan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar penagkar tersebut.
  - b. Perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuaikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.
  - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
  - d. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
  - e. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan tehnis PIR Swadaya.
  - f. Mekanisme penyusunan anggaran selalu dihadiri oleh instansi yang membidangi panggar eksekutif dan komisi legislatif bersama dengan yang mengajukan anggaran baik secara formal maupun informal.
  - g. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)
- c. Dinas Peternakan, dengan :
1. Program dan kegiatan  
Program Pembangunan Peternakan melalui APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang meliputi 4 (empat) program terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran atau eks Belanja Administrasi Umum (Kepmendagri No. 29 Tahun 2003) dan 8 (delapan) kegiatan terkait dengan program pembangunan peternakan yang langsung kepada masyarakat.

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor peternakan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2012 Anggaran Peternakan dialokasikan sebesar Rp. 54.784.714.000,- terealisasi Rp. 51.580.426.032, dengan capaian kinerja 95,71 persen.

### a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

#### 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

##### Penyakit Menular Ternak

- Sosialisasi Penanganan PHM, di 14 kabupaten/kota
- Workshop Penyakit Zoonosa se-Kaltim, 1 paket di Samarinda
- Refresher PDSR, 1 paket di Samarinda
- CE petugas PDSR, 1 paket di Samarinda
- Gerakan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Terpadu, 1 paket di Bulungan.

### b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

#### 1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

- Penyebaran Ternak Sapi Potong sebanyak 600 Ekor di Kabupaten Berau (150 ekor), Bulungan (200 ekor), Malinau (150 ekor) dan Tana Tidung (100 ekor).
- Pemberdayaan Peternak Sapi sebanyak 160 ekor di Kabupaten Penajam Paser Utara (15 ekor), Samarinda (30 ekor), Kutai Barat (30 ekor), Kutai Kartanegara (85 ekor)
- Pengadaan Ternak Itik sebanyak 3.300 ekor di Paser (3.200 ekor) dan Bulungan (100 ekor).

#### 2. Pengembangan Agribisnis Peternakan

- Penggemukan Ternak Sapi Potong sebanyak 150 ekor di Balikpapan, Bontang dan Samarinda

#### 3. Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi

- Identifikasi Penyusunan Program sebanyak 1 Paket di 14 Kabupaten/Kota
  - Rakontekda Pembangunan Peternakan sebanyak 1 Kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
  - Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 Paket di 14 Kabupaten/Kota
  - Field Trip pembangunan peternakan di Padang, Sumatera Barat
  - Apresiasi perencanaan pembangunan peternakan dan evaluasi 1 paket di Samarinda
  - Pertemuan jabatan fungsional 1 paket di Samarinda
4. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya
- Fasilitas Pengembangan Sapi VBC sebanyak 20 ekor di Kutai Kartanegara
  - Fasilitas Pengembangan ternak kambing sebanyak 100 ekor di Balikpapan (50 ekor) dan Samarinda (50 ekor)
  - Penjaringan Ternak Sapi Bibit Unggul sebanyak 50 ekor di Kutai Kartanegara
  - Pembelian Sapi Betina Bunting BC Ex Import sebanyak 100 ekor di Paser (50 ekor) dan Samarinda (50 ekor)
  - Pengembangan Babi sebanyak 175 ekor di Malinau
  - Perbaikan mutu genetik kerbau sebanyak 30 ekor di Nunukan
  - Perbaikan mutu genetik INKA sebanyak 14 ekor di Kutai Kartanegara
5. Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
- Penyebaran Ternak Sapi sebanyak 680 ekor di Kutai Kartanegara (100 ekor), Kutai Timur (280 ekor), Kutai Barat (100 ekor), Penajam Paser Utara (100 ekor), dan Paser (100 ekor).

6. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peternakan
  - Pembangunan Puskesmas 2 unit di Bulungan dan Balikpapan
  - Pembangunan gedung Check Point 1 unit di Nunukan.
  - Peralatan pengolahan telur (oven) 4 unit di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Paser
- c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
  1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
    - Sosialisasi Public Awareness Peduli ASUH dan Zoonosis sebanyak 1 Paket di Kota Samarinda
    - Sosialisasi Pemotongan Ayam ASUH dan Zoonosis sebanyak 4 paket di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan
    - Pertemuan lalu lintas perbatasan komoditas peternakan/hewan di Malinau
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
  1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (IB dan ET)
    - Sosialisasi teknologi pengembangan pakan di Kutai Timur, Kutai Barat dan Bontang
    - Pelatihan Penyusunan ransum pakan ternak 1 paket di UPTD BPIB Api-api
    - Pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan pupuk asal kotoran ternak 60 unit di Paser (15 unit), Samarinda (7 unit), Kutai Kartanegara (18 unit) dan Bulungan (20 unit)

#### UPTD LABORATORIUM KESWAN

- a. Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
  - Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Laboratorium sebanyak 1 Paket di Kota Samarinda
  - Pengadaan Peralatan Laboratorium kesmavet sebanyak 1 Paket di Kota Samarinda

## UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN INSEMINASI BUATAN

### a. Pembibitan dan Perawatan Ternak

- Pembuatan jalan api-api sebanyak 1 Paket di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pembuatan pagar batas tanah sebanyak 1 paket di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pembuatan garasi traktor sebanyak 1 unit di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pembuatan biosecurity sebanyak 1 unit di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara

### 1. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan :

- a. Pemasukan bibit ternak ke Kalimantan Timur populasi dasar 300.000 ekor maka diperlukan minimal 20.000 ekor/tahun. Sedangkan realisasi pemasukan ternak bibit pada tahun 2012 melalui dana APBD provinsi hanya 6.228 ekor, sehingga masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan terobosan dalam pengadaan bibit dengan melakukan peningkatan pesan swasta dan masyarakat seperti melalui CSR Perusahaan Sawit, Pertambangan dan Kredit Perbankan maupun Kredit Program.
- b. Belum adanya regulasi yang mendukung keterlibatan swasta dalam pengadaan ternak bibit, sehingga dapat membantu peningkatan populasi melalui pola integrasi sapi sawit dan reklamasi lahan eks tambang.
- c. Kebutuhan tenaga / aparat peternakan dalam daerah kabupaten / kota masih dirasakan belum terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara Kebijakan Pemerintah tentang "Moratorium Penerimaan CPNS" masih belum berakhir.

- d. Upaya terobosan untuk meningkatkan populasi ternak dan upaya mencapai kecukupan/swasembada daging (sapi) 2014 belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah seperti pengadaan bibit ternak dan operasional pendukung lainnya.
- e. Masalah yang berkaitan dengan produktifitas Antara lain :
  - Tingkat kelahiran masih rendah yaitu sekitar 15 %
  - Adanya kecenderungan memotong sapi pada Berat antara 250 -300 kg yang sebenarnya
  - Masih bisa digemukkan hingga berat mencapai 400-600 Kg.
  - IB belum bisa berjalan dengan baik akibat dari beberapa hal seperti satuan lokasi SPIB
  - masih sangat luas dari jangkauan petugas, kemampuan petugas sebagian masih rendah serta kesadaran petani juga masih rendah.
- f. Masalah yang berkaitan dengan Pembibitan Ternak :
  - Sulitnya mencari sumber bibit karena adanya beberapa provinsi yang telah menghentikan pengeluaran bibit.
  - Bibit yang tersedia pada daerah sumber bibit kurang memenuhi kriteria bibit.
  - Banyak kasus kejadian penyakit yang menyebabkan kematian pada bibit ternak yang masuk.
- g. Tingkat kepedulian mengenai kesehatan hewan / ternak masih rendah, sehingga penularan terhadap ternak lain banyak terjadi , oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih serius, seperti kasus zoonosis penyakit Avian Influenza (AI), Anthrax bisa menular ke manusia dan hal ini sudah terjadi pada provinsi / daerah lainnya. Disamping itu Penyakit Jembrana sudah banyak terjadi di seluruh kabupaten / kota yang menyebabkan kematian.



- h. Terbatasnya sarana transportasi bagi pelaksana di lapangan dengan jangkauan wilayah binaannya yang cukup luas serta tingkat kesulitan geografis di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan pelayanan kesehatan hewan terhadap masyarakat kurang cepat.
- i. Arus lalu lintas ternak antara provinsi maupun antara perbatasan yang masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur tanpa dapat terkontrol menyebabkan penyakit mudah terjadi.
- j. Kredit yang diharapkan peternak sebagai sumber permodalan untuk pengembangan usaha peternakan masih perlu jaminan dari peternak, saat ini baru Bank Kaltim yang telah merealisasikan Kredit Ternak Sejahtera, bahkan KUPS yang sudah lama disetujui hingga saat ini belum terealisasi.
- k. Laporan perkembangan ternak pemerintah tidak dibuat secara teratur. Banyak hal yang mempengaruhi keadaan ini diantaranya, lokasi penyebaran yang jauh dengan jumlah petugas yang terbatas, peran kelompok tani kurang aktif, sarana dan prasarana serta kurangnya dana pendukung bagi petugas di lapangan untuk memantau dan membuat laporan perkembangan ternak.
- l. Aparat penyuluhan di lapangan sebagian besar memiliki fungsi rangkap yaitu selain penyuluh juga memberikan pelayanan dan penyelesaian administrasi, di samping itu sarana pendukung masih sangat terbatas serta koordinasi dengan instansi induk penyuluh yaitu BKPP masih kurang.

Solusi :

- a. Setiap tahunnya telah diupayakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis peternakan. Sedangkan penambahan pegawai masih belum dapat

dilakukan sampai saat ini, karena adanya kebijakan moratorium CPNS.

- b. Untuk mengatasi penurunan populasi ternak antara lain melalui penyebaran / pengadaan ternak bibit yang bermutu , pengembangan usaha penggemukan, pengawasan pemotongan hewan betina produktif dan penerapan skala usaha yang ekonomis.
- c. Perlu adanya dukungan pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota) dalam upaya mencapai kecukupan/swasembada daging 2014, terutama dalam hal pengadaan bibit ternak dan pendukung lainnya.
- d. Untuk meningkatkan produktifitas antara lain melalui peningkatan kelahiran melalui program IB, seleksi pejantan pada lokasi-lokasi dengan sistem mini ranch, menekan tingkat kematian ternak dan perbaikan pengelolaan pakan ternak.
- e. Untuk menangani masalah perbibitan diharapkan, daerah dapat melakukan impor ternak bibit/sapi bunting.
- f. Melakukan pembinaan tentang cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar pada peternak serta sosialisasi secara berkesinambungan cara pencegahan terhadap penularan penyakit ke manusia.
- g. Mengupayakan para peternak yang akan mengusahakan kembali usahanya melalui lembaga keuangan lain (modal ventura, BPD dan lain-lain) dengan dukungan Proposal yang dapat meyakinkan pihak penyandang dana . Selain itu tetap diupayakan agar perusahaan yang membuka kemitraan tetap dapat menampung para peternak yang berminat disesuaikan dengan kemampuan daya serap pasar, baik lokal maupun regional.
- h. Diperlukan jadwal yang ketat dalam memberikan penyuluhan, pelayanan dan penyelesaian administrasi, sehingga tidak melupakan tugas dan fungsinya. Disamping itu diperlukan pula penambahan tenaga fungsional

seperti tenaga paramedik serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

- i. Mendukung sepenuhnya dalam upaya pengembangan "food estate" di Kaltim.

### **III. Urusan Pilihan Kehutanan**

Dinas Kehutanan dan UPTD, dengan :

#### **1. Program dan Kegiatan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Mei 2010, maka terjadi perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Kehutanan, khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Peredaran Hasil Hutan (UPTD PHH) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH). Kedua UPTD tersebut digabung dan dibentuk sesuai dengan lokasi UPTD menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (UPTD PPHH), sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak mengalami perubahan adalah UPTD Planologi, UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam dan UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
- f. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- g. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- j. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Untuk melaksanakan program pembangunan kehutanan, Alokasi Anggaran Sumber Dana APBD untuk Lingkup Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.85.642.185.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.64.920.308.178,- atau sebesar 75,80 persen.

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan :
  - Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan :
  - Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan :
  - Pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  - Pembinaan dan peningkatan usaha pelstarian alam.
- d. Perlindungan dan pengamanan hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan :
  - Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan.
- e. Program perencanaan dan pengembangan hutan :
  - Pengembangan perencanaan pembangunan kehutanan tingkat Provinsi.
- f. Program penataan dan pemantapan kawasan hutan :
  - Inventarisasi hutan.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Berdasarkan Tabel 15 tersebut diatas, terdapat 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang belum memiliki Gedung Kantor yaitu UPTD PPHH Wilayah Tengah dan UPTD Wilayah Timur. Permasalahan kedua UPTD tersebut diatas belum memiliki Gedung Kantor dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. UPTD PPHH Wilayah Tengah

UPTD PPHH Wilayah Tengah sebelumnya adalah UPTD Peredaran Hasil Hutan Samarinda (d/h Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir). Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir memiliki Gedung Kantor di Jl. Slamet Riadi, Karang Asam Samarinda, pada saat akan dibangun Islamic Centre oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gedung Kantor CDK Mahakam Ilir termasuk

lokasi yang akan dibangun. Untuk menggantikan Gedung Kantor CDK Mahakam Ilir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memindahkan CDK Mahakam Ilir ke lokasi Kantor Eks Gedung Kantor Wilayah Departemen Penerangan Jl. Basuki Rahmad Samarinda, sampai terbentuknya UPTD PPHH Wilayah Tengah. Selanjutnya Gedung Eks Kantor Wilayah Departemen Penerangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dipergunakan untuk Kantor BPID, sejak dibentuknya BPID, UPTD PPHH Wilayah Tengah berkantor bersama dan pada akhir Desember 2010 UPTD PPHH Wilayah Tengah diperintahkan untuk meninggalkan Kantor tersebut dan pindah di lokasi Gedung milik Pemprov dengan Status Pinjam Pakai di Jl. Biola Samarinda

b. UPTD P PPHH Wilayah Timur

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan UPTD PPHH Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karena UPTD PPHH merupakan UPTD baru maka sarana dan prasarana yang dimiliki belum ada mulai dari Gedung Kantor, Kendaraan Operasional sampai dengan Peralatan Perlengkapan Kantor, sementara ini UPTD PPHH masih berkantor di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mulai Tahun 2011 telah dialokasikan untuk sewa gedung Kantor.

c. Terhadap kekurangan sarana dan prasarana akan diusulkan pada Tahun 2012, diantaranya adalah :

- Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPHH Wilayah Tengah di Jl. Teuku Umar atau Rehab Berat Kantor di Jl. Biola Samarinda.
- Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPHH Wilayah Timur di Bontang atau Sengata (Kutai Timur)
- Terhadap kekurangan sarana dan prasana penunjang dan operasional akan diusulkan pengadaanya secara bertahap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**IV. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral**  
Dinas Pertambangan dan Energi, dengan :

1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana guna mencapai sasaran-sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam tahun 2012 yang disusun dengan mengacu pada RPJMD KALTIM 2009-2013, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur memiliki program 11 program dan 35 kegiatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012 pencapaian program dan kegiatan dinas pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 33.871.735.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 7.871.735.000,- dan Belanja Langsung (Belanja Kegiatan) sebesar Rp. 26.000.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 30.191.702.654,- atau 89,14% sedangkan Fisik sebesar 98,77 %.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat sebanyak 2400 lembar prangko dan 1157 lembar materai.
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan.
- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional berupa servis dan suku cadang 7 unit, bahan bakar 5700 liter, peluman 54 kali KIR-STNK 17 unit.
- Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.
- Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja, BBM Genset 1440 liter, Pelumas genset 40 liter dan pemeliharaan peralatan kerja sebanyak 81 unit, 1 paket.

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 14 paket.
  - Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 465 buku, 250 kartu, 137.142 lembar.
  - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 228 buah.
  - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 18 buah.
  - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 68 eksemplar.
  - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak 43 laporan.
  - Terlaksananya penyediaan jasa tenaga tertentu sebanyak 1 paket.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa lemari buku 6 unit, AC split 10 unit, Meja-kursi-gradensa 50 unit, Media Informasi 1 Paket, Sound Sistem 1 Paket, Alat InspeksiUkur 3 Unit.
  - Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebanyak 1 gedung.
- c. Program Peningkatan Disiplin
- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 270 stel.
- d. Program peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur
- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 40 orang.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil Produksi di bidang

Pertambangan sebanyak 11 Laporan, jaringan aplikasi 1 unit.

- Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 34 laporan, Rakor Pertambangan sebanyak 1 kali, Laporan 5 buku, 26 paket.
- Terlaksananya kegiatan kegiatan pengawasan pertambangan pada PKP2B dan KP di wilayah Kalimantan Timur yang kondusif, aman, berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat sebanyak 4 paket, 54 laporan.
- Terlaksananya kegiatan pengawasan perusahaan jasa penunjang pertambangan dalam rangka ketersediaan data dan informasi pertambangan secara lengkap dan akurat untuk mewujudkan usaha pertambangan yang kondusif sebanyak 44 laporan, sosialisasi 1 paket, maket 1 Unit.
- Terlaksananya kegiatan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral di Kalimantan Timur berupa kegiatan eksplorasi dan inventarisasi potensi sumber daya mineral dalam rangka ketersediaan data cadangan dan bahan galian mineral di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 65 paket, 33 laporan.
- Terlaksananya kegiatan optimalisasi penyebaran informasi kebijakan peraturan di sektor PE sebanyak laporan berupa kegiatan Pameran Pertambangan dan Energi sebanyak 3 kali, 1 Perda, 4 set, 17 laporan.
- Terlaksananya kegiatan evaluasi good mining practice pada perusahaan tambang di Kaltim sebanyak 16 Laporan, 2 Pergub, 4 paket.
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan sektor hulu migas dan perusahaan jasa penunjang migas berupa penyediaan data-data potensi sumur-sumur tua, sumur-sumur



- produksi migas, comdev, penggunaan BBM dan sarana penunjang migas sebanyak 1 paket, 40 Laporan.
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas berupa pengawasan penggunaan BBM bersubsidi, pengawasan dan sosialisasi konversi mitan ke LPG 3 kg terdapatnya jumlah agen BBM dan transportir BBM bersubsidi, jumlah badan usaha migas hilir dan agen LPG 3 kg sebanyak 900 orang, 9 buah, 48 laporan.
- f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
- Terlaksananya kegiatan penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi berupa pendataan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, tersedianya peta dan analisis daerah rawan bencana alam geologi sebanyak 36 paket 17 laporan.
  - Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan evaluasi dampak kerusakan geologi tata lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat berupa inventarisasi kerusakan lingkungan, tersedianya data berupa peta rupa bumi dan analisis kerusakan tata lingkungan sebanyak 31 paket dan 14 laporan kegiatan
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan perencanaan ketenagalistrikan berupa kegiatan pemantauan lingkungan dan K3 pada lokasi pembangkit ketenagalistrikan PLN, pembinaan dan pemantauan usaha ketenagalistrikan non PLN, pengawasan comdev usaha ketenagalistrikan untuk mendukung ketersediaan energi listrik dengan tarif

- keekonomian dan tingkat pelayanan yang memadai.
- Terlaksananya audit instalasi gedung pemerintah sebanyak 4 buku, 40 laporan.
  - Terlaksananya kegiatan konservasi energi berupa kegiatan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat, audit energi gedung sebanyak 2 buku, 2 kegiatan, 200 orang dan 24 laporan kegiatan.
- h. Program Diversifikasi Bahan Bakar
- Terlaksananya kegiatan pengembangan energi berupa perbaikan lampu PLTS sebanyak 759 unit, pengadaan PLTS sebanyak 599 unit untuk penerangan desa, DED PLTMH 2 buku, Instalasi Biogas sebanyak 4 unit, 14 data, 59 laporan kegiatan.
- i. Program Perencanaan Anggaran, Informasi dan Evaluasi
- Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebanyak 2 dokumen, 4 buku, 3 paket, 7 laporan kegiatan.
- j. Program Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengolahan ABT/AP, kegiatan pengeboran air tanah dangkal, penyusunan rancangan Perda air tanah, tersedianya data perencanaan eksploitasi air tanah untuk pembuatan sumur dangkal, sinkronisasi penetapan pajak ABT/AP dan pendataan sebaran sumur boragar terkendalinya pemakaian ABT/AT sesuai dengan peruntukannya sebanyak 7 sumur dangkal, 2 buku, 3 intake, 80 orang, 3 paket, 26 laporan.
  - Terlaksananya kegiatan pemetaan cekungan air tanah, inventarisasi air tanah, optimalisasi sumber mata air di pasir dalam rangka

ketersediaan peta cekungan air tanah, peta konservasi air tanah dan potensi air tanah sebanyak 1 buku, 1 sumur, 1 peta, 15 titik, 9 laporan.

k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah sebanyak 76 orang, 7 paket.

3. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pemanfaatan cadangan sumber daya mineral, sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi yang tidak dapat tergantikan serta sumber daya air dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur wilayah, perekonomian daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Masih kurangnya fasilitas penerangan, penyediaan air bersih terutama pada daerah-daerah pedesaan/perbatasan. Selain dari pada itu untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah masih terdapat kendala-kendala diantaranya pembatasan Kuota BBM oleh Pemerintah pusat sehingga menyebabkan antrean BBM. Di beberapa daerah/wilayah sering terjadi banjir apabila hujan yang salah satu penyebab dikarenakan akibat penambangan yang tidak terkendali oleh pengusaha-pengusaha yang memegang Izin Usaha Pertambangan di daerah. Masih terdapatnya kesenjangan sosial dan kesempatan kerja di beberapa wilayah pertambangan.

Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah diantaranya melakukan kegiatan pendataan dan penelitian sumber daya cadangan mineral untuk mendukung infrastruktur wilayah, pengembangan sumber daya energi alternatif seperti Biogas, PLTMH, dan sumber energi lainnya, pembangunan PLTS untuk

masyarakat yang belum mendapatkan penerangan listrik sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dalam peningkatan pendidikan, perekonomian masyarakat pedesaan.

Pemanfaatan sumber daya air tanah dan permukaan serta mata air penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan upaya-upaya untuk mendorong perusahaan pertambangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Selain dari pada itu perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan K3 dan Lingkungan, reklamasi dan revitigasi lahan bekas tambang dalam upaya menjaga kerusakan lingkungan dan mencegah banjir. Koordinasi dan pendataan hasil produksi di bidang pertambangan serta lifting migas perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan sumber penerimaan untuk mendukung pembangunan daerah.